



PEMERINTAH
KOTA MALANG



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2022



>>> Kata Pengantar

Puji syukur pertama-tama kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis, **penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020** tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban urusan pemerintahan yang dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Substansi LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

1. **Capaian pelaksanaan program dan kegiatan**, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan Tahun Anggaran 2022;
2. **Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah** dan pelaksanaannya Tahun Anggaran 2022; dan
3. **Tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah** Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan pasal 19 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Memperhatikan ketentuan di atas, **LKPJ Walikota Malang Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Malang Tahun 2022** yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 23 tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Untuk itu, saya sampaikan rasa **terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta masyarakat Kota Malang** yang senantiasa berselaras langkah bersama Pemerintah Kota Malang untuk tetap melaksanakan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan laporan ini **diharapkan dapat disampaikan berbagai hal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2022 secara bersama dalam satu kesatuan sistem.** Selanjutnya dapat dijadikan energi penguat untuk mengemban amanah masyarakat Kota Malang menyelesaikan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi dan meridhoi langkah kita bersama. Akhirnya kami berharap bahwa **kebersamaan dan kekompakan tetap terjalin utuh dan berkelanjutan** demi terwujudnya visi **“KOTA MALANG BERMARTABAT”**.

Malang, Maret 2023

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1. Dasar Hukum.....	I-3
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-4
1.2.1. Visi	I-4
1.2.2. Misi	I-5
1.3. Data Umum Daerah.....	I-6
1.3.1. Data Geografis Wilayah.....	I-6
1.3.2. Jumlah Penduduk	I-7
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	I-10
1.3.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	I-10
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-14
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-15
1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I-15
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	II-1
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	III-1
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-1
3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-10
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-10
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan	III-11
3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan	III-11
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan	IV-1
Bab V Penutup.....	V-1
Lampiran-lampiran	



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan	I-8
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	I-12
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	I-13
Tabel 1.6	Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya	I-14
Tabel 1.7	Realisasi Belanja Menurut Jenisnya	I-15
Tabel 1.8	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya	I-16
Tabel 2.1	Isu Strategis Prioritas Pembangunan Perubahan RKPd Tahun Anggaran 2022	II-2
Tabel 2.2	Perubahan Program dan Kegiatan pada RKPd Tahun 2022	II-3
Tabel 2.2	Penjabaran Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022	II-7
Tabel 3.1	Kebijakan Strategis Yang Diterapkan	III-13
Tabel 3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPD Walikota Tahun Anggaran 2021	III-17
Tabel 3.3	Daftar Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022	III-44



Daftar Gambar

Gambar 3.1	Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2021-2022	III-3
Gambar 3.2	Realisasi Indeks Kesehatan Tahun 2021-2022	III-3
Gambar 3.3	Realisasi Indeks Daya Beli Tahun 2021-2022	III-3
Gambar 3.4	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2022	III-4
Gambar 3.5	Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2021-2022	III-4
Gambar 3.6	Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2022	III-5
Gambar 3.7	Realisasi Persentase penurunan PMKS Tahun 2021-2022.....	III-5
Gambar 3.8	Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat Tahun 2021-2022	III-6
Gambar 3.9	Realisasi Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2022.....	III-6
Gambar 3.10	Realisasi Persentase Perda yang ditegakkan Tahun 2021-2022	III-7
Gambar 3.11	Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021-2022	III-7
Gambar 3.12	Realisasi Opini BPK Tahun 2021-2022.....	III-7
Gambar 3.13	Maturitas SPIP Tahun 2021-2022.....	III-8
Gambar 3.14	Rasio PAD Tahun 2021-2022	III-8
Gambar 3.15	Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021-2022	III-9

Bab I Pendahuluan

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
WALIKOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2022



»» Bab I Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan satu kesatuan sistem yang bergerak secara sistemik serta tersinergi antara pusat, tingkat provinsi hingga tingkat kota/kabupaten. Hal ini juga merupakan perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, maka **pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, direncanakan, dirancang serta disusun dengan mempertimbangkan isu nasional dan juga isu di daerah.** Pada tahun 2022 Kota Malang seperti halnya daerah lain di Indonesia dan Dunia masih harus menghadapi disrupsi pandemi Covid-19.

Hampir semua kota/kabupaten di Indonesia mengalami penyesuaian dan penurunan pendapatan daerah serta pembelanjaan yang lebih terorientasikan pada aspek penanganan Covid-19 dan penguatan bantalan sosial yang berimplikasi terhadap penurunan belanja infrastruktur. Pun demikian sentimen positif menjadi modal menyongsong tatanan pembangunan pada tahun anggaran 2022. Pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 pada angka -2,26 persen mulai menunjukkan indikasi kebangkitan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 4,21 persen.

Memperhatikan hal tersebut, **Pemerintah Kota Malang menetapkan 4 langkah strategis** penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun anggaran 2022, meliputi strategi **penguatan layanan bidang kesehatan dan pendidikan**, strategi **penguatan pemulihan (*recovery*) ekonomi**, strategi **penguatan infrastruktur** dan strategi **penguatan bantalan sosial**. Kesemuanya diramu dengan **pendekatan *Hexahelix*** yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang.

Tumbuhnya ekonomi kreatif yang bergerak secara *linier* dengan terbangunnya gedung *Malang Creative Center*, Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, aktivasi Kayutangan *Heritage* serta belanja pengadaan yang berorientasi pada UMKM (Jatim Bejo) dengan jumlah transaksi tertinggi di Jawa Timur sebesar Rp91,66 miliar mampu melahirkan capaian signifikan pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang melonjak mencapai titik tertinggi dalam dua belas tahun terakhir pada angka 6,32% di tahun 2022. Demikian halnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mampu ditingkatkan dari angka 82,04 menjadi 82,71. Adapun angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 4,62% menjadi 4,37%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan dari 9,65% menjadi 7,66%.

Apresiasi atas berbagai capaian kinerja positif Kota Malang pun hadir dalam wujud **raihan 40 penghargaan sepanjang tahun 2022**. Catatan prestasi tersebut meliputi 31 penghargaan tingkat nasional dan 9 penghargaan tingkat provinsi. Termasuk diantaranya prestasi bersejarah **Tiga Besar Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)** dari Kementerian PPN/Bappenas, **Penghargaan WTP 11 Kali Berturut-turut** dari Kementerian Keuangan, dan **Anugerah Revolusi Mental 2022** dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Sementara itu **118 inovasi daerah** terus dikembangkan hingga tahun 2022.

Seluruh prestasi dan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses reformasi birokrasi yang terus diakselerasi serta **meningkatkan daya tarik Kota Malang sebagai destinasi kunjungan kerja dari berbagai daerah** di Indonesia sehingga turut berdampak positif **menjadi stimulus pergerakan ekonomi di Kota Malang**.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 174).

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025. Mengacu tema pembangunan daerah pada RPJPD ke-4 yakni “Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan dalam rangka Menyejahterakan Masyarakat Kota Malang” disandingkan dengan keadaan termutakhir tahun 2018, Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Kota Malang Bermartabat sebagai visi pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023.

Kota Malang Bermartabat diharapkan menjadi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2023, dimana capaian itu dapat menunjukkan karakter mulia seluruh warga Kota Malang sebagai negeri makmur yang diridhoi Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) yang dicirikan dengan masyarakat paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, dan penuh kesadaran positif. Dengan berbagai keunggulan itu, Kota Malang akan memiliki daya saing sebagai kota terkemuka yang berprestasi di berbagai bidang.

1.2.2 Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Malang Bermartabat, berikut ini rumusan 4 (empat) misi pembangunan daerah tahun 2018-2023.

Misi 1 : Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2 : Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3 : Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4 : Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Kota Malang sebagai pusat pengembangan kawasan tengah Provinsi Jawa Timur, secara geografis berada pada 112°34'38.83"BT-112°40'59.41"BT dan 07°54'38.97"LS-08°02'47.04"LS (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012).

Kota Malang berjarak 89 km di sebelah selatan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, secara geografis berada di daerah pegunungan pada ketinggian 395 sampai dengan 618 mdpl (Peta Rupabumi Bakosurtanal 2002). Di sebelah Utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah Timur terdapat Gunung Semeru, serta di sebelah Barat terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. Selain itu, Kota Malang dialiri oleh Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, Sungai Amprong dan Sungai Sukun.

Curah hujan di Kota Malang cukup tinggi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Selama tahun 2022 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu mencapai 496,1 mm selama 24 hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu mencapai 20,3 mm selama 3 hari (Kota Malang Dalam Angka, 2023). Hal ini menyebabkan rerata kelembaban udara kota mencapai 73,1%-84,2%, dengan kelembaban minimum mencapai 34% dan kelembaban maksimum mencapai 98%. Rerata suhu udara kota adalah 24,4°C-26°C (suhu udara minimum mencapai 14,6°C dan suhu udara maksimum mencapai 31,4°C).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 Luas wilayah Kota Malang 11.108 Ha atau 111,08 km², secara administratif berbatasan dengan

wilayah Kabupaten Malang :

- **Sebelah utara** berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;
- **Sebelah timur** berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
- **Sebelah selatan** berbatasan dengan Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji;
- **Sebelah barat** berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Mencermati publikasi Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2023, **jumlah penduduk Kota Malang tahun 2022 mencapai 846.126 jiwa** terdiri atas 420.897 jiwa penduduk laki-laki dan 425.229 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2022 bertambah 1.793 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 844.933 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang yakni mencapai 208.741 jiwa, disusul oleh Kecamatan Sukun sebesar 196.689 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 182.693 jiwa, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 163.964 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Klojen sebanyak 94.039 jiwa.

Secara rinci keadaan penduduk di masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2022	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Blimbing	182.693	0,10	10.304
2	Klojen	94.039	-0,04	10.651
3	Kedungkandang	208.741	0,32	5.238
4	Sukun	196.689	0,10	9.427
5	Lowokwaru	163.964	0,10	6.889
Jumlah / Rata-rata		846.126	0,13	7.617

Sumber: BPS Kota Malang, Tahun 2023

Penduduk Kota Malang tahun 2022 menurut kelompok umur terbanyak berada pada umur 30-34 mencapai 66.966 jiwa, dan tersedikit berada pada umur 70-74 mencapai 19.516 jiwa.

Secara agregat kelompok umur balita yakni umur 1 tahun sampai dengan 4 tahun mencapai 59.556 jiwa, sedangkan umur sekolah yakni 5 tahun sampai dengan 24 tahun mencapai 251.641 jiwa. **Penduduk Usia produktif yakni 25 tahun sampai dengan 59 tahun mencapai 424.943 jiwa**, adapun jumlah penduduk umur lansia yakni 60 tahun lebih mencapai 110.166 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	30.593	28.963	59.556
2	5-9	31.926	30.584	62.510
3	10-15	32.008	30.405	62.413
4	15-19	31.480	30.021	61.501
5	20-24	33.113	31.924	65.037
6	25-29	33.673	32.581	66.254
7	30-34	34.161	32.805	66.966
8	35-39	33.828	32.671	66.499
9	40-44	32.200	31.565	63.765
10	45-49	29.026	29.532	58.558
11	50-54	26.225	28.171	54.396
12	55-59	22.926	25.579	48.505
13	60-64	19.012	21.082	40.094
14	65-69	14.192	16.636	30.828
15	70-74	8.813	10.703	19.516
16	75+	7.721	12.007	19.728
	Jumlah Total	420.897	425.229	846.126

Sumber: BPS Kota Malang, Tahun 2023, Sensus Penduduk

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Dengan rerata **laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,13** selama tahun 2020 sampai dengan 2022, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kedungkandang mencapai 0,32. Di urutan berikut Kecamatan Sukun sebesar 0,10, Kecamatan Blimbing sebesar 0,10, Kecamatan Lowokwaru sebesar 0,10, dan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Klojen sebesar -0,04. Sedangkan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,14.

Laju pertumbuhan penduduk yang demikian menyebabkan **Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang terpadat penduduknya mencapai 10.651 jiwa per km²**, disusul oleh Kecamatan Blimbing sebesar 10.304 jiwa per km², Kecamatan Sukun sebesar 9.427 jiwa per km², Kecamatan Lowokwaru sebesar 6.889 jiwa per km² dan Kecamatan Kedungkandang sebesar 5.238 jiwa per km².

1.3.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Malang pada tahun 2022 berjumlah 5.965 orang. Karakteristik PNS Kota Malang didominasi oleh pejabat fungsional sebanyak 3.343 orang yang terkonsentrasi di bidang pendidikan dan kesehatan, disusul pejabat pelaksana sebanyak 2.081 orang. Selebihnya sebanyak 541 PNS menduduki jabatan struktural mulai Pengawas, Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	PNS	2842	3123	5965
1	JPT	21	8	29
2	Jabatan Administrasi			
	2.1 Administrator	72	44	116
	2.2 Pengawas	221	175	396
3	Pelaksana	1622	459	2081
4	Fungsional	906	2437	3343
B	PPPK			
1	Fungsional	411	749	1160
Jumlah Total		3253	3872	7125

Sumber : BKPSDM Kota Malang, data per 31 Desember 2022

Dari jumlah PNS sebanyak 5.965 orang yang terdiri atas 2.842 pegawai laki-laki dan 3.123 pegawai perempuan, terbanyak sudah meningkat kualitas pendidikan formalnya mencapai 2.001 berkualifikasi sarjana. Sedangkan dalam tataran kelompok ruang terbanyak adalah III/b mencapai 1.035 PNS, disusul oleh PNS golongan ruang III/a berjumlah 871 dan III/d berjumlah 666 PNS. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan terinci pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	PNS	2842	3123	5965
1	S1/S2/S3	1257	2351	3608
2	D3/Akta3/Sarjana Muda	182	543	725
3	Sma/Sederajat	938	213	1151
4	Smp/Sederajat	313	13	326
5	SD	152	3	155
B	PPPK	411	749	1160
1	S1/S2/S3	377	670	1047
2	D2/D3	28	77	105
3	Sma/Sederajat	6	2	8
Jumlah Total		3253	3872	7125

Sumber : BKPSDM Kota Malang, data per 31 Desember 2022

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Pangkat/ Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	PNS	2842	3123	5965
1	Golongan IV	322	616	938
	Pembina Utama (IV/e)	0	0	0
	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	2	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)	21	40	61
	Pembina Tingkat I (IV/b)	84	222	306
	Pembina (IV/a)	217	352	569
2	Golongan III	1085	2087	3172
	Penata Tingkat I (III/d)	243	423	666
	Penata (III/c)	207	393	600
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	331	704	1035
	Penata Muda (III/a)	304	567	871
3	Golongan II	1150	411	1561
	Pengatur Tingkat I (II/d)	391	156	547
	Pengatur (II/c)	286	225	511
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	329	25	354
	Pengatur Muda (II/a)	144	5	149
4	Golongan I	285	9	294
	Juru Tingkat I (I/d)	267	9	276
	Juru (I/c)	17	0	17
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1	0	1
	Juru Muda (I/a)	0	0	0
B	PPPK	411	749	1160
	PPPK/IX	387	678	1065
	PPPK/VII	22	71	93
	PPPK/V	2		2
Jumlah Total		3253	3872	7125

Sumber : BKPSDM Kota Malang, data per 31 Desember 2022

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang ditetapkan melalui **Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021** Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022** Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 pendahuluan (preliminary) sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), **realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.171.753.404.373,60** terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp718.337.240.633,10; pendapatan transfer sebesar Rp1.450.405.048.247,00; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.011.115.493,50. Realisasi pendapatan menurut jenisnya terinci sebagai berikut.

Tabel 1.6
Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya

No	Uraian	Realisasi (Rp.)
1	PENDAPATAN	2.171.753.404.373,60
1.1	Pendapatan Asli Daerah	718.337.240.633,10
1.2	Pendapatan Transfer	1.450.405.048.247,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.011.115.493,50

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023, *unaudited*

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah pada tahun 2022 mencapai **Rp2.188.318.745.870,33**, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.871.123.190.030,33, berikutnya belanja modal sebesar Rp310.813.569.513,00, dan belanja tak terduga sebesar Rp6.381.986.327,00. Realisasi belanja menurut jenisnya terinci pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Realisasi Belanja Menurut Jenisnya

No	Uraian	Realisasi (Rp.)
2	Belanja Daerah	2.188.318.745.870,33
2.1	Belanja Operasi	1.871.123.190.030,33
2.2	Belanja Modal	310.813.569.513,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.381.986.327,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023, *unaudited*

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah mencapai **Rp477.018.940.984,57** terdiri atas: penerimaan pembiayaan sebesar Rp484.293.940.984,57; dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.275.000.000,00. Realisasi pembiayaan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya

No	Uraian	Realisasi (Rp.)
3	Pembiayaan Daerah	477.018.940.984,57
3.1	Penerimaan Pembiayaan	484.293.940.984,57
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.275.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023, *unaudited*



PEMERINTAH
KOTA MALANG

Bab II

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
WALIKOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2022



>>> Bab II **Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, **perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2022 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai** dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2022 maupun Perubahan RKPD 2022 fokus untuk pemulihan ekonomi dampak Pandemi COVID-19 melalui aktivasi infrastruktur yang telah dibangun antara lain Malang Creative Center dan Kawasan Kayutangan Heritage **serta peningkatan perlindungan sosial** kepada masyarakat terdampak melalui perluasan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan non tunai kepada masyarakat miskin dan rentan. **Selain itu penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan yang terjadi mulai bulan Mei 2022** menjadi salah satu perhatian Pemerintah. Isu strategis secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Isu Strategis Prioritas Pembangunan
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022

No	Isu Strategis Perubahan
1	<p>a. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi kreatif dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0;</p> <p>b. Pemulihan ekonomi berbasis penguatan daya saing kerakyatan melalui revitalisasi pasar terutama dalam menghadapi dampak <i>Covid-19</i>;</p> <p>c. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan</p>
2	<p>a. Optimalisasi upaya peningkatan SDM terdidik, berkarakter dan berbudaya dalam menghadapi era digital;</p> <p>b. Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan di seluruh wilayah perlu ditingkatkan;</p> <p>c. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama jaminan pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan;</p> <p>e. Peningkatan kualitas komitmen pengarusutamaan gender;</p> <p>f. Peningkatan ketersediaan bahan pangan</p> <p>g. Penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak dari pandemi <i>Covid-19</i>;</p> <p>h. Kebijakan penanganan wabah penyakit hewan yang cepat, tepat, tanggap dan sesuai standar yang ditetapkan.</p>
3	<p>a. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;</p> <p>b. Penguatan wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial.</p>
4	<p>a. Peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi terutama dalam penanganan kemacetan;</p> <p>b. Optimalisasi sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan;</p> <p>c. Penataan bangunan dan lingkungan;</p> <p>d. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing.</p>
5	<p>a. Optimalisasi keselarasan antara penyelenggaraan pembangunan dengan kualitas lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;</p> <p>b. Peran serta masyarakat dalam mitigasi Perubahan Iklim;</p> <p>c. Peran serta masyarakat dalam mempercepat pemulihan bencana alam dan non-alam.</p>

No	Isu Strategis Perubahan
6	a. Profesionalisme aparatur pemerintahan dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan inovatif; b. Penyederhanaan birokrasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan dan integrasi sistem; c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja serta Satlinmas; d. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.

Sumber : BAPPEDA Kota Malang, 2022

Berpedoman pada perubahan RKPD 2022, dapat disampaikan bahwa **pada tahun 2022 terdapat 167 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 480 dan 1.316 subkegiatan** yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Perubahan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2022

Program			Kegiatan / Sub Kegiatan		
RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022
167	167	167	476 (1282 Sub Kegiatan)	479 (1309 Sub Kegiatan)	480 (1316 Sub Kegiatan)

Sumber : BAPPEDA Kota Malang, 2022

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. **Pendapatan Daerah** semula Rp2.076.977.264.844,00 berkurang sebesar Rp8.310.981.812,00 sehingga Pendapatan Daerah menjadi Rp2.068.666.283.032,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah** semula sebesar Rp752.795.828.609,00 berkurang sebesar Rp34.767.225.129,00 sehingga menjadi Rp718.028.603.480,00 meliputi:

- 1) **Pajak Daerah** semula Rp606.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp566.000.000.000,00;
- 2) **Retribusi Daerah** semula Rp52.898.685.400,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp53.898.685.400,00;
- 3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp28.891.896.459,00;
- 4) **Lain-lain PAD yang sah** semula Rp65.005.246.750,00 bertambah sebesar Rp4.232.774.871,00 sehingga menjadi Rp69.238.021.621,00.

b. **Pendapatan Transfer** semula Rp1.220.864.636.235,00 bertambah sebesar Rp125.948.043.317,00 sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan adalah sebesar Rp1.346.812.679.552,00 meliputi:

- 1) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** semula Rp1.084.306.242.000,00 bertambah sebesar Rp115.241.645.317,00 sehingga menjadi Rp1.199.547.887.317,00;
- 2) **Pendapatan Transfer Antar Daerah** semula Rp136.558.394.235,00 bertambah sebesar Rp10.706.398.000,00 sehingga menjadi Rp147.264.792.235,00;

Setelah ditetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, **Pemerintah Kota Malang mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi** sebesar Rp164.800.000,00 untuk urusan di bidang Pendidikan.

2. **Belanja Daerah** semula Rp2.219.287.390.137,00 bertambah sebesar Rp326.397.833.880,00 sehingga **Belanja Daerah** menjadi Rp2.545.685.224.017,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi** semula Rp1.886.929.668.137,00 bertambah sebesar Rp192.823.500.063,00 sehingga menjadi Rp2.079.753.168.200,00 meliputi:

- 1) **Belanja Pegawai** semula Rp873.560.912.618,00 bertambah sebesar Rp26.988.357.969,00 sehingga menjadi Rp900.549.270.587,00;
- 2) **Belanja Barang dan Jasa** semula Rp900.549.270.587,00 bertambah sebesar Rp166.286.666.094,00 sehingga menjadi Rp1.062.971.269.613,00;
- 3) **Belanja Hibah** semula Rp104.809.112.000,00 berkurang sebesar Rp1.362.064.000,00 sehingga menjadi Rp103.447.048.000,00;
- 4) **Belanja Bantuan Sosial** semula Rp11.875.040.000,00 bertambah sebesar Rp. 910.540.000,00 sehingga menjadi Rp12.785.580.000,00.

b. **Belanja Modal** semula Rp246.898.322.829,00 bertambah sebesar Rp179.869.712.850,00 sehingga menjadi Rp426.768.035.679,00 meliputi:

- 1) **Belanja Modal Tanah** semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp30.738.667.456,00 sehingga menjadi Rp30.738.667.456,00;
- 2) **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** semula Rp46.384.312.679,00 bertambah sebesar Rp80.896.586.776,00 sehingga menjadi Rp127.280.899.455,00;

- 3) **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** semula Rp122.111.752.882,00 berkurang sebesar Rp6.730.428.940,00 sehingga menjadi Rp115.381.323.942,00;
 - 4) **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi** semula Rp77.097.059.320,00 bertambah sebesar Rp73.617.359.561,00 sehingga menjadi Rp150.714.418.881,00;
 - 5) **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** semula Rp1.305.197.948,00 bertambah sebesar Rp1.347.527.997,00 sehingga menjadi Rp2.652.725.945,00.
- c. **Belanja Tidak Terduga** semula Rp85.459.399.171,00 berkurang sebesar Rp46.295.379.033,00 sehingga menjadi Rp39.164.020.138,00.
3. **Pembiayaan Daerah** semula Rp142.310.125.293,00 bertambah sebesar Rp334.708.815.692,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp477.018.940.985,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. **Penerimaan Pembiayaan** semula Rp149.585.125.293,00 bertambah sebesar Rp334.708.815.692,00 sehingga menjadi Rp484.293.940.985,00;
 - b. **Pengeluaran Pembiayaan** tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp7.275.000.000,00.

Tabel 2.3
Penjabaran Perubahan APBD Kota Malang
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.076.977.264.844	2.068.666.283.032	(8.310.981.812)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	752.795.828.609	718.028.603.480	(34.767.225.129)
4.1.01	Pajak Daerah	606.000.000.000	566.000.000.000	(40.000.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	52.898.685.400	53.898.685.400	1.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.891.896.459	28.891.896.459	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.005.246.750	69.238.021.621	4.232.774.871
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.220.864.636.235	1.346.812.679.552	125.948.043.317
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.084.306.242.000	1.199.547.887.317	115.241.645.317
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.558.394.235	147.264.792.235	10.706.398.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.316.800.000	3.825.000.000	(99.491.800.000)
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	3.825.000.000	3.825.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	103.316.800.000	0	(103.316.800.000)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.886.929.668.137	2.079.753.168.200	192.823.500.063
5.1.01	Belanja Pegawai	873.560.912.618	900.549.270.587	26.988.357.969
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.684.603.519	1.062.971.269.613	166.286.666.094
5.1.05	Belanja Hibah	104.809.112.000	103.447.048.000	(1.362.064.000)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.875.040.000	12.785.580.000	910.540.000
5.2	BELANJA MODAL	246.898.322.829	426.768.035.679	179.869.712.850
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	30.738.667.456	30.738.667.456
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.384.312.679	127.280.899.455	80.896.586.776
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.111.752.882	115.381.323.942	(6.730.428.940)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.097.059.320	150.714.418.881	73.617.359.561
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.305.197.948	2.652.725.945	1.347.527.997
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	85.459.399.171	39.164.020.138	(46.295.379.033)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	85.459.399.171	39.164.020.138	(46.295.379.033)
	Jumlah Belanja	2.219.287.390.137	2.545.685.224.017	326.397.833.880
	Total Surplus/(Defisit)	(142.310.125.293)	(477.018.940.985)	(334.708.815.692)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	149.585.125.293	484.293.940.985	334.708.815.692
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.585.125.293	484.293.940.985	334.708.815.692
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	149.585.125.293	484.293.940.985	334.708.815.692
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.275.000.000	7.275.000.000	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.275.000.000	7.275.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.275.000.000	7.275.000.000	0
	Pembiayaan Netto	142.310.125.293	477.018.940.985	334.708.815.692
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0



Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah



LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022



»» Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan.

Tujuan 2: Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif;
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan

infrastruktur dan sarana dan prasarana kota secara terpadu; dan

3. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

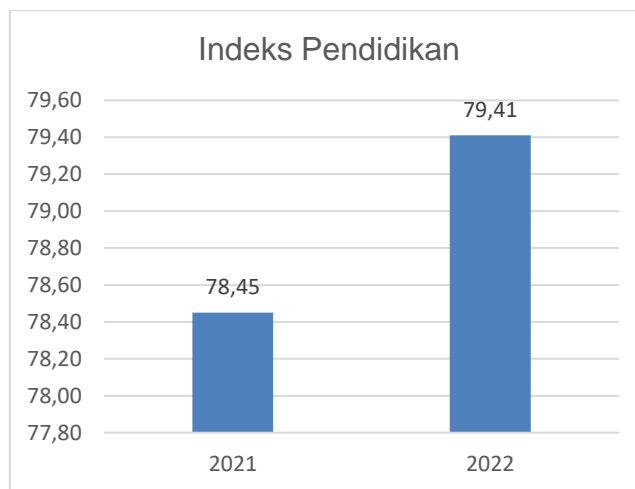
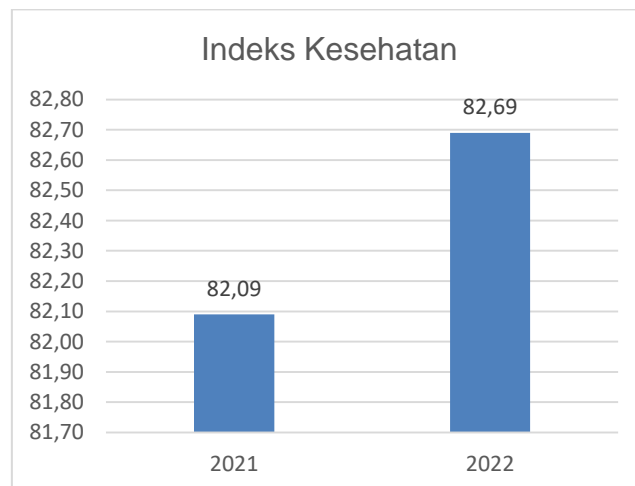
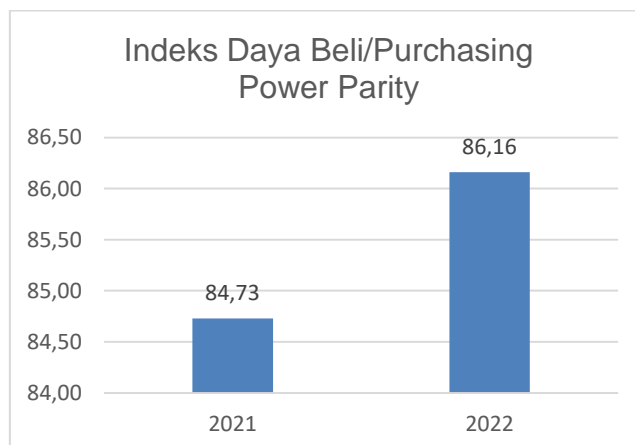
Tujuan 3: Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

Tujuan 4: Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
2. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, yang mencakup nilai SAKIP, opini BPK, maturitas SPIP, dan rasio PAD;
3. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN; dan
4. Meningkatnya integrasi teknologi Informasi.

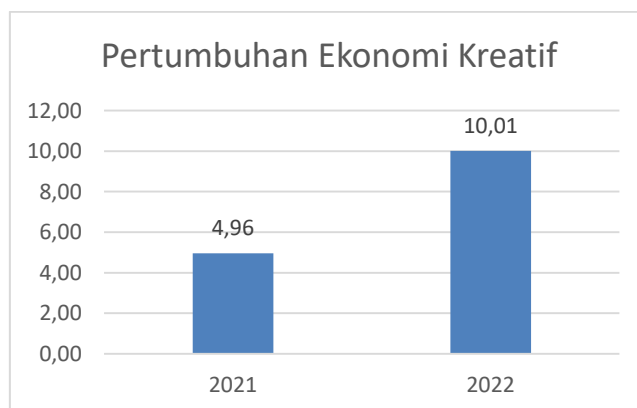
Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja daerah, pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Malang mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1.**Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2021-2022****Gambar 3.2.****Realisasi Indeks Kesehatan Tahun 2021-2022****Gambar 3.3.****Realisasi Indeks Daya Beli Tahun 2021-2022**

Dari gambar diatas, indikator sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter yaitu indeks pendidikan, indikator sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan yaitu indeks kesehatan, dan indikator sasaran meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan yaitu indeks daya beli meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kota Malang dalam rangka terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya telah berhasil.

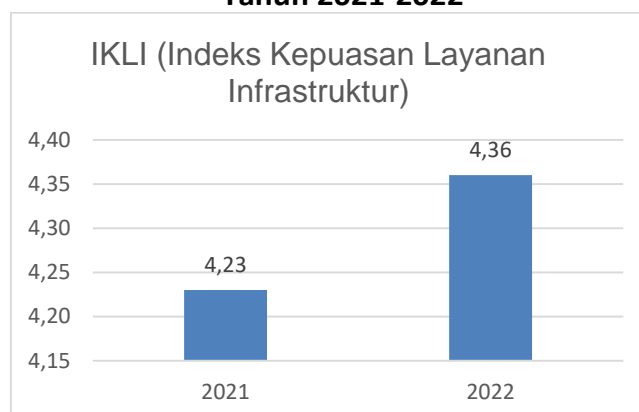
Gambar 3.4.

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2022



Gambar 3.5.

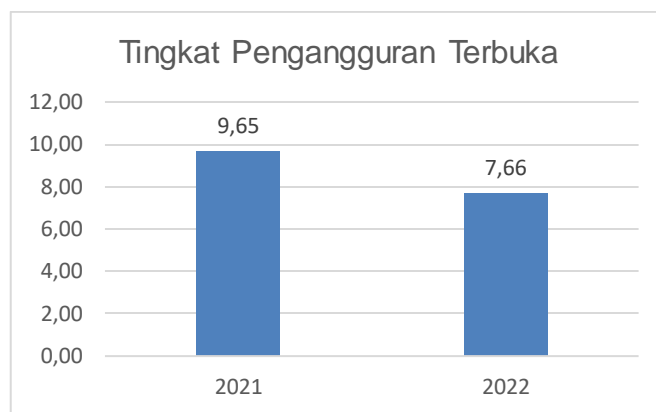
Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2021-2022



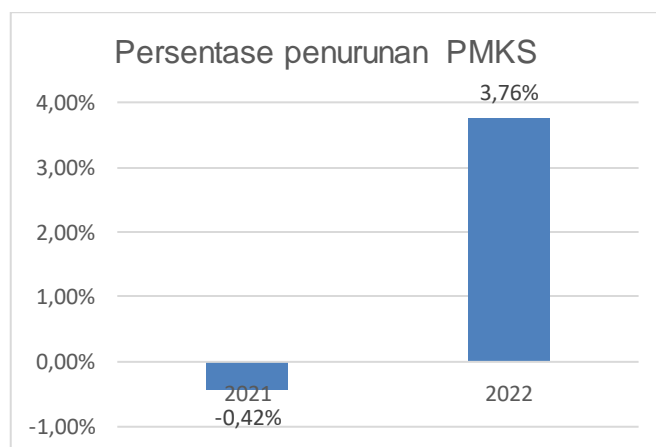
Dari gambar diatas, indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu pertumbuhan ekonomi kreatif naik sangat signifikan dari 4,96% tahun 2021 menjadi 10,01% pada

tahun 2022, sedangkan indikator sasaran Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu yaitu Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur juga mengalami peningkatan di tahun 2022. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas infrastruktur pada Tahun 2022 telah berhasil dengan baik.

Gambar 3.6.
Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2021-2022



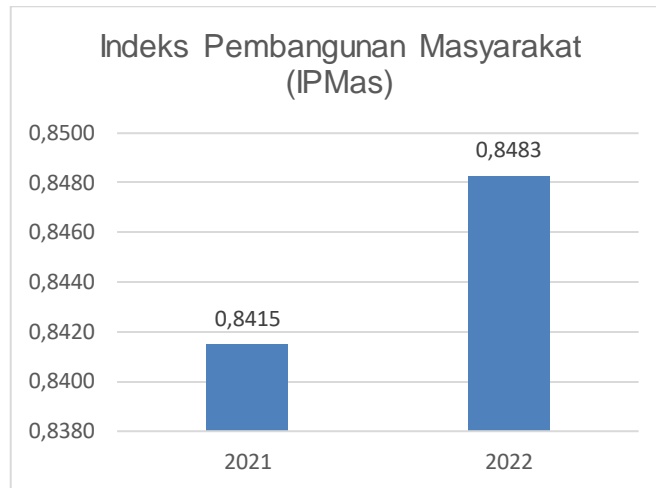
Gambar 3.7.
Realisasi Persentase penurunan PMKS
Tahun 2021-2022



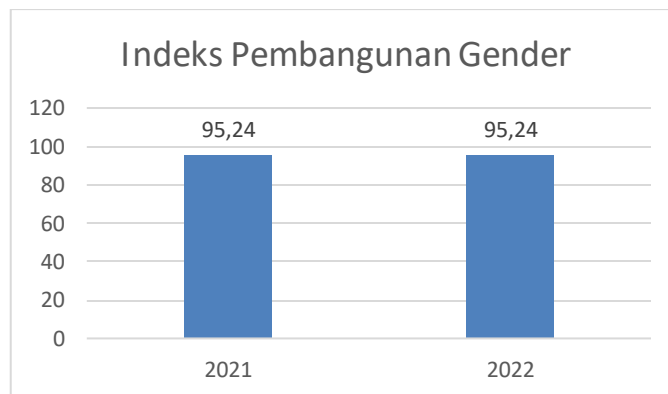
Dari gambar diatas, kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat signifikan yang tahun 2021 sebesar 9,65 menjadi 7,66. Begitu juga dengan kinerja indikator persentase penurunan PMKS yang berhasil dengan baik naik dari angka -0,42%

menjadi 3,76%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan upaya menangani PMKS.

Gambar 3.8.
Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat
Tahun 2021-2022

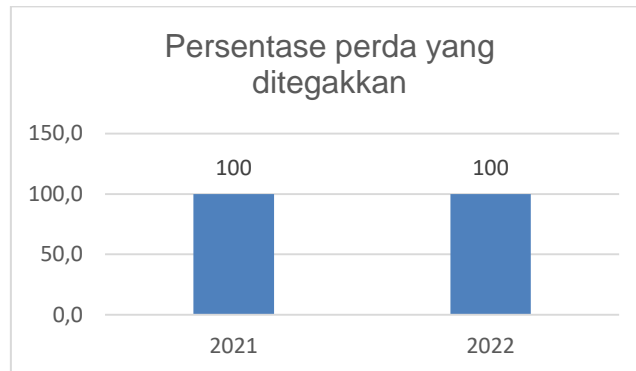


Gambar 3.9.
Realisasi Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2021-2022

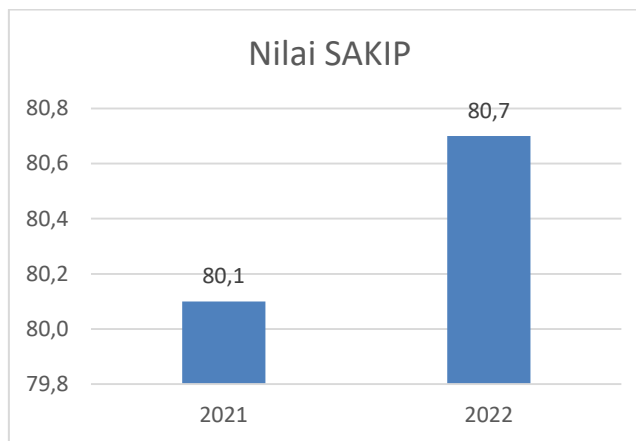


Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat sebesar 0,8483 meningkat dari Tahun 2021 yang sebesar 0,8415. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 masih sebesar 95,24 menyesuaikan dengan tahun 2021. Capaian ini melalui dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (di 57 Kelurahan).

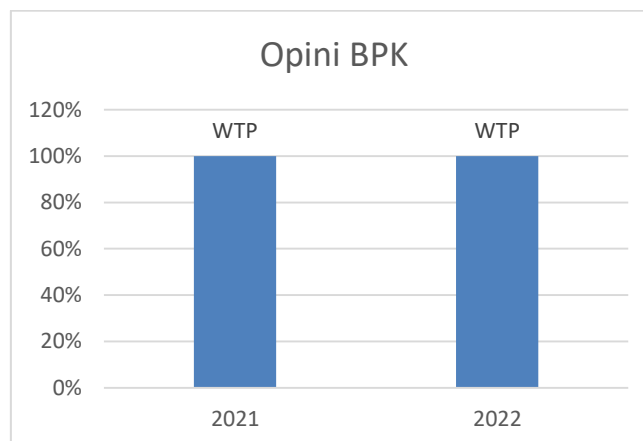
Gambar 3.10.
Realisasi Persentase Perda yang ditegakkan
Tahun 2021-2022



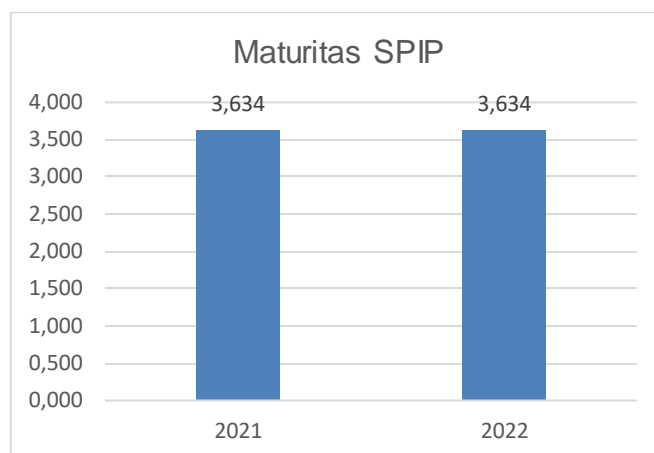
Gambar 3.11.
Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021-2022



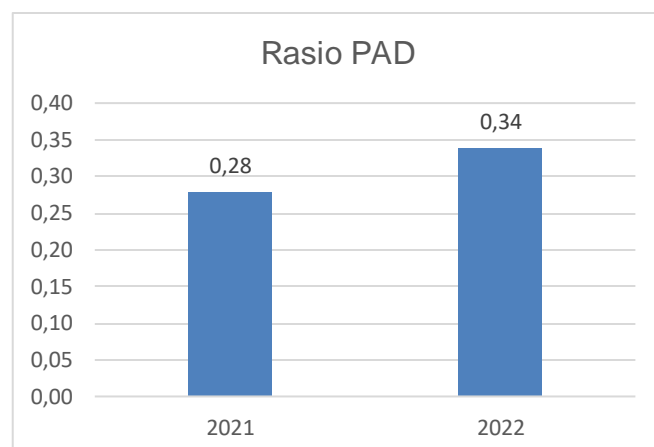
Gambar 3.12.
Realisasi Opini BPK Tahun 2021-2022



Gambar 3.13.
Maturitas SPIP Tahun 2021-2022



Gambar 3.14.
Rasio PAD Tahun 2021-2022



Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dilihat melalui progress peningkatan indikator Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Rasio PAD. Kota Malang berhasil mempertahankan nilai SAKIP A dengan nilai 80,7 dan predikat WTP 11 kali berturut-turut. Maturitas SPIP juga berhasil dipertahankan pada level 3 dengan nilai 3,634. sedangkan rasio PAD meningkat sangat baik di tahun 2022 sebesar 0,34 dari tahun 2021 senilai 0,28.

Gambar 3.15.
Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021-2022



Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dapat dilihat dengan peningkatan indikator Indeks Profesionalisme ASN, di mana tahun 2022 tercapai sebesar 76,32 dari tahun 2021 sebesar 74,68.

Adapun capaian atas kinerja Kota Malang pada tahun 2022 memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,32% dan peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 82,71. Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2022 yang meningkat dibanding tahun 2021 merupakan hasil dukungan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dituangkan dalam tabel-tabel yang berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, dan urusan pemerintahan daerah lainnya.

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2022 menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2022 menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan. Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2022 menyelenggarakan urusan pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian. Pelaksanaan urusan pilihan tersebut secara riil disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Selain urusan pemerintahan tersebut diatas, juga disajikan pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Umum Lainnya sebagaimana terlampir.

3.2 Kebijakan Strategis yang Diterapkan

Tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2022, ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang berdampak.

Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 dan berbagai masalah yang dihadapi. Dalam kerangka itu Walikota Malang telah mengambil inisiatif untuk mempercepat atau menindaklanjuti permasalahan melalui kebijakan-kebijakan strategis selama tahun 2022 berupa penerbitan peraturan walikota, keputusan walikota, surat edaran dan/atau tindakan strategis.

Pada tahun 2022 telah diterbitkan sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) keputusan walikota antara lain berkaitan dengan pembentukan tim/forum/gugus tugas, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pencabutan keputusan walikota dan perubahan keputusan walikota yang sudah tidak sesuai.

Sedangkan peraturan walikota yang ditetapkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) peraturan walikota antara lain berkaitan dengan penjabaran APBD, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, satu data, kelembagaan, penganggaran, pendelegasian kewenangan serta tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Adapun peraturan daerah yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) peraturan daerah yang antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan, penyelenggaraan reklame, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Perubahan APBD tahun anggaran 2022, pengelolaan keuangan daerah dan rencana tata ruang wilayah kota malang tahun 2022-2042 dan APBD tahun anggaran 2023.

Berikut disampaikan kebijakan strategis walikota sebagai tindak lanjut dari isu strategis serta tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan terutama sebagai upaya pemulihan ekonomi, penataan kota, pelayanan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Tabel 3.1
Kebijakan Strategis Yang Diterapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
1.	Penetapan RTRW Kota Malang Tahun 2022-2042	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan terbaru
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Dana BOSDA untuk SD Negeri dan SMP Negeri; - Pemberian Dana Hibah untuk SD dan SMP Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu; - Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasional Satuan Pendidikan Negeri; - Meringankan beban biaya operasional Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan; - Meningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan.
3.	Pembangunan dan aktivasi Gedung Malang Creative Center	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang
4.	Pembangunan dan aktivasi Koridor Kayutangan Heritage	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Mendorong program pengembangan ekonomi kreatif sebagai dukungan terhadap penataan kawasan kayutangan heritage

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
5.	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah meliputi jalan, jembatan, pasar dan kesehatan.	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi lokal dan kesehatan masyarakat.
6.	Penetapan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi Pusat dan instansi Daerah
7.	Penetapan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil	Peningkatan kinerja birokrasi yang profesional melalui pengembangan dan penempatan talenta yang transparan, terukur dan berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tinggi sesuai kebutuhan daerah
8.	Menumbuhkan ekonomi kreatif dan destinasi wisata baru di kawasan selatan kota melalui pembangunan gantangan burung di lahan eks TPA Lowokdoro	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan barang milik daerah yang idle
9.	Pendelegasian kewenangan perijinan berusaha dan non perijinan dari Walikota Malang kepada Kepala Disnaker PMPTSP	Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyederhanaan birokrasi dan percepatan pelayanan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
10.	Penyusunan Rencana Pemerintah Daerah tahun 2024-2026	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru	Untuk memberikan pedoman perencanaan bagi kepala daerah di masa transisi
11.	Menambah prosentase luasan RTH publik melalui pembangunan RTH Balarjosari dan Taman Kyai Malik di Kedungkandang	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.	Peningkatan kualitas lingkungan serta penambahan sarana rekreasi / ruang publik baru.
12.	Penanganan korban tragedi kanjuruhan	Misi Walikota Malang Nomor 1 Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.	Penanganan bencana sosial
13.	Menerapkan Uji Kompetensi Daerah (UKD) sebagai standar penilaian pengganti nilai kelulusan karena Implementasi kurikulum merdeka belajar yang meniadakan Ujian Nasional	Misi Walikota Malang Nomor 1 Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.	Apresiasi terhadap siswa yang berprestasi secara akademik
14.	Pemberian bantuan sembako murah dalam bentuk operasi pasar dan pemberian bantuan uang tunai kepada pengemudi ojek (pangkalan dan online)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2022	Penanganan inflasi sebagai dampak kenaikan BBM

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
15.	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik dengan menyatukan seluruh layanan serta pemanfaatan barang milik daerah
16.	Percepatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Aplikasi <i>SiApel</i> dan penguatan inovasi <i>Jemput Bola Administrasi Kependudukan</i> (JEMBOL Adminduk)	Misi Walikota Nomor 4 Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Kemudahan masyarakat Kota Malang dalam mengurus dokumen kependudukan
17.	Penguatan dan percepatan tugas dan fungsi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 dan Misi Walikota Malang Nomor 4	Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok.
18.	E-JKN Cekat (Cepat, Efektif, Akurat dan Terpadu) adalah aplikasi layanan kepersertaan BPJS Kesehatan bagi warga Kota Malang	Misi Walikota Malang Nomor 1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga	Pelayanan warga Kota Malang yang mengajukan dan menonaktifkan kepersertaan BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang (Peserta PBI Daerah).
19.	Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan program penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2021

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
A.	BIDANG PEMERINTAHAN		
1.	<p>Mencermati berbagai capaian kinerja dalam LKPJ Walikota tahun anggaran 2021 dari 12 sasaran strategis sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dan sasaran terdapat 5 sasaran yang mencapai target, yaitu: (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan, dan Indeks Profesionalitas ASN), adapun 7 sasaran strategis yang belum mencapai target, meliputi: (Indeks Daya Beli, Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, IKLHD, TPT dan % Penurunan PMKS, IPMas & IPG, Nilai SAKIP dan Indeks Kematangan SPBE). Terkait dengan 7 sasaran yang belum tercapai, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai program sebagai berikut:</p>		
	<p>a. Mendorong program pemerataan jaring pengaman sosial yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk terus dilaksanakan dan sedapat mungkin ditingkatkan sasarannya dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat;</p>	<p>Pelaksanaan program pemerataan jaring pengaman social pada tahun 2022 dalam bentuk melakukan verifikasi kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk dapat diintervensi program kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun</p>	<p>validasi data <i>by name by address dan by needs</i> sasaran intervensi program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pengentasan</p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
			kemiskinan
	b. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota didorong untuk menyediakan sarana prasarana kegiatan ekonomi kreatif dengan mengalokasikan belanja modal yang memadai;	Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Malang melaksanakan pengadaan sarana prasarana pendukung dan aktivasi Malang Creative Center berupa 69 paket belanja modal dan sebanyak 60 kegiatan/event	
	c. Melakukan inovasi program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga IKLHD Kota Malang bisa berada pada rentang nilai cukup (66 – 74);	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman pohon-pohon trembesi dan glodogan (<i>Polyalthea longifolia</i>) di pinggir jalan atau disekitaran rumah toko antara lain di jalur hijau wilayah Kota Malang sebanyak 3001 pohon - Optimalisasi fungsi ekologis RTH eksisting serta mengembangkan kawasan hijau dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun antara lain RTH Balarjosari dan Taman Kiai Malik di bawah Jembatan Kedungkandang; - Pemantauan rutin kualitas air sungai dan udara secara berkala setiap Tahun 2 kali pada 27 titik pantau (sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SK Walikota Malang) serta mengefektifkan penggunaan alat ukur kualitas udara yang sudah ada yaitu 1 (satu) buah AQMS (Air Quality Monitoring System) yang terpasang di Kantor DLH Kota Malang Jl. Bingkil No. 1 Malang. 	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup
	d. Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) disamping melaksanakan kegiatan <i>Job Fair Active</i> dan Bursa Kerja khusus perlu didorong kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, realisasi <i>co-working</i>	Gedung Malang <i>Creative Center</i> (MCC) yang telah selesai dibangun pada tahun 2022 telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pengembangan ekonomi kreatif, sebagai <i>Co-Working</i>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	<p><i>space</i>, pelatihan industri digital dan UMKM serta memperbanyak evenkomunitas;</p>	<p><i>Space</i>, tempat pelatihan industri digital dan even-even ekonomi kreatif sebanyak 60 kali</p>	
	<p>e. Untuk meningkatkan capaian target IPMas dan PG terus mendorong program-program sosial kemasyarakatan khusus untuk mendukung terwujudnya penguatan gotong royong, toleransi dan aman serta melakukan kerjasama dengan berbagai <i>Stakeholders</i> untuk meningkatkan capaian IPG di tahun-tahun mendatang;</p>	<p>Program sosial kemasyarakatan yang mendukung terwujudnya penguatan gotong royong pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 12 kali/bulan dalam bentuk pembinaan, pendampingan dan penguatan terhadap Lembaga Sosial, Lembaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga Harapan (PKH), Pedamping Disabilitas, Lansia dll</p>	
	<p>f. Meningkatkan kinerja, utamanya terus melakukan penyederhanaan birokrasi, inovasi pelayanan publik, manajemen SDM dan Pengawasan serta Review berbagai peraturan atau kebijakan yang berpotensi menghambat investasi, sehingga dapat mempertahankan Katagori A dengan capaian nilai SAKIP melampaui target IKU (82,05);</p>	<p>Peningkatan inovasi pelayanan publik melalui MPP (Mall Pelayanan Terpadu) serta hasil evaluasi SAKIP oleh KEMENPAN RB pada tahun 2021 memperoleh nilai 80,10 dengan kategori A.</p>	
	<p>g. Menekankan agar Pemerintah Kota Malang untuk mempercepat penerapan SPBE sesuai Perpres 95 tahun 2018 sehingga dapat mencapai target IKU sekaligus memperoleh predikat sangat baik (3,5 - 4,2).</p>	<p>Berdasarkan Keputusan MENPAN RB Nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Daerah, tahun 2022 Kota Malang memperoleh nilai 2,60 dengan predikat baik dan untuk peningkatan penerapan SPBE Kementerian PAN-RB akan melaksanakan kegiatan pendampingan di tahun 2023.</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
2.	<p>Agar tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah terkait dengan Jabatan Tinggi Pratama (eselon II) yang kosong, meliputi Dispangtan, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Dinas Naker PMPTSP, Satpol PP, Inspektorat Daerah, Asisten Perekonomian Setda, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi & Keuangan serta Staf Ahli Bidang Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat, DPRD mendesak Pemkot untuk segera melakukan pengisian jabatan JPT Pratama utamanya yang dijabat PIt lebih dari 6 (enam) bulan sesuai ketentuan SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019.</p> <p>Memperhatikan aturan tersebut sudah sangat jelas bahwa Pemerintah Kota Malang mengabaikan Surat Edaran Kepala BKN. Disamping jabatan tinggi pratama tersebut diatas masih banyak kekosongan jabatan di eselon 3 dan 4 serta staf yang harus segera diisi.</p>	<p>Pengisian seluruh jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan melalui seleksi terbuka pada tahun 2022. Pengisian jabatan administrasi dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme promosi dan mutasi antar Perangkat Daerah. Tahun 2022 melaksanakan 4 kali pelantikan jabatan struktural, yaitu tanggal 24 Mei 2022, 21 Juli 2022, 28 September 2022 dan 2 Desember 2022. Pengisian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dilaksanakan melalui penerimaan CASN (CPNS dan PPPK) sebanyak 1259 orang, mutasi antar Perangkat Daerah dan mutasi masuk dari instansi luar Pemerintah Kota Malang sebanyak 4 orang.</p>	
3.	<p>Pemerintah Kota Malang agar terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maksimal dan produktif dalam upaya melakukan pelayanan sehingga terwujud layanan publik dengan derajat paripurna.</p>	<p>Peningkatan layanan kepada masyarakat melalui penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	
4.	<p>Dalam upaya peningkatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dalam tahun 2021 indikator kematangan SPBE tidak mencapai target, DPRD mendorong Pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan kesiapan domain kebijakan internal (SPBE) yakni segera melakukan review</p>	<p>Reviu Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2022 telah sampai pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	<p>Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan SPBE, menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam SPBE dan segera menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang SPBE serta menyiapkan domain layanan SPBE yakni melanjutkan pengintegrasian aplikasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah ke dalam satu aplikasi tunggal yang belum tuntas dilaksanakan pada tahun 2021.</p>	<p>Jawa Timur.</p> <p>Untuk penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang.</p> <p>Penerapan Sertifikat Elektronik dalam SPBE telah sampai pada tahap Draf Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.</p> <p>Pengintegrasian aplikasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah telah terlaksana untuk layanan bidang perpajakan, bidang pengawasan dan bidang aset daerah melalui interoperabilitas data dengan sistem API (<i>application programming interface</i>).</p>	
5.	<p>Terkait dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang pada tahun 2021 telah dilakukan <i>soft launching</i>, DPRD mendorong Pemerintah Kota mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan <i>grand launching</i> dan menekankan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan evaluasi dan terus menyempurnakan integrasi data dan sistem informasi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelarasan Sistem Operasional Prosedur; - Penyelarasan Standar Pelayanan; - Pemanfaatan Data Tunggal; - Penguatan Pelayanan berbasis teknologi informasi (<i>e-service</i>). <p>b. Memastikan bahwa seluruh Instansi mitra yang bergabung yang dalam MPP untuk memenuhi komitmen penanda tanganan kerja sama (PKS), yakni perihal mekanisme kerja,</p>	<p>Peresmian/<i>Grand Opening</i> Mal Pelayanan Publik (MPP) “Merdeka” Kota Malang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 oleh Wakil Presiden RI dan Menteri PAN-RB di Istana Wakil Presiden Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan integrasi data pelayanan dan sistem informasi MPP dilaksanakan melalui pengembangan MPP Digital pada tahun 2023; - Komitmen seluruh instansi mitra terkait mekanisme kerja waktu pelayanan dan proses bisnis MPP diintegrasikan melalui pembangunan MPP Digital, sampai dengan akhir tahun 2022 instansi mitra telah bergabung ke dalam 26 tenant dengan 185 jenis layanan <p>Sesuai arahan dan masukan Deputy Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB akan dilaksanakan pembangunan</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	<p>waktu pelayanan dan proses bisnis MPP.</p> <p>Memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi hasil peninjauan penyelenggaraan MPP Kota Malang dari Tim Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB tanggal 4 April 2022.</p>	<p>Tahap 3 MPP “Merdeka” pada tahun anggaran 2023 antara lain: penambahan <i>tenant</i> layanan publik dan sarana prasana pendukung pelayanan, khususnya berupa fasilitas <i>lift</i> bagi warga disabilitas dan kaum rentan.</p>	
6.	<p>Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Malang menerima Anugerah Meritokrasi 2021 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas keberhasilannya menerapkan sitem merit dalam manajemen ASN dengan predikat katagori III BAIK. Sesuai ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang, Manajemen PNS, juncto PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dinyatakan bagi Pemda yang meraih katagori BAIK diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool dengan persyaratan tertentu, namun karena Pemkot Malang belum menerapkan talent pool / manajemen talenta kesempatan ini belum bisa dimanfaatkan. DPRD mendorong Pemkot untuk segera menerapkan manajemen talenta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai upaya penerapan <i>talent pool</i>/manajemen talenta, telah diterbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil; - Sebagai salah satu dasar penyusunan <i>talent pool</i>/manajemen talenta pada tahun 2022 telah dilaksanakan <i>assesmen</i> bagi Pejabat Administrator sebanyak 70 orang, Pejabat Pengawas 57 orang, Pejabat Fungsional 63 orang dan Pelaksana 156 orang. 	
7.	<p>Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sangat strategis dalam rangka ikut menjamin ditaatinya setiap peraturan daerah, khususnya dalam tahap penyidikan untuk mengungkap pelanggaran Peraturan Daerah. Kondisi saat ini Satpol PP Kota Malang hanya memiliki 5 (lima) orang yang sebagian akan memasuki purna tugas dan dihadapkan dengan terus meningkatnya eskalasi pelanggaran Peraturan Daerah, DPRD mendesak Pemkot untuk segera melakukan rekrutmen atau pengadaan PPNS agar penegakan Peraturan Daerah</p>	<p>Untuk rekrutmen atau pengadaan PPNS Pemerintah Kota Malang melalui Satpol PP setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran diklat PPNS untuk 3 orang sampai dengan 5 orang Personil Satpol PP yang keikutsertaannya harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	dapat lebih optimal.		
8.	Terkait dengan IKU tahun 2021 penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan sasaran terwujudnya Kecamatan yang profesional dan akuntabel, secara umum target tidak tercapai, dimana untuk nilai SAKIP tercapai 40%, IPMas tercapai 40% dan IKLI (Prasarana Sarana Publik) tercapai 60%. DPRD mendesak Pemkot terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Kecamatan yang profesional dan akuntabel.	Untuk mewujudkan Kecamatan yang profesional dan akuntabel langkah-langkah yang dilakukan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan sebanyak 8 kegiatan yang meliputi kependudukan, ahli waris, kebencanaan, pertanahan, sosial politik dan kepemiluan.	
9.	<p>Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah utamanya dalam melaksanakan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, DPRD mendorong Pemkot dalam hal ini Bagian Hukum Setda agar meningkatkan kinerjanya khususnya terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian atau Review beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai amanat UU Cipta Kerja dan berbagai Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja; b. Percepatan penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang belum terselesaikan pada tahun 2021; c. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah yang telah sesuai dengan amanat Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sedangkan Ranperda yang masih dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi baik di Kementerian maupun Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung dan Ranperda tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Pada tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 7 Perwal yang diusulkan sejak tahun 2021 dan 4 Perda; c. Penyusunan peraturan daerah selalu mempertimbangkan skala prioritas dan berkoordinasi dengan Bapemperda selaku alat kelengkapan DPRD. 	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
B.	BIDANG EKONOMI		
1.	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2021 mencapai 603 M dari target 614 M atau setara dengan 98%. Namun perlu dicatat bahwa PAD Kota Malang hanya menyumbangkan 28% dari total pendapatan dalam APBD. Sektor pajak daerah yang tercapai sebesar 430 M dari target penerimaan pajak yang sebesar 462 M dengan persentase 93%. Dari 9 jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ada 3 jenis pajak: daerah yang pencapaiannya masih rendah yaitu pajak hotel 52,57% pajak reklame 72,62 % dan pajak parkir 85.28 % Untuk kedepannya, kami mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat menganalisa potensi pajak yang lain terutama pajak dan retribusi parkir yang masih bisa digali lebih dalam lagi. Selain itu, perlunya inovasi dan strategi dalam pemenuhan target pajak juga perlu untuk terus dilakukan agar kemandirian keuangan daerah dapat diwujudkan.</p>	<p>Untuk menganalisa potensi pajak dan retribusi parkir telah dilakukan kajian retribusi parkir secara bertahap dimulai pada tahun 2022 di Kecamatan Kedungkandang dan kecamatan-kecamatan lain di tahun berikutnya. Sedangkan Inovasi dan strategi pemenuhan target pajak pada tahun 2022 antara lain pemasangan alat monitoring elektronik (e-Tax) aplikasi PERSADA bagi para wajib pajak parkir, hotel dan restoran serta mengefektifkan pelaksanaannya melalui pemanfaatan <i>control room (ruang control)</i>. Selain itu melakukan <i>Ghosting Resto</i> yaitu pendataan resto baru yang melalui aplikasi belanja <i>online</i>, menyediakan cara pembayaran pajak daerah melalui <i>open payment</i> menggunakan <i>virtual account</i> dan kode <i>billing</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan transaksi pada Wajib Pajak 2. Tata kelola Penyelenggaraan Reklame 3. Optimalisasi titik-titik Pajak dan Retribusi Parkir 4. Upaya Optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5. Tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
2.	<p>Persentase penurunan piutang pajak daerah tercapai 10,81 dibandingkan dengan target yang ditetapkan 18,7 % di tahun 2021, sehingga masih perlu upaya maksimal agar piutang pajak daerah bisa segera berkurang dan dapat menjadi tambahan PAD bagi Kota Malang.</p>	<p>Melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada wajib pajak yang menunggak tercapai 12% sehingga terjadi kenaikan persentase penurunan piutang pajak daerah sebesar 1,19%.</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
3.	Sertifikasi aset Pemerintah Kota Malang tahun 2021 baru tercapai 290 sertifikat atau 11,6 % dari target 2,500 sertifikat (sesuai MoU antara BKAD dengan BPN Kota Malang). sedangkan pencapaian keseluruhan 1.308 sertifikat dari total aset 8.264 (5,83 %). sehingga BKAD perlu melakukan perencanaan lagi agar target yang telah ditetapkan bersama dengan BPN bisa tercapai 100 % sampai tahun 2023.	Untuk persertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Malang dilaksanakan dengan sistem blok sehingga 1 SHP mewakili beberapa bidang dan juga penempatan personil TPOK BKAD sebanyak 6 orang di Kantor Pertanahan Kota Malang dan hibah peralatan sehingga terdapat peningkatan jumlah penyelesaian sertifikat menjadi 348 SHP untuk 2092 bidang	Pencapaian hasil SHP sesuai dengan target
4.	Pemerintah Kota Malang diminta untuk tidak melakukan pengurangan atas Ruang Terbuka Hijau dan berupaya semaksimal mungkin untuk menambah RTH.	<p>Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mempertahankan luas RTH yang dikelola diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penghijauan berupa penanaman pohon sebanyak 3001 pohon pada tanah-tanah aset Pemerintah Kota Malang di Jalur Hijau; - Mengefektifkan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota; - Penataan posisi pohon dan penggantian pohon akibat pelebaran drainase Pohon tetap dipertahankan dan drainase melingkari pohon; - Penambahan Taman baru dengan konsep Taman tematik yaitu taman ramah anak <i>difable</i> dan ramah lansia RTH Balearjosari dan Taman Kiai Malik di bawah Jembatan Kedungkandang sebanyak 2 taman. 	
5.	Kajian atas pelepasan aset pemerintah yang bukan RTH dan tidak mungkin dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota terutama yang berada pada kawasan perkampungan untuk terus dilakukan.	Pengkajian terhadap pelepasan aset Pemerintah Kota Malang dilakukan mengikuti perkembangan dan dinamika regulasi di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
6.	<p>DPRD Kota Malang sangat menyayangkan gerak lambatnya Pemerintah Kota Malang didalam menangani beberapa proyek bermasalah baik itu Pasar Blimbing, Pasar Gadang dan Pasar Besar sampai sat ini tidak menunjukkan progress yang dapat dibanggakan sehingga pedagang masih menempati tempat yang tidak layak untuk berdagang. DPRD Kota Malang mendorong agar Pemerintah Kota Malang dapat lebih serius lagi dalam menyelesaikan permasalahan ini agar pembangunan ketiga pasar dapat segera terealisasi, dengan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Blimbing, Pemutusan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga; b. Pasar Gadang, Pemutusan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga; c. Pasar Besar, mengikuti kajian hasil uji lab terakhir dari ITS (Rekondisi). 	<p>Terkait permasalahan 3 (tiga) pasar tersebut dapat disampaikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk Pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang adalah menindaklanjuti saran KPK untuk dilakukan reviu terhadap PKS yang telah disepakati masing-masing pihak untuk menentukan bentuk keberlanjutan atau pemutusan PKS dengan memperhitungkan dampak kerugian pada Pihak Pemerintah Kota Malang maupun Pihak Ketiga, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sedangkan untuk Pasar Besar Malang: setelah berkonsultasi dan mendapatkan pandangan serta pertimbangan secara langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi selanjutnya Pemerintah Kota Malang dan PT. Matahari Putra Prima bersepakat melakukan Perjanjian Pengakhiran Kerja Sama dengan Nomor Pemerintah Kota Malang : 415.4/07/35.73.111/2023 dan Nomor PT. Matahari Putra Prima, Tbk : 003/PSM/MPPA-PKM/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.</p>	<p>Pemerintah Kota Malang dapat segera melakukan pembangunan kembali Pasar Besar Malang baik melalui skema penganggaran APBD maupun APBN dalam rangka percepatan pergerakan ekonomi daerah.</p>
7.	<p>Peran dan fungsi bagian perekonomian dalam mendukung pembinaan BUMD masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam membantu BUMD dalam membuat SOP dan</p>	<p>Saat ini, SOP untuk 3 BUMD telah disusun dan dilakukan penyesuaian setiap tahun, Pemerintah Kota Malang melalui Bagian PISDA Sekretariat Daerah Kota Malang</p>	<p>1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate</i></p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	menjembatani kepentingan BUMD dengan KPM.	telah melakukan pendampingan terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), rapat-rapat koordinasi maupun evaluasi dengan 3 BUMD secara rutin setiap 3 bulan sekali untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada dan mencari solusi untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam bentuk Nota Dinas sebanyak masing-masing 4 laporan.	<p><i>Governance/GCG</i>) pada BUMD</p> <p>2. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah No. 032/1865/keuda tanggal 9 Maret 2021 perihal Penegasan Tata Naskah Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah.</p> <p>3.</p>
8.	Beberapa posisi strategis yang masih kosong di BPR Tugu Arta dan PDAM seharusnya menjadi permasalahan serius yang harus dicarikan solusinya oleh Bagian Perekonomian.	Seleksi Direksi dan komisaris pada PT. BPR Tugu Artha perseroda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Direksi, komisaris dan Dewan Pengawas terpilih telah dilantik pada tanggal 26 Desember 2022.	BUMD dapat bekerja optimal dan mencapai target sesuai rencana.
9.	Bagian PISDA harus memperkuat dalam hal kajian kajian strategis sehingga mampu menjadi lembaga <i>think tank</i> dalam tubuh Pemerintahan Kota Malang.	Pemerintah Kota Malang melalui Bagian PISDA Sekretariat Daerah Kota Malang telah melakukan identifikasi permasalahan terkait pengendalian dan distribusi perekonomian, BUMD, BLUD, infrastruktur dan SDA sebanyak 4 kajian	Penyiapan bahan perumusan kebijakan pada urusan Perekonomian Infrastruktur dan SDA

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
10.	<p>Kinerja Perumda Tunas di tahun 2021 masih belum baik karena mengalami kerugian sekitar 400 jutaan yang disebabkan menurunnya pendapatan dari biaya pemotongan hewan yang disebabkan karena tarif pemotongan masih berdasarkan dengan Peraturan Walikota 2015 yang lama ditambah arena meningkatnya beban operasional perusahaan. Hal ini harus menjadi perhatian serius agar Perumda Tunas bisa eksis dan mampu berkontribusi di masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPM pada tanggal 18 April 2022 telah menerbitkan Surat Persetujuan Nomor 500/812/35.73.121/2022 tentang Persetujuan Penerbitan Peraturan Direksi tentang Perubahan Tarif Potong dan Penitipan Hewan; - Perubahan tarif pemotongan dan penitipan hewan diberlakukan secara bertahap sejak Mei 2022 dengan kenaikan saat ini berkisar 13-36,4%. 	<p>Penyesuaian tarif potong dan penitipan hewan sesuai HPP sehingga Perumda Tunas dapat mengurangi beban subsidi pemotongan dan penitipan hewan.</p>
11.	<p>Jajaran direksi dan dewasa yang sudah lengkap di akhir 2021 diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk bisa segera berbenah dan melakukan berbagai perbaikan di semua lini dan mampu menangkap peluang bisnis di tahun selanjutnya.</p>	<p>Jajaran Dewas dan Direksi Perumda Tunas pada Tahun 2022 selain fokus pada pemantapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga berupaya untuk mengembangkan <i>core business</i> yang sudah ada dan memulai unit bisnis baru meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Blitar (Komoditi telur, ayam potong dan cabai), Kabupaten Jember (Cabai Rawit dan Cabai Merah), Kabupaten Banyuwangi (Kedelai), Kabupaten Malang (Beras dan Bawang Merah), Kota Batu (Bawang Merah), Kabupaten Sumenep (Bawang Merah dan Cabai); - <i>Joint Operation</i> Rumah Potong Ayam; - Sentra perkulakan UMKM; - Persewaan <i>Coldstorage</i> evbc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan regulasi sebagai tindak lanjut amanah Perda 5/2020; - Peningkatan volume penjualan daging ayam dan sapi sebesar 1216% dari Tahun 2021; - Penambahan jumlah unit usaha sebanyak 12 unit pada akhir Tahun 2022; - Penambahan investasi dari hasil operasional perusahaan untuk pengembangan unit bisnis utama.

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
12.	<p>Dengan jumlah pelanggan Perumda Tugu Tirta sebesar 172 ribu dan sumber air baku yang hanya 1.450 liter/detik menjadikan kota Malang sangat rentan terjadinya krisis air, sehingga apabila terjadi kebocoran di beberapa titik Perumda Tugu Tirta tidak memiliki cadangan air yang cukup untuk mengganti air yang hilang, dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan air bersih. Sehingga penambahan sumber air baku harus dipercepat dengan kondisi ideal 2.000 liter/detik, Percepatan pembangunan SPAM 1 dan 2 harus diusahakan agar bisa terselesaikan di tahun 2022 ini termasuk kajian untuk membuat Water Treatment Plant (WTP) di Kota Malang.</p>	<p>Untuk pelaksanaan pembangunan SPAM 2 telah selesai 100 % di Tahun 2022 sedangkan SPAM 1 sampai dengan saat ini masih berjalan 80 %, hal tersebut salah satunya disebabkan proses perijinan dari PT. KAI (Kereta Api Indonesia) terkait pelaksanaan pekerjaan <i>Crossing</i> Pipa sepanjang 25 meter di antara jalan yang melewati Rel Kereta Api.</p> <p>Untuk membuat <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) di Kota Malang telah dilakukan Kesepakatan Bersama antara Perum Jasa Tirta I dengan Pemerintah Kota Malang Nomor 0024/PK/DRUT/XII/2022.</p> <p>415.4/69/35.73.111/2022 tentang Penyediaan Air Bersih Curah dan Bidang Usaha Lainnya yang akan mulai dibangun pada Januari 2023 dengan kapasitas 200 lps dan akan ditingkatkan kapasitasnya hingga mencapai 500 lps.</p>	<p>pemenuhan air bersih melalui SPAM melalui <i>Water Treatment Plant</i> (WTP).</p>
13.	<p>Masih adanya kekosongan 2 posisi Dewan Pengawas perlu menjadi perhatian serius bag Pemerintahan Kota Malang agar pengawasan terhadap kinerja Perumda Tugu Tirta bisa maksimal.</p>	<p>Seleksi Dewan Pengawas Perumda Tugu Tirta telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas terpilih telah dilantik pada tanggal 26 Desember 2022.</p>	<p>pengawasan terhadap kinerja Perumda Tugu Tirta dapat dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.</p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
14.	<p>Penanganan terhadap kasus pipa pecah harap menjadi perhatian bersama, dilakukan pemetaan pipa mana saja yang sudah waktunya diganti dan pipa mana saja yang perlu dilakukan penggantian dan perbaikan.</p>	<p>Selama tahun 2022 Perum Tugu Tirta telah melakukan pemetaan pipa - pipa yang bocor serta membuat jadwal prioritas daerah mana yang harus di lakukan rehab atau penggantian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas rehab/penggantian pipa meliputi Jl. Kolonel Sugiono sepanjang 2,15 KM, Jl. Puncak Borobudur sampai dengan Jl. Simpang Candi Panggung 1,11 KM, Jl. M. Riono 0,39 KM dan Tandon Simpar s.d Tandon Buring Atas sepanjang 9,14 KM; 2. Monitoring dan evaluasi tekanan pipa meliputi Tandon Buring 3 s.d Jl. Ki Ageng Gribig, Tandon Bangkon 1 (belakang sengkaling), Jl. Sunandar Priyosudarmo s.d Jl. Batubara, Jl. Tumenggung Suryo s.d Jalan Lahor, Jl. Besar Ijen s.d Jl. Terusan Ijen, Jl. Rajasa s.d Jl. Kiai Parseh Jaya, Jl. Selorejo, Jl. MT. Haryono (pipa bangkon 2), Jl. Ikan Tombro s.d Jl. Ikan Piranha Atas (WT Mojolangu), Jl. Vinolia, dan Jl. Raya Sawojajar. <p>Melakukan pemasangan PRV <i>controller</i>, untuk mengontrol tekanan air agar sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan pemasangan air release sebanyak ± 200 titik pada jalur pipa Distribusi Utama.</p>	
15.	<p>Penyertaan modal dasar pemerintah yang hanya 15 M akan membatasi gerak dari BPR Tugu Artha mengingat tahun depan BPR sudah tidak bisa menerima penyertaan modal jika tidak ada perubahan Peraturan Daerah Penyertaan modal BPR Tugu Artha.</p>	<p>Terkait dengan penyertaan modal BPR Tugu Artha Pemerintah Kota Malang akan melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang utamanya perubahan modal dasar.</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
16.	<p>Masih adanya kekosongan 1 posisi Direksi dan 2 posisi Dewan Pengawas perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintahan Kota Malang agar kinerja BPR Tugu Artha bisa terus meningkat.</p>	<p>Seleksi Direksi dan Komisaris pada BPR Tugu Artha perseroda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas terpilih telah dilantik pada tanggal 26 Desember 2022.</p>	<p>Semua Organ BPR dapat terisi sehingga BPR dapat bekerja optimal dan mencapai target sesuai rencana.</p>
17.	<p>Penyerapan program OJIR masih belum maksimal mengingat jumlah yang bisa ditangani masih sedikit, berkisar 700 juta pinjaman OJIR sehingga perlu dilakukan upaya lebih agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.</p>	<p>BPR Tugu Artha melakukan sosialisasi terus menerus baik terhadap pedagang di pasar rakyat pelaku ekonomi mikro dan kecil di perkampungan melalui RT RW dengan tetap mengedepankan kehati-hatian di dalam menyalurkan kredit.</p> <p>Pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain masih ada calon nasabah yang tidak mempunyai usaha yang berjalan, warga malu mengakui mempunyai pinjaman di rentenir/bank titil, masih dianggap sebagai program hibah dari pemerintah tanpa pengembalian serta ada yang menyalahgunakan program OJIR sebagai cara untuk mendapatkan fasilitas kredit tanpa bunga.</p> <p>Jumlah nasabah aktif per Desember 2022 sebanyak 206 nasabah. Dengan total penyaluran Rp 1.006.729.324,00 dan sisa pinjaman sebesar Rp 570.316.840,00</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
C.	BIDANG PEMBANGUNAN		
1.	<p>Masalah Penanganan Banjir yang merupakan penyakit akut pembangunan kota Malang belum juga diimplementasikan analisis dan pengerjaan jangka panjang, contohnya pada bulan lalu saja ketika terjadi hujan deras terdapat 26 titik banjir yang tersebar di titik vital bahkan muncul 18 tambahan titik bar. Padahal anggaran penanganan banjir sudah menjadi desain prioritas pembangunan kota Malang bukan hanya di lihat dari aspek sosial ekonomi melainkan juga dari aspek lingkungan jangka Panjang. Salah satu penyebabnya adalah sedimentasi dan integrasi sistem drainase yang kurang baik. Kebijakan strategis berupa program Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS) pun belum dapat menjawab permasalahan banjir yang selama ini terjadi. Selain itu, drainase yang tersumbat, menyempit dan tertutup bangunan juga menambah panjang penyebab permasalahan ini. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Malang untuk:</p> <p>a. Menindak tegas pelanggar aturan terutama yang berkaitan dengan bangunan yang menutup saluran drainase ataupun sungai. Selain itu, Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah juga telah tegas mengatur tentang mekanisme pembuangan limbah rumah tanga. Realita tersebut tidak sejalan dengan indikator dalam LKPJ yang menyebutkan bahwasannya penegakan Peraturan Daerah di Kota Malang telah mencapai 100%;</p> <p>b. Pemerintah Kota Malang harus berani mengalokasikan Prioritas Anggaran untuk penanggulangan banjir dengan menghilangkan ego sektoral Perangkat Daerah, fokus anggaran untuk penanganan banjir di Kota Malang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2022 Telah dilakukan Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS) oleh Satgas DPUPRPKP sebanyak 240 kali dalam setahun, di lokasi yang rawan genangan dan lokasi yang saluran drainase tidak berfungsi maksimal; - Telah dilakukan Gerakan Padat Karya yang mencapai 749 orang guna pemberdayaan masyarakat setempat untuk melaksanakan normalisasi saluran drainase di 5 Kecamatan, terutama pada saluran drainase yang tidak berfungsi maksimal dikarenakan sedimen dan sampah; - Telah dilaksanakan pekerjaan konstruksi guna mengurangi titik genangan di wilayah daerah irigasi Sengkaling Kanan meliputi wilayah sekitar Jalan Galunggung, Jalan Jupri, Jalan Bareng, Jalan Kelapa Sawit, Jalan Dieng, wilayah Tanjungrejo. 	<p>Penanganan genangan dan pengurangan titik genangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota.</p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
2.	<p>Dengan banyaknya jalan berlubang menunjukkan buruknya perencanaan anggaran terhadap pemeliharaan jalan yang semestinya setiap tahun terpetakan dengan jelas dan tidak berulang kembali, DPRD Kota Malang merekomendasikan penanganan jalan berlubang ditangani secara serius dengan alokasi anggaran yang cukup.</p>	<p>Telah dilakukan penanganan jalan berlubang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi jalan sepanjang 78,43 km; - Pemeliharaan jalan sepanjang 6,81 km; - Penanganan dengan penutupan spot-spot jalan berlubang. 	<p>Penanganan jalan berlubang dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota</p>
3.	<p>Pemerintah Kota Malang terkesan melakukan pembiaran terhadap pengembang yang sudah puluhan tahun tidak menyerahkan PSU seperti yg terjadi di Lembah Dieng, dimana salah satu PSU nya, jembatan sudah mengalami kropos dan gerusan sehingga sangat menghawatirkan pengguna jalan, DPRD Kota Malang merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang meminta kepada pengembang untuk segera menyerahkan PSU.</p>	<p>Pemerintah Kota Malang terus melakukan sosialisasi untuk penyerahan PSU bagi pengembang dengan menyampaikan surat teguran termasuk menghimbau kepada RT/RW untuk ikut mendesak pengembang di perumahannya untuk segera menyerahkan PSU serta melakukan koordinasi dengan Kantor BPN/ATR Kantah Malang dan Asosiasi Pengembang Perumahan. Pada tahun 2022 terdapat Penyerahan 41 PSU dari target 30 PSU.</p>	<p>Penanganan PSU yang rusak dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota</p>
4.	<p>Pemerintah Kota Malang dapat segera menyelesaikan permasalahan atas bangunan yang menutup di <i>exit</i> tol Madyopuro agar kemacetan <i>bottle neck</i> pada <i>exit</i> tol Madyopuro dapat segera teratasi, DPRD Kota Malang merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang mempunyai keberanian untuk mengambil tindakan tegas dan dapat diselesaikan pada semester 1 (satu) tahun 2022.</p>	<p>Pada tahun 2022 dilakukan persiapan-persiapan tahapan penyelesaian permasalahan atas bangunan yang menutup di exit tol Madyopuro sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2023.</p>	<p>Peningkatan akses infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota</p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
5.	<p>Pembangunan kawasan Jalan Jenderal Basuki Rahmad atau yang disebut oleh pemerintah dengan sebutan Kayutangan Heritage kami menganggap sebagai proyek yang gagap. Betapa tidak, mulai pembangunan awal di koridor 3 yang bermasalah, pembuatan ornamen lampu yang menjadi sorotan masyarakat karena mencontoh Malioboro dan yang paling berat yang terjadi pada saat kawasan Kayutangan dibuka untuk obyek kongkow kemacetan terjadi dikarenakan tidak ada perencanaan tentang lokasi parkir.</p> <p>Sehubungan dengan rencana kawasan Kayutangan sebagai destinasi wisata kami minta kepada Pemerintah untuk benar benar membuat satu perencanaan yang matang dengan melakukan kajian dari berbagai aspek untuk itu DPRD Kota Malang merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Segera sediakan lahan parkir yang memadai; Untuk koridor 3 kami minta untuk ornamen terutama lampu hias benar benar mencerminkan ciri Malangan dan tidak harus sama dengan koridor 1 dan 2 yang mencerminkan Yogyakarta; Kami minta dengan dibangunnya kawasan Kayutangan mempunyai nilai manfaat lebih bagi Masyarakat sekitar. 	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2022 Pemerintah telah melakukan proses pengadaan tanah untuk penyediaan lahan parkir, namun setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi ke KPK RI Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi maka Pemerintah Kota Malang membatalkan pengadaan tanah dimaksud dan Inspektorat Daerah selaku APIP melakukan reviu terhadap proses pengadaan tanahnya sehingga pada tahun 2023 dilakukan pengkajian ulang terkait lokasi kantong parkir untuk kawasan Kayutangan Heritage; Lampu dekorasi pada Kayutangan Heritage Zona 3 sudah memiliki ornamen khas Malangan yaitu motif singa dan miniatur tugu; Untuk memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat sekitar, Pemerintah Kota Malang melakukan aktivasi kawasan Kayutangan Heritage melalui Perangkat Daerah yang mampu urusan bidang ekonomi kreatif dan destinasi wisata adalah menampilkan group band setiap hari selama tahun 2022 mencapai 843 penampilan oleh 484 group band dan kegiatan even sebanyak 2 kali Malang <i>Creativa</i> dan Malang 108. 	<p>Penataan koridor dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota</p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
6.	<p>Dengan akan diteruskannya hibah pengelolaan sampah dengan sistem <i>sanitary landfill</i> yang membutuhkan biaya operasional cukup besar DPRD Kota Malang merekomendasikan agar segera ada regulasi pengelolaan sampah di Kota Malang sehingga dilakukan dengan lebih profesional, mandiri dan punya nilai ekonomis yang tinggi sebagai salah satu penopang PAD Kota Malang.</p>	<p>Untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih profesional, mandiri dan memberikan peluang pada peningkatan PAD di bidang persampahan Pemerintah Kota Malang mengefektifkan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sehingga terdapat peningkatan PAD menjadi 121,23% pada retribusi persampahan/kebersihan dari target sebesar 15 M menjadi Rp18.185.410.000,00.</p>	
7.	<p>Upaya pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan salah satunya membuka jalan arteri atau jalan tembus dan sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu. Atas dasar upaya tersebut, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang agar merespon upaya masyarakat Wonokoyo yang telah menghibahkan tanahnya guna terwujudnya jalan tembus Wonokoyo ke Jl. Mayjen Sungkono tepatnya Utara Terminal Hamid Rusdi, dan mendorong pembebasan tanah masyarakat yang tersisa. Terwujudnya jalan tembus tersebut sangat membantu masyarakat untuk lebih memudahkan akses Wonokoyo ke Jl. Mayjen Sungkono dan mengurangi kemacetan di depan <i>Block Office</i>.</p>	<p>Untuk merespon upaya masyarakat Wonokoyo yang telah menghibahkan tanah guna terwujudnya jalan tembus Wonokoyo ke Jl. Mayjen Sungkono, maka program pembebasan tanah untuk jalan tembus dimaksud dimasukkan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah pada Renja Tahun 2024 dengan tetap mengikuti tahap-tahap pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Peningkatan akses infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota</p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
D.	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1.	Terdapat kenaikan persentase penduduk miskin yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga kedalaman kemiskinan Kota Malang pada tahun 2021 sebesar 0,87 atau naik 0,21 ketimbang tahun 2020 sebesar 0,66. Bahkan Indeks Keparahan Kemiskinan otomatis juga mengalami kenaikan dari 0,15 (pada tahun 2020) menjadi 0,22 (pada tahun 2021). Tentu rapor ini menjadi catatan penting bagi kita semua, khususnya Pemkot dalam penyusunan program prioritas pengentasan kemiskinan di Kota Malang yang mampu bekerja secara linier dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.	Program pengentasan kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2022 antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan permakanaan (BPNTD) kepada fakir miskin, disabilitas dan lanjut usia sebanyak 6987 orang yang terdiri dari BPNTD 6257 orang, Disabilitas 400 orang, Lansia 200 orang dan Rantang kasih 130 orang - Bantuan sosial kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai dari DBHCHT bagi buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sejumlah 6.265 KPM dan masyarakat lainnya (buruh pabrik rokok non produksi dan masyarakat DTKS non bansos) sejumlah 6.000 KPM) 	Pada tahun 2021 terjadinya Pandemi Covid- 19 banyaknya masyarakat yang di PHK dari pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran dan menambah jumlah Penduduk Miskin.
2.	Bantuan sosial dalam serapannya tidak optimal, capaian target rendah, kemampuan pemetaan data masyarakat miskin tidak akurat, diperlukan mekanisme dan sistem pendataan yang diperkuat dengan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten.	Mekanisme dan sistem pendataan yang digunakan untuk memetakan masyarakat miskin dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat, Pemerintah Kota Malang mengusulkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang.	Pendataan dan Pemetaan masyarakat miskin yang akurat.
3.	Pemerintah Kota Malang memiliki fasilitas rehabilitasi sosial seperti <i>camp assessment</i> , Tuna Wisma karya, dan Pondok Lansia yang wajib ditunjang dengan manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten.	Menyelenggarakan pelayanan melalui fasilitas rehabilitasi sosial berdasarkan SPM kewenangan kabupaten/kota sebanyak 5 SPM dengan Standart Operasional Prosedur dan tenaga pelayanan sosial sesuai	Pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan jenis klien

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
		kompetensinya sebanyak 7 orang dengan komposisi : Pekerja sosial ahli pertama 1 orang, Ahli Pertama Pekerja Sosial 3 orang dan pendamping rehabilitasi sosial 3 orang	
4.	Dinas Kesehatan Kota Malang perlu ada inovasi yang dapat membuat pelayanan terhadap masyarakat Kota Malang semakin baik. Salah satunya adalah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, mulai dari fasilitas kesehatan dasar, hingga fasilitas kesehatan lanjutan yang dapat dimonitor langsung oleh secara real time. Dengan ini, maka akses informasi kesehatan di Kota Malang akan lebih mudah, cepat, dan tuntas.	Penggunaan sistem informasi kesehatan dan aplikasi-aplikasi lainnya di bidang kesehatan telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI yang mencapai 23 aplikasi yang memuat informasi sektoral di bidang kesehatan yang belum terintegrasi di tingkat kementerian. Untuk itu sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) yang disediakan oleh Kemenkes perlu dioptimalkan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.	Akses informasi kesehatan di Kota Malang lebih mudah, cepat, dan tuntas serta dapat dimonitor langsung oleh masyarakat secara <i>real time</i> .
5.	Program UHC kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan BPJS Kesehatan Kota Malang, yang implementasinya melalui Dinas Kesehatan di tahun 2021 sudah tercapai angka akumulasi perlindungan kesehatan sebesar 95%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga/penduduk kota Malang sudah diberikan perlindungan kesehatan. Tetapi distribusi peserta PBID yang sejumlah 95% masih tersebar hanya pada 16 Puskesmas (Faskes Pemerintah). Sedangkan BPJS Kesehatan tidak hanya bermitra dengan Faskes pemerintah saja, tetapi juga dengan sejumlah Faskes Swasta yang ada di kota Malang. Amanah UU BPJS Kesehatan tentang optimalnya pelayanan peserta (bahwa setiap peserta wajib mendapatkan pelayanan yang dekat, murah, nyaman dan tuntas), maka distribusi peserta PBID tidak harus pada Faskes pemerintah saja. Dengan hal diatas wujud capaian kinerja	Tahun 2022 capaian program UHC di Kota Malang sebesar 106,50% meningkat dari tahun 2021 sebesar 95% sedangkan untuk FKTP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan telah meningkat menjadi 93 FKTP. Untuk itu Dinas Kesehatan akan terus mendorong FKTP di Kota Malang untuk memenuhi persyaratan sehingga dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.	Tercapainya Program UHC

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	<p>Dinas Kesehatan terhadap program UHC masih belum optimal (Rendah) maka DPRD Kota Malang merekomendasikan BPJS Kesehatan selaku pemegang kebijakan distribusi kepesertaan beserta pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) segera mematuhi UU BPJS Kesehatan dimaksud demi kemanfaatan perlindungan kesehatan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang diberikan, dengan melakukan <i>Redistribusi</i> Kepesertaan "<i>SECEPATNYA</i>" secara menyeluruh kepada Fakes kesehatan swasta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat.</p>		
6.	<p>Pengelolaan BLUD oleh seluruh Puskesmas di Kota Malang perlu monitor dan evaluasi sehubungan dengan masing-masing Puskesmas belum mampu menetapkan target pendapatannya, bahwa dalam menyusun program/kegiatan belanja yang bersumber dari BLUD, Puskesmas wajib menyampaikan dan menunjukkan dokumen program/kegiatan belanjanya yang terinput di SIPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Target pendapatan Puskesmas ditetapkan berdasarkan kapitasi yang diperoleh dari BPJS Kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Selanjutnya RBA diinput oleh masing-masing Puskesmas pada SIPD. Realisasi pendapatan berdasarkan transfer dana kapitasi dari BPJS Kesehatan.</p>	<p>Pengelolaan BLUD oleh seluruh Puskesmas di Kota Malang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat.</p>
7.	<p>RSUD Kota Malang masih terakreditasi type D, Sedangkan implementasi pelayanan, SDM dan Sarana dan prasarana kesehatan sudah memenuhi kelayakan type C. Hal ini terkendala pada ketentuan kelembagaan (Peraturan Walikota tentang kelembagaan) sampai dengan tahun ini belum ada yang berdampak terhadap capaian kinerja Lembaga</p>	<p>Proses pembahasan Ranperwal SOTK RSUD untuk menjadi tipe C saat ini sudah sampai pada tahap fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Terbitnya Perwal SOTK RSUD Tipe C.</p>

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	sehubungan dengan belum sesuai antara pelayanan dan ketentuan kelembagaan, serta pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha tidak maksimal. Segera diundangkan Peraturan Walikota tentang kelembagaan RSUD tipe C di tahun 2022.		
8.	Potensi PAD yang bisa dihasilkan dari aset Pemerintah Kota Malang yang dikelola oleh Disporapar harus lebih di maksimalkan di tahun anggaran mendatang. Mengingat banyak anggaran yang diinvestasikan untuk maintenance aset yang dapat menghasilkan pendapatan retribusi, spesifiknya adalah lapangan-lapangan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. Apalagi sebetulnya kota Malang telah memiliki aplikasi SIMBAHE aplikasi pembayaran retribusi yang ternyata tidak dipergunakan dengan maksimal untuk memfasilitasi hal tersebut. Yang kemudian sementara dilakukan dengan cara offline dan online, hal ini membuktikan tidak adanya keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam hal menambah pendapatan retribusi yang sebetulnya sangat mudah untuk diolah menjadi sumber pendapatan yang potensial.	Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi SIMBAHE Pemerintah Kota Malang melakukan perubahan, penyesuaian dan pembaharuan aplikasi tersebut dengan penambahan fitur-fitur baru. Pada tahun 2022 dari target retribusi jasa usaha untuk penggunaan sarana prasarana olahraga sebesar Rp. 210.000.000,00 terdapat peningkatan menjadi sebesar Rp. 548.541.100,00.	
9.	Banyaknya ruang terbuka untuk berolahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang yakni 26 lapangan dan 2 GOR, Ken Arok dan Gajayana, sebetulnya konkrit merupakan potensi yang cukup baik untuk menjadikan kota Malang sebagai kota yang bisa dinilai secara Indeks Pembangunan Olahraganya. Selain itu, investasi Pemerintah Kota Malang dalam pembiayaan untuk pembangunan manusia dalam bidang	Pemerintah Kota Malang telah melakukan kajian-kajian pengembangan dan peningkatan serta revitalisasi lapangan olahraga yang telah ada yaitu Lapangan Sampo, Cengger Ayam, Sanansari/Amprong, Gadang, Bandungrejosari, Balarjosari, Kedungkandang dan Lapangan Cinde sekaligus mendorong adanya lapangan-lapangan unggulan yaitu Lapangan Balarjosari, Cengger	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	<p>keolahragaan juga cukup besar melalui KONI. Maka dari itu, perlu adanya pemanfaatan aset olahraga yang dimiliki oleh Kota Malang, dengan melakukan pemetaan, pendalaman terhadap animo masyarakat yang ada di sekitar masing-masing lapangan olahraga, dan juga mendorong adanya lapangan-lapangan unggulan masing-masing olahraga.</p>	<p>Ayam, Stadion Gajayana, Gadang dan Kedungkandang.</p>	
<p>10.</p>	<p>Sudah lama Kota Malang kehilangan satu ikon olah raga yaitu kolam renang Gajayana, yang dahulu masyarakat awam menyebut swimbath, swembat atau slembat dikarenakan ketidak mampuan Pemerintah mengelola kolam renang tersebut dan hari ini dalam kondisi tidak terawat dan tidak bisa dimanfaatkan. Untuk itu DPRD Kota Malang memberikan saran kepada Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, perawatan dan pemanfaatan Kolam renang Gajayana. Dan kalau dirasa Pemerintah tidak mampu atau dirasa tidak menguntungkan kami sarankan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.</p>	<p>Kolam renang Gajayana saat ini masih beroperasi dan tetap dimanfaatkan oleh masyarakat terkait pemeliharaan memang perlu ditingkatkan.</p> <p>Pemerintah Kota Malang telah melakukan perawatan dan pemeliharaan berupa pengecatan dan perawatan mesin pompa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga masyarakat pengguna.</p> <p>Kolam Renang Gajayana juga digunakan sebagai Puslatkot Porprov untuk cabang olahraga renang dan selam.</p> <p>Dalam hal pengelolaan kolam renang lebih menguntungkan jika dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kota Malang dengan perolehan retribusi cukup tinggi dari pengguna kolam disetiap pekan.</p>	
<p>11.</p>	<p>Segera diundangkan RIPDA dan menyusun roadmap pariwisata guna pengelolaan pariwisata yang potensial dan berdampak meningkatnya PAD.</p>	<p>Pemerintah Kota Malang telah memiliki Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Untuk penyusunan RIPDA dalam bentuk peraturan daerah akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.</p>	

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
12.	Sistem PPDB 2021 yang sudah baik agar dapat dipertahankan di tahun 2022, untuk dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan baru.	<p>Pengembangan sistem PPDB di tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk PPDB masuk SMP jalur prestasi nilai Rapor, tahun 2021 menggunakan indeks nilai rata-rata Ujian Sekolah 3 tahun sebelumnya. Sedangkan Tahun 2022 sudah menggunakan Indeks UKD (Uji Kompetensi Daerah); - Untuk PPDB masuk SD/SMP Jalur Afirmasi (peserta didik dari keluarga miskin) selain fotokopi KIP/KKS/PKH bisa menggunakan fotokopi buku Rekening PIP; - Untuk PPDB masuk SMP Jalur Zonasi, sistem langsung membaca koordinat rumah pendaftar (peserta didik) melalui database. 	Menyelesaikan permasalahan terkait proses penerimaan peserta didik baru.
13.	Dalam pemenuhan target jumlah guru yang berstatus P3K di kota Malang, Pemerintah Kota Malang kurang tanggap untuk memenuhi kuota jumlah guru P3K yang diberikan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah segera melaksanakan rekrutment guru P3K guna menjaga stabilitas pembelajaran.	Melakukan pengangkatan Guru PPPK sebanyak 979 orang pada tahun 2022.	Meningkatkan kuota Guru PPPK.

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
14.	Dinas Pendidikan Kota Malang agar tetap memperhatikan keberadaan sekolah-sekolah swasta mulai tingkat PAUD, TK, SD dan SMP agar terus bersinergi untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kota Malang.	<p>Untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kota Malang khususnya terhadap sekolah sekolah swasta Pemerintah Kota Malang melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian dana Bosda (pendamping dana BOS) ke semua sekolah swasta SD-MI-SMP-MTs yang memenuhi syarat; - Bantuan pemeliharaan dan rehab ke sekolah swasta sesuai peruntukannya (berdasarkan proposal dan data dapodik) pada tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) satuan pendidikan swasta; - Pemberian bea siswa bagi peserta didik SD-MI-SMP-MTs se Kota Malang dari keluarga miskin dan berprestasi sebanyak 240 orang; - Melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen proses belajar mengajar serta pengelolaan biaya operasional (BOP) dari pemerintah pusat kepada satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal setiap tahun sebanyak 2 kali; - Memberikan insentif bagi guru di satuan Pendidikan swasta setiap tahun sebanyak 2041 orang 	Untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan swasta di Kota Malang;
15.	Penanggulangan pasca bencana, komunikasi dan support dari OPD yang berkaitan sangat lemah, sehingga BPBD terkesan tidak bisa bekerja dengan baik. Anggaran yang diberikan untuk BPBD dalam belanja modal untuk sarana dan prasarana sangat minim. Dalam urusan kebencanaan, ketika pasca bencana diperlukan logistik untuk didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana (family kit, paket sembako). Dalam hal ini, penganggaran yang direncanakan gagal untuk bisa	Pembentukan kelurahan tangguh dapat diinisiasi oleh Pemerintah Kota Malang melalui BPBD dan dapat diinisiasi secara mandiri oleh keswadayaan masyarakat. BPBD telah melakukan sosialisasi, pelatihan ketangguhan dan simulasi penanggulangan bencana sebanyak 26 kegiatan untuk memotivasi keswadayaan masyarakat.	Terciptanya masyarakat sadar bencana melalui kelurahan tangguh.

No.	Rekomendasi DPRD N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang disesuaikan
	<p>menyediakan kebutuhan selama satu tahun penganggaran dalam tahun anggaran 2021 padahal logistik untuk masyarakat sangat esensial untuk recovery kondisi masyarakat; Dalam hal penanggulangan bencana, BPBD membutuhkan peran masyarakat di tiap-tiap kelurahan. Dalam implementasinya, kelurahan tangguh di Kota Malang belum menyebar di 57 Kelurahan karena terkendala pada anggaran dan minimnya sarana Prasarana penanggulangan bencana di tiap-tiap kelurahan.</p>		
16.	<p>Dalam peran serta di kebencanaan, TRC kurang dapat mencakup seluruh aspek di kota Malang. Salah satunya, karena kurangnya jumlah personil untuk bisa mengakomodasi 5 (lima) kecamatan, dan terbatasnya perlengkapan mobilisasi.</p>	<p>Untuk menangani persoalan-persoalan kebencanaan di 5 kecamatan Pemerintah Kota Malang melalui BPBD melakukan pendampingan terhadap relawan bencana yang ada di masing-masing kelurahan tangguh dalam bentuk pelatihan-pelatihan teknis penanganan bencana sebanyak 10 Kegiatan.</p>	<p>Tercapainya penanganan kebencanaan di wilayah Kota Malang.</p>

Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Malang telah melakukan inovasi mencapai 118 inovasi daerah untuk memudahkan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pada Tahun 2022 terdapat 45 (empat puluh lima) Inovasi pelayanan publik baru, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022

No.	Unit Layanan	Judul Inovasi
1	SDN Kesatrian 1	SIDIG PUSTAKA (Sistem Informasi Digital Perpustakaan)
2	SDN SUKUN 1	SWASTI (Suksma Waste Utilization)
3	SMPN 22	CONTES GURU (<i>Control Teaching Evaluation System Guru</i>)
4	SMPN 20	Inovasi Peminjaman Online di Perpustakaan SMPN 20 Malang
5	SMPN 12	SI KAPAK SAKTI (Sistem Informasi Kegiatan dan Program Sekolah Yang Sistematis, Aktual dan Terintegrasi)
6	SMPN 18	GERGAJI BAJA (Gerakan Rajin Berbudaya Jawa)
7	SMPN 5	SI KAWAN DUDUK (Siswa Bertkarakter dan Berwawasan Kependudukan)
8	BAPENDA	Aplikasi PERSADA (Aplikasi Online Restoran dan Subyek Pajak Daerah lainnya)
9	PUSKESMAS MULYOOREJO	KLEPON MASJO
10	PUSKESMAS MULYOOREJO	Pemanfaatan Halo Sanitasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Mulyorejo Dinas Kesehatan Kota Malang
11	PUSKESMAS MULYOOREJO	TelePOrTer (Telemedisine Penyampaian hasil labOratorium Tes cEpat molekuleR tb)
12	SMPN 1	LOKS (LAYANAN ONLINE KANTIN SEHAT)

13	PUSKESMAS KENDALKEREP	Kipas Emas (Kelompok Ibu Pendukung Asi Di Masa Emas)
14	SMPN 8	Mantep Sebagai Media E-Governance
15	SMPN 8	SURIPANG (Susu Sari Biji Ketapang)
16	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Budidaya Tanaman Sistem Hidrokanik
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Inovasi Teknologi Pupuk Cair Semi Organik
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pelayanan Jasa Alsitan (Alat dan Mesin Pertanian)
19	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Bengkel Domba
20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Implementasi Sistem Pertanian Perkotaan
21	SDN Tanjungrejo 2	Biopori Dollar Si Penyelamat Lingkungan
22	SDN Kesatrian 2	SAMPO DIKOS (Sampah Organik Dijadikan Kompos)
23	SDN PURWANTORO 4	LANCAR CARING Melalui Whatapp Video Call Untuk Siswa Kelas 1
24	SMPN 26	SI LEBAH (Sistem Layanan Bimbingan dan Konseling Yiang Aktif dan Ramah)
25	SMPN 17	PARSENI OLAH BERBAGI (Pameran Seni Sekolah Berbasis Digital)
26	SMPN 16	JAIM BILANG CINTA (Jaga Imunitas Bisa Langsung Minum Cinamon Tahes)
27	SMPN 6	SI ELY SMART (Sistem E Lirary SMART)
28	Inspektorat	SISLADA (Sistem Layanan Pengaduan)
29	SMPN 10	SI WALET MAS (Sistem Water Treatment Untuk Masyarakat)
30	SMPN 10	SINTAK SDASA MANJUR (Sistem Internalisasi Akhlakul Karimah)
31	SMPN 10	JARIK MA'SITI (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa)

32	Dinas Pendidikan LPABK	Safari Inklusi
33	SMPN 3 Kota Malang	<i>One Clas One Book</i>
34	SMPN 7	BERAS BUYA (Berantas Buta Hijaiyah)
35	SMPN 7	SI PENTU (Sistem Informasi akademik)
36	SMPN 7	NING MANYS SPENTU (Learning Management System)
37	DISPENDUKCAPIL	SIAPEL (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Elektronik & WhatsApp)
38	DISPENDUKCAPIL	D-CARDS(Dispenduk CARE of Disabilities & Sosial Inclusion)
39	DISPORAPAR	SIMBAH-E (Sistem Pembayaran Elektronik)
40	BKPSDM	TERPESONA (Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik)
41	Dinas Perhubungan	SI JELITA MAKOTA
42	PUSKESMAS POLOWIJEN	Melati
43	PUSKESMAS POLOWIJEN	Si Tangkas (berSiH TANGAn, siKAp salam, Siap aksi)
44	PUSKESMAS POLOWIJEN	Tatap Covid-19 (Digitalisasi Data Pasien Swab Covid-19 melalui Google Form)
45	DINSOS P3AP2KB	SAMGEPUNBASA

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Malang, 2022

Sedangkan penghargaan yang telah diraih pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Penghargaan Tingkat Nasional

1. Penghargaan Kepatuhan Bidang Pelayanan Publik Kepada Pemerintah Kota Malang oleh Ombudsman Republik Indonesia
2. Piagam Apresiasi Atas Sinergi Dalam Mendukung Pelaksanaan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia
3. Penghargaan Kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE - KIM)
4. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 (Terbaik 3) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)
5. Penghargaan WTP 11 Kali Berturut-turut oleh Kementerian Keuangan
6. Anugerah Kualitas Pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
7. Juara 2 Kategori Siaran Pers Media Online pada Anugerah Media Humas (AMH) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
8. Juara 1 Kategori Kampanye Komunikasi Publik pada Anugerah Media Humas (AMH) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
9. Juara 2 Kategori Website pada Anugerah Media Humas (AMH) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

10. Juara 1 Kategori Audio Visual pada Anugerah Media Humas (AMH) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
11. Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2022
 - a. SDN Lowokwaru 2
 - b. SDN Purwodadi 1
 - c. SD Al ya'lu
12. Penghargaan Adiwiyata Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 - a. SDN Percobaan 2
 - b. SDN Kotalama 1
 - c. SMPN 23
 - d. SD Muhammadiyah 4
 - e. SMP Laboratorium UM
13. Penghargaan Best Smart Branding Kategori Kota oleh Citiasia, Inc.
14. Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
15. Gold Winner Kategori Manajemen Pengelolaan Media Sosial yang Berpihak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Humas Indonesia
16. Pemenang Institusi Terpopuler di Media Digital 2022 Subkategori Pemerintah Kota oleh Humas Indonesia
17. Wali Kota Malang Sebagai Pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Digital 2022 Subkategori Pemerintah Kota oleh Humas Indonesia
18. Bronze Winner Subkategori Magazine, Balai Kota News Edisi 1, 1 April 2022 oleh Humas Indonesia
19. Golden Winner Kategori Media Internal Subkategori Video Profile oleh Humas Indonesia
20. Golden Winner Kategori Kanal Digital, Subkategori Media Sosial Instagram oleh Humas Indonesia

21. Penghargaan Top Digital Implementatition 2022 oleh Majalah It Works
22. Top Leader on Digital Implementation 2022 oleh Majalah It Works
23. Pemenang Kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
24. Predikat Pasar Berstandar Nasional (Pasar Kasin) oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
25. Anugerah Revolusi Mental 2022 oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

B. Penghargaan Tingkat Provinsi:

1. Penghargaan Jatim Koinfo Festival 2022 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Juara I Kategori Website
2. Penghargaan Jatim Koinfo Festival 2022 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Juara II Kategori Media Sosial
3. Penghargaan TOP Inovasi Terpuji Kovablik Jawa Timur 2022 "Jarik Ma'Siti" oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Juara 1) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Juara II Video berita KIM tingkat Jawa Timur (KIM Tlogomas)
6. Juara III kategori Videografis KIM tingkat Jawa Timur (KIM Karangbesuki)
7. Juara III kategori infografis KIM tingkat Jawa Timur (KIM Purwoagung)

8. Keterbukaan Informasi Award Jatim 2022 Kategori Badan Publik Pelayanan Informasi terbaik Kota/Kabupaten se-Jatim
9. Keterbukaan Informasi Award Jatim 2022 Kategori Badan Publik Informatif



PEMERINTAH
KOTA MALANG

Bab IV

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
WALIKOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2022



>>> Bab IV **Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah pada tahun yang berkenaan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat setempat. Namun demikian dengan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Kota Malang tidak dapat melaporkan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hal itu dilakukan mengingat pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Malang tidak termasuk daerah yang mendapat penugasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.



PEMERINTAH
KOTA MALANG

Bab V Penutup

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
WALIKOTA MALANG**

TAHUN ANGGARAN 2022



>>> Bab V Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Tahun pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2021 berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dari pendekatan hexahelix dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Meskipun Pandemi COVID-19 sudah mulai menurun namun permasalahan ikutan terutama yang berkenaan dengan penguatan dan perbaikan ekonomi daerah harus dihadapi secara bersama-sama.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan tersebut diraih atas kerja sama semua komponen pemerintahan daerah. Karena itu Pemerintah Kota Malang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Malang yang mendukung kondisi kota tetap terjaga kondusif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Malang membuka diri atas

masukan, saran dan kritik guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna sampai pada titik terwujudnya "Kota Malang Bermartabat"

LAMPIRAN 3.1.1.
**PELAKSANAAN URUSAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	91,38 %	94,43 %			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	0 lembaga	0 lembaga	Anggaran di alihkan ke sub kegiatan lain	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	3 lembaga	7 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutiln Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	6 lembaga	0 lembaga	Anggaran di alihkan ke sub kegiatan lain	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	17000 Orang	17000 Orang			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	175 lembaga	175 lembaga			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kair Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5 Komunitas	5 Komunitas			
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	35 Peserta	70 Peserta			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	500 lembaga	500 lembaga			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82,90 %	74,05 %			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	93,50 %	87,82 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	214 %	214 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	151 %	151 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	74 %	74 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	81 %	81 %			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	20 %	60 %			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	97,65 %	82,4 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	750 Orang	750 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	98 Orang	98 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110,71 Angka	108,75 Angka			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99,75 Angka	91,14 Angka			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	80 Sekolah	2 Sekolah	target yang dimasukkan adalah data proposal pengaluan	menyesuaikan target untuk tahun depan	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	195 Sekolah	26 Sekolah	target yang dimasukkan adalah data proposal pengaluan	menyesuaikan target untuk tahun depan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	3 Sekolah	1 Sekolah	target yang dimasukkan adalah data proposal pengaluan	menyesuaikan target untuk tahun depan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5 Sekolah	9 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	826 Orang	775 Orang	target yang dimasukkan adalah data proposal pengaluan	menyesuaikan target untuk tahun depan	
				Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	152 Sekolah	127 Sekolah	Karena ada lembaga yang tidak memenuhi persyaratan pemberian hibah BOSDA swasta	Mendorong lembaga untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagai penerima hibah BOSDA swasta	
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8 Sekolah	8 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	318 Orang	318 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kair Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5 Komunitas	5 Komunitas	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200 Sekolah	200 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	3 lembaga	1 lembaga	target yang dimasukkan adalah data proposal pengaluan	menyesuaikan target untuk tahun ke depan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	107,45 %	91,97 %			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97,3 %	87,2 %			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	27 lembaga	1 lembaga	target yang dimasukkan adalah data proposal pengaluan	menyesuaikan target untuk tahun ke depan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	4 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	27 Sekolah	4 Sekolah	target yang dimasukkan adalah data proposal pengaluan	menyesuaikan target untuk tahun ke depan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	354 Orang	595 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	87 lembaga	111 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	107 lembaga	109 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	30 Jenis	30 Jenis	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengembangan Kairi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 Komunitas	5 Komunitas			
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	45 lembaga	74 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	20913 Orang	20913 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30 lembaga	30 lembaga			
				Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	4 lembaga	1 lembaga	target yang dimasukkan adalah data proposal pengajuan	menyesuaikan target untuk tahun	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 lembaga	1 lembaga	target yang dimasukkan adalah data proposal pengajuan	menyesuaikan target untuk tahun ke depan	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutih Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	27 lembaga	1 lembaga	target yang dimasukkan adalah data proposal pengajuan	menyesuaikan target untuk tahun ke depan	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	47.24 %	47 %			
				Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	52.25 %	52.25 %			
				Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	388 Sekolah	388 Sekolah			
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	91.95 %	61.37 %			
				Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.25 %	37.5 %			
				Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3345 Orang	3345 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Penyelenggaraan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25 Unit	25 Unit			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	223 Dokumen	223 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 Angka	88.73 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169 Orang	169 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 layanan	7 layanan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Jenis Komponen Listrik	22 Jenis Komponen Listrik			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Peralatan	17 Peralatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 Peralatan	13 Peralatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57 Jenis Barang Cetak	57 Jenis Barang Cetak			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300 eksemplar	300 eksemplar			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1500 Orang	1500 Orang			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Kali	1000 Kali			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 paket	6 paket			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Peralatan	12 Peralatan	-		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17568 Surat	16803 Surat	kondisional		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	4 Jenis	-		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	2 Unit	2 Unit	-		
				Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136 Unit	136 Unit	-		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	-		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	-		
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Advokasi Pemberdayaan Kemirraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75 %	100 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemirraan dan Pemberdayaan Masyarakat	57 Kelurahan	57 Kelurahan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200 Peserta	257 Peserta			
				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65 %	76 %			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Polo wijen	10 poskestren	10 poskestren			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Polo wijen	16 pos UKK	16 pos UKK			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Polo wijen	57 Posyandu Lansia	57 Posyandu Lansia			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Polo wijen	367 Posyandu Mandiri	492 Posyandu Mandiri			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Polo wijen	16 Puskesmas	16 Puskesmas			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Polo wijen	1 SBH	1 SBH			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Polo wijen	2 poskestren	2 poskestren			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	2 pos UKK	2 pos UKK			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	24 Posyandu Lansia	24 Posyandu Lansia			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	40 Posyandu Mandiri	40 Posyandu Mandiri			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	2 poskestren	2 poskestren			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	2 pos UKK	1 pos UKK	Posyandu lansia : Pembinaan difokuskan pada posyandu balita untuk peningkatan strata purnama mandiri karena adanya penurunan strata posyandu balita	Melakukan pembinaan posyandu lansia bersamaan dengan posyandu balita secara terintegrasi	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	36 Posyandu Lansia	25 Posyandu Lansia	Posyandu lansia : Pembinaan difokuskan pada posyandu balita untuk peningkatan strata purnama mandiri karena adanya penurunan strata posyandu balita	Melakukan pembinaan posyandu lansia bersamaan dengan posyandu balita secara terintegrasi	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	38 Posyandu Mandiri	38 Posyandu Mandiri			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)janti	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)pandanwangi	1 postkestren	12 postkestren			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)pandanwangi	2 pos UKK	10 pos UKK			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)pandanwangi	13 Posyandu Lansia	28 Posyandu Lansia			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)pandanwangi	22 Posyandu Mandiri	34 Posyandu Mandiri			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)pandanwangi	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)cisadea	36 Posyandu Lansia	36 Posyandu Lansia			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)cisadea	36 Posyandu Mandiri	36 Posyandu Mandiri			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)cisadea	12 Dokumen	12 Dokumen			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	100 %			
			Meningkatnya kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	84.5 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46247 Orang	39098 Orang	Tidak semua balita datang ke Posyandu dan balita yang ditemukan tidak sebesar sasaran (sasaran terlalu tinggi)	Pendataan balita di Posyandu	
				Sub Kegiatan Pengelidatan Pelayanan Kesehatan Balita	46247 Orang	39098 Orang	Tidak semua balita datang ke Posyandu dan balita yang ditemukan tidak sebesar sasaran (sasaran terlalu tinggi)	Pelaksanaan sosialisasi E-Kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara real time	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(dinoyo)	2080 Orang	2080 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(dinoyo)	2080 Balita	2080 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(cribig)	5770 Balita	3536 Balita	Posyandu baru aktif pada semester 2 sehingga kunjungan belum optimal	Meningkatkan kunjungan rumah dan pembinaan posyandu	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(cribig)	5770 Orang	3936 Orang	Posyandu baru aktif pada semester 2 sehingga kunjungan belum optimal	Meningkatkan kunjungan rumah dan pembinaan posyandu	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(ciptomulyo)	3282 Balita	2893 Balita	Balita yang ditemukan tidak sebesar sasaran serta imunisasi IDL dan booster belum 100%	Melaksanakan upaya untuk memaksimalkan penggunaan e-kohort	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(ciptomulyo)	3282 Balita	2893 Balita	Balita yang ditemukan tidak sebesar sasaran serta imunisasi IDL dan booster belum 100%	Pelaksanaan sosialisasi E-Kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara real time	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(pandanwangi)	2735 Balita	2740 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(pandanwangi)	2735 Orang	2740 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(pandanwangi)	2072 Balita	1945 Balita	target yang terlalu tinggi (proyekasi dari kementerian berdasarkan SUPAS BFS)	memaksimalkan penggunaan e-kohort	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(pobowien)	2072 Orang	1945 Orang	target yang terlalu tinggi (proyekasi dari kementerian berdasarkan SUPAS BFS)	memaksimalkan penggunaan e-kohort	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1533 Balita	1958 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8644 ibu hamil	7755 ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang dipenka hepatitis tidak tercapai karena tidak semua ibu hamil mengakses Puskesmas dan stok reagen sempat kosong	Menguatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor.	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	304 Kasus	560 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Kasus	10 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Kasus	27 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1430 Balita	1913 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69683 Orang	1884159 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	750 ibu hamil	811 ibu hamil			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	10 Kasus	24 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	36 Balita	59 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	1 Kasus	1 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	36 Balita	298 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	761 Orang	873 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	500 Orang	1306 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	5750 Orang	5388 Orang	Terdapat perbedaan antara jumlah proyeksi bayi, baduta dan anak sekolah dengan jumlah ril	Melakukan monitoring serta evaluasi capaian bila memungkinkan akan dilakukan kunjungan rumah	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	563 ibu hamil	563 ibu hamil			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	3 Kasus	25 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	102 Balita	101 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	1 Kasus	1 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	1 Kasus	0 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	186 Balita	252 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	4516 Orang	4516 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Usuran Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	700 Ibu	509 Ibu	Jumlah ibu hamil yang diperiksa hepatitis tidak tercapai karena tidak semua ibu hamil mengakses puskesmas dan stok reagen sempit kosong	Mengajukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terutama dalam pencatatan dan pelaporan kasus	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	7 Kasus	54 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	6 Kasus	121 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	36 Kasus	53 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	81 Orang	187 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	600 bayi	700 bayi			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(érjuno)	7 Kasus	24 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(érjuno)	1 Kasus	1 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(érjuno)	72 Kasus	75 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(érjuno)	150 Orang	680 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(érjuno)	3430 Orang	3172 Orang	Terdapat perbedaan antara jumlah proyekst bayi, baduta dan anak sekolah dengan jumlah ril	Melakukan monitoring serta evaluasi capaian bila memungkinkan akan dilakukan kunjungan rumah untuk meningkatkan capaian	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(érjuno)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	7 Kasus	20 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	7 Kasus	25 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	62 Kasus	47 Kasus			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	310 Orang	291 Orang	PPKM masih beliaiku sehingga terdapat beberapa langkah yang belum bisa dilakukan seperti mobile klinik	Supervisi kegiatan program HIV di layanan untuk melihat pencatatan, pelaporan dan kualitas program	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	18 Orang	14 Orang	Suit melakukan program terapti pengobatan TB	Melakukan skrining TB dan skrining aktif	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	2269 Orang	3303 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	655 ibu hamil	259 ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang diperiksa hepatitis tidak tercapai karena tidak semua ibu hamil mengakses Puskesmas dan stok reagen sempat kosong	Menguatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor, terutama dalam pencatatan dan pelaporan kasus	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	10 Kasus	51 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	36 Balita	52 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	1 Kasus	0 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	36 Balita	60 Balita	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan dan memanfaatkan posbindu di wilayah (jika ada keluhan baru berobat)	kerja sama dengan PJ wilayah dan promkes dalam pemberdayaan kader mandiri di kegiatan skrining,melakukan skrining di posbindu dan posyandu lansia.meningkatkan ketrampilan kader ,integrasi dengan program imunisasi dan jejaring.melibatkan semua nakes untuk entry aplikasi ASIK	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	1174 Balita	1284 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kedungkandang)	39 ibu hamil	92 ibu hamil			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kedungkandang)	9 Kasus	8 Kasus			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(keudkungandang)	174 Balita	115 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(keudkungandang)	4659 Orang	6604 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(keudkungandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(tribig)	58 Kader	0 Kader	1). Belum ada jadwal rutin yang disepakati dengan kader untuk PJB. 2). Belum terkep laporan refreshing kader dan dokumen hasil pelayanan penyakit menular dan tidak menular sd bulan desember ;	1). Perbaikan jadwal PJB bekerja sama dengan kader. 2). Meningkatkan koordinasi, pimpinan, petugas rekap dengan pelaksana	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(tribig)	500 Rumah tangga	333 Rumah tangga	1). Belum ada jadwal rutin yang disepakati dengan kader untuk PJB. 2). Belum terkep laporan refreshing kader dan dokumen hasil pelayanan penyakit menular dan tidak menular sd bulan desember ;	1). Perbaikan jadwal PJB bekerja sama dengan kader; 2). Meningkatkan koordinasi , pimpinan, petugas rekap dengan pelaksana	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(tribig)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(erjowinangun)	2714 anak sekolah	2448 anak sekolah	erdapat perbedaan antara jumlah proyekts bayi, baduta dan anak sekolah dengan jumlah ril	Melakukan monitoring serta evaluasi capaian	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(erjowinangun)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mulyorejo)	878 Balita	865 Balita	Jumlah balita yang ada lebih kecil dibandingkan proyekts balita	Melakukan monitoring serta evaluasi capaian	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mulyorejo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	755 Balita	654 Balita	Jumlah bayi baru lahir di wilker Ciptomulyo lbh kecil dibandingkan proyekts bayi di bawah 1 tahun	Melakukan monitoring serta evaluasi capaian bila memungkinkan akan dilakukan kunjungan rumah untuk meningkatkan capaian	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	402 Orang	903 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	444 Orang	551 Orang	Kunjungan lpa sedikit. Deteksi presuena yg menggunakan MTBS belum maksimal	Memaksimalkan screening deteksi dini dengan menggunakan MTBS	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	35478 Orang	22750 Orang	Kelurahan yg membuka posbindu hanya 1, 3 kelurahan lain membuka posbindu bersamas2 dengan pusyandu bayi	akan dilakukan sosialisasi dan motivasi kepada warga untuk mengunjungi Posbindu yang sudah ada	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	4 Orang	35 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	472 Balita	338 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	156 Balita	59 Balita	Kunjungan Ispa sedikit. Deteksi pneumonia yg menggunakan MTBS belum maksimal	Memaksimalkan skrining deteksi dini dengan menggunakan MTBS	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	100 Orang	24 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	4 Posbindu	4 Posbindu			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	751 Orang	60 Orang	Masy belum menyadari pentingnya pemeriksaan skrining ca cervix secara sukarela.	Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan dini secara rutin dan motivasi kepada WUS untuk rutin melakukan pemeriksaan	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	26 Sekolah	5 Sekolah	Masih ditemukan puntung rokok di bbrp sekolah. Misal tukang bangunan.	memotivasi pihak sekolah untuk menerapkan zona KTR di sekolah terhadap siapa pun	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	3324 bayi	3431 bayi			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(cisadea)	40 Orang	36 Orang	Masy belum menyadari pentingnya pemeriksaan pemantauan jenik secara sukarela.	Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan pemantauan jenik	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(cisadea)	30 Orang	51 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(cisadea)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(cisadea)	544 ibu hamil	480 ibu hamil			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(potowijen)	10 Kasus	24 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(potowijen)	20 Balita	57 Balita			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(polowijen)	10 Balita	140 Balita			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(polowijen)	1975 Orang	6865 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(polowijen)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	482 Orang	3776 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	991 ibu hamil	685 ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang diinfeksi hepatitis tidak tercapai karena tidak semua ibu hamil mengakses puskesmas dan stok reagen sempat kosong	Menguatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terutama dalam pencatatan dan pelaporan kasus	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	10 Kasus	28 Kasus			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	756 Balita	150 Balita	diare balita tidak tercapai karena pelaporan kasus dari kader belum berjalan optimal, hanya mencakup kunjungan dalam gedung	Menguatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terutama dalam pencatatan dan pelaporan kasus	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	563 Orang	1011 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	317 Orang	1170 Orang			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	20 Kasus	0 Kasus	pemeriksaan kusta baru tidak tercapai karena tidak ada penemuan kasus kusta baru	Menguatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terutama dalam pencatatan dan pelaporan kasus	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kedungkandang)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(gibbig)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(gibbig)	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(arifwinangun)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(arifwinangun)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(mulyorejo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(mulyorejo)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(cisadea)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(cisadea)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(cisadea)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kendalkerep)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kendalkerep)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kendalkerep)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(nandanwangi)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(nandanwangi)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(polowijen)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(polowijen)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(cisadea)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(cisadea)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	6 Puskesmas	0 Puskesmas	Belum ada Pedoman pelaksanaan Reakreditasi dari Kemenkes RI	Pelaksanaan Survey Akreditasi dialihkan menjadi kegiatan Pra Survey, agar pelaksanaan Survey Akreditasi pada tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar. Status Akreditasi Puskesmas sampai akhir tahun 2022 masih BERLAKU/DIAKUI.	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	24 Kasus	10 Kasus	1. pelacakan kasus KLB oleh petugas masih kurang aktif 2. pencatatan dan pelaporan masih belum maksimal.	1. peningkatan kapasitas petugas dan keaktifan petugas dalam penemuan kasus. 2. Monitoring dan evaluasi serta meningkatkan sistem validasi pencatatan dan pelaporan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	91 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11360 bayi	10344 bayi	Bayi pindah luar kota sebelum mendapatkan pelayanan KN3 dan pelayanan terlewat tinggi	Pelaksanaan Program Skrining Hipotroid Kongenital. Data bayi wajib masuk ke E-Kohort	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11360 bayi	10344 bayi	Bayi pindah luar kota sebelum mendapatkan pelayanan KN3 dan pelayanan terlewat tinggi	Pelaksanaan Program Skrining Hipotroid Kongenital. Data bayi wajib masuk ke E-Kohort	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir(Puskesmas Kedungkandang)	803 bayi	794 bayi	Belum semua bayi baru lahir diperiksa ke puskesmas dan mobilitas penduduk yang tinggi	Melakukan kunjungan pendampingan secara rutin oleh ibu hamil bersama kader	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir(Puskesmas Kedungkandang)	803 bayi	794 bayi	Belum semua bayi baru lahir diperiksa ke puskesmas dan mobilitas penduduk yang tinggi	Melakukan kunjungan pendampingan secara rutin oleh ibu hamil bersama kader	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir(Puskesmas Ciptomulyo)	10 bayi	38 bayi			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir(Puskesmas Ciptomulyo)	10 bayi	38 bayi			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	84,5 %			
				Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)Gibig	1 Orang	1 Orang			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	88 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11928 Orang	10500 Orang	Ibu bersalin di luar kota malang sehingga sulit untuk mendapatkan akses data pelayanan kesehatan yang telah didapat dan kurang terbiaya Rumah Sakit dalam pelaporan KIA baik manual maupun melalui aplikasi	Pelaporan Pelayanan KIA secara manual melalui email sehingga memudahkan Puskesmas untuk mitai ibu hamil di wilayah masing-masing.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11928 Orang	10500 Orang	Ibu bersalin di luar kota malang sehingga sulit untuk mendapatkan akses data pelayanan kesehatan yang telah didapat dan kurang terbiaya Rumah Sakit dalam pelaporan KIA baik manual maupun melalui aplikasi	Pelaporan Pelayanan KIA secara manual melalui email sehingga memudahkan Puskesmas untuk mitai ibu hamil di wilayah masing-masing	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(janti)	963 Orang	1090 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(janti)	963 Orang	1090 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(bareng)	592 Orang	374 Orang	1. Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah 2. Kesulitan mengakses hasil pelayanan kesehatan ibu bersalin di dokter spesialis.	1. Melaksanakan penggunaan e cohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas 2. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas sektor, jejaring dan jaringan di wilayah kerja dengan pencatatan dan pelaporan (e cohort)	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(bareng)	592 Orang	374 Orang	1. Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah 2. Kesulitan mengakses hasil pelayanan kesehatan ibu bersalin di dokter spesialis.	1. Melaksanakan penggunaan e cohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas 2. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas sektor, jejaring dan jaringan di wilayah kerja dengan pencatatan dan pelaporan (e cohort)	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(kedungkandang)	883 Orang	793 Orang	Belum semua bumil yang ditemukan dari laporan faskes swasta dapat dipantau, mobilitas penduduk yang tinggi	kunjungan pendampingan secara rutin oleh bivi bersama kader pendamping	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(kedungkandang)	883 Orang	793 Orang	Belum semua bumil yang ditemukan dari laporan faskes swasta dapat dipantau, mobilitas penduduk yang tinggi	kunjungan pendampingan secara rutin oleh bivi bersama kader pendamping	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(polowijen)	525 Orang	482 Orang	Bumil yg ditemukan Belum waktunya bersalin, Pelaporan dan swasta belum terakomodir dengan tenib	Validasi Bumil yang sudah memasuki tanggal tafsiran persalinan, penitiban laporan dr faskes swasta, memaksimalkan capor, menambahkan no HP pada laporan kunjungan pasien,	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(polowijen)	525 Orang	482 Orang	Bumil yg ditemukan Belum waktunya bersalin, Pelaporan dan swasta belum terakomodir dengan tenib	Validasi Bumil yang sudah memasuki tanggal tafsiran persalinan, penitiban laporan dr faskes swasta, memaksimalkan capor, menambahkan no HP pada laporan kunjungan pasien,	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	85.2 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12946 Orang	11032 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12846 Orang	11032 Orang	Ibu hamil melakukan ANC di berbagai tempat sehingga akumulasi kunjungan terputus dan Kurang terlayannya Rumah Sakit dalam pelaporan KIA baik manual maupun melalui aplikasi	Mobile ANC plus (melakukan pelayanan ANC mobile untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari Puskesmas dan Pelayanan ANC Terpadu di Fasilitas Kesehatan.		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Janti)	1008 Orang	1143 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Janti)	1008 Orang	1143 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinoyo)	854 Orang	854 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinoyo)	854 Orang	854 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Mojolangu)	800 Orang	791 Orang	Ibu hamil melakukan ANC di berbagai tempat sehingga akumulasi kunjungan terputus	Mobile ANC plus (melakukan pelayanan ANC mobile untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari Puskesmas		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Mojolangu)	800 Orang	791 Orang	Ibu hamil melakukan ANC di berbagai tempat sehingga akumulasi kunjungan terputus	Mobile ANC plus (melakukan pelayanan ANC mobile untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari Puskesmas		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kendalsari)	838 Orang	1261 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kendalsari)	838 Orang	1261 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Arjuno)	530 Orang	396 Orang	Bumil yang ditemukan utamanya dari faskes swasta tidak tertib dilaporkan	Melakukan komunikasi dengan faskes swasta sehingga diharapkan faskes swasta lebih tertib		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Arjuno)	530 Orang	396 Orang	Bumil yang ditemukan utamanya dari faskes swasta tidak tertib dilaporkan	Melakukan komunikasi dengan faskes swasta sehingga diharapkan faskes swasta lebih tertib		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Rampa/Celaket)	339 Orang	303 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran	Pelayanan ANC terpadu di fasilitas kesehatan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Rampa/Celaket)	339 Orang	303 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran	Pelayanan ANC terpadu di fasilitas kesehatan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bareng)	625 Orang	407 Orang	1. Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah. 2. Kesulitan mengakses hasil pelayanan kesehatan ibu hamil di dokter spesialis. 3. Kurangnya kerjasama dengan jejaring dan jaringan di wilayah kerja	1. Melaksanakan penggunaan e cohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas. 2. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam menjangkau sasaran. 3. Meningkatkan kerjasama dengan jejaring dan jaringan di wilayah kerja dengan pencatatan dan pelaporan (e cohort)		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bareng)	625 Orang	407 Orang	1. Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah. 2. Kesulitan mengakses hasil pelayanan kesehatan ibu hamil di dokter spesialis. 3. Kurangnya kerjasama dengan jejaring dan jaringan di wilayah kerja	1. Melaksanakan penggunaan e cohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas. 2. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam menjangkau sasaran. 3. Meningkatkan kerjasama dengan jejaring dan jaringan di wilayah kerja dengan pencatatan dan pelaporan (e cohort)		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kedungkidang)	843 Orang	837 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran	Pelayanan ANC terpadu di Fasilitas Kesehatan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kedungkidang)	843 Orang	837 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran	Pelayanan ANC terpadu di Fasilitas Kesehatan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Gribig)	1276 Orang	1080 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran	Pelayanan ANC terpadu di Fasilitas Kesehatan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Gribig)	1276 Orang	1080 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran	Pelayanan ANC terpadu di Fasilitas Kesehatan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Atjowanarun)	853 Orang	837 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran	Pelayanan ANC terpadu di Fasilitas Kesehatan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Atjowanarun)	853 Orang	837 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak yang ada di sasaran (sasaran terlewat tinggi)	Pelayanan ANC terpadu di Fasilitas Kesehatan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Muljorejo)	864 Orang	1018 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Muljorejo)	864 Orang	1018 Orang				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Ciptomulyo)	978 Orang	795 Orang	Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah	Melaksanakan penggunaan e cohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Ciptomulyo)	978 Orang	795 Orang	Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah	Melaksanakan penggunaan e cohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas		

No	Usuran Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kendalkerep)	954 Orang	933 Orang	Ibu hamil melakukan ANC di berbagai tempat sehingga akumulasi kunjungan terputus	Pelaksanaan sosialisasi E-Kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara real time	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kendalkerep)	954 Orang	933 Orang	Ibu hamil melakukan ANC di beberapa tempat, sehingga akumulasi kunjungan terputus.	Memaksimalkan penggunaan e-kohort sebagai platform pencatatan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak secara real time	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Pandanwangi)	663 Orang	664 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bandarwerdig)	663 Orang	664 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Polowijen)	535 Orang	549 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Polowijen)	535 Orang	549 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Cisadea)	519 Orang	434 Orang	Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah	Melaksanakan penggunaan e kohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Cisadea)	519 Orang	434 Orang	Mobilitas tinggi, banyak KTP dalam wilayah tapi domisili luar wilayah	Melaksanakan penggunaan e kohort bagi bidan dan lintas program secara optimal di Puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Jantli)	5 MEDIA	6 MEDIA			
				Pelayanan Promosi Kesehatan	16 Puskesmas	16 Puskesmas			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	3 Dokumen	Terjadi kesalahan pelaporan, seharusnya 12 dokumen tertulis 3 dokumen karena persepsi di laporan hanya tribulan 4 bukan akumulasi sampai dengan tribulan 4	Melampirkan laporan Tribulan 1 sd 4	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dinoyo)	3 MEDIA	3 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Jantli)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Pelayanan Promosi Kesehatan (Jantli)	5 MEDIA	5 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dinoyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dinoyo)	2 MEDIA	2 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Jantli)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Jantli)	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendalsari)	7 MEDIA	7 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendalsari)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(terjuno)	23 Institusi Pendidikan	23 Institusi Pendidikan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(terjuno)	4 Kelurahan Siaga	4 Kelurahan Siaga			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(terjuno)	4 Pondok pesantren	4 Pondok pesantren			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(terjuno)	1849 Rumah tangga	1849 Rumah tangga			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(terjuno)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(terjuno)	2 MEDIA	4 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(rampalcalaket)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(rampalcalaket)	43 UKBM	47 UKBM			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(bareng)	2 MEDIA	2 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kedungkandang)	9 Kegiatan	3 Kegiatan	Masih ada rumah tangga yang merokok mengakibatkan belum tercapainya PHBS RT, form survey tidak semua terisi dan waktu terbatas	Memperbanyak penyuluhan PHBS RT terutama difokuskan pada UBM (Upaya Bermanfaat Merokok), memperpanjang masa survey	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(tribig)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(tribig)	5 MEDIA	5 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(owinangun)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(owinangun)	3 MEDIA	3 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(mulyorejo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(mulyorejo)					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(ciptomulyo)	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendakerp)	272 Orang	329 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendakerp)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendakerp)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendakerp)	272 Orang	329 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendakerp)	560 Orang	1273 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(pandanwangi)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(pandanwangi)	3 MEDIA	3 MEDIA			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(colewiler)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(polewiler)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(gisadesa)	380 Orang	3732 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(gisadesa)	100 %	80,1 %			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18600 Orang	14907 Orang	PPKM masih berlaku sehingga terdapat beberapa langkhan yang belum bisa dilakukan seperti mobile klinik	Membuka layanan baru, validasi data, mentoring dan on the job training untuk layanan baru	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	111,2 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17010 Orang	18918 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(ciptomulyo)	70 Orang	57 Orang	Pencatatan dan pelaporan yang kurang maksimal	Melakukan pembenahan dalam pencatatan dan pelaporan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (iptomulyo)	70 Orang	57 Orang	Pencatatan dan pelaporan yang kurang maksimal	Melakukan pembenahan dalam pencatatan dan pelaporan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (cisadea)	16 Orang	28 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (cisadea)	123 Orang	304 Orang			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	52,8 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110748 Orang	58564 Orang	BMHP untuk pemeriksaan lansia tidak sebanding dengan target lansia	Menambah BMHP sesuai dengan target	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskemas gribig)	10885 Orang	5738 Orang	Belum mampu menjangkau seluruh lansia dan keterbatasan bahan pemeriksaan laborat	Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan jejaring, pengurusan bahan laborat	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskemas gribig)	10885 Orang	5738 Orang	Belum mampu menjangkau seluruh lansia dan keterbatasan bahan pemeriksaan laborat	Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan jejaring, pengurusan bahan laborat	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	82,6 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98532 Orang	81438 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (rampalcelaket)	2533 Orang	4496 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (rampalcelaket)	2533 Orang	4496 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (kedungkandang)	5905 Anak	5905 Anak			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (kedungkandang)	5905 Orang	5905 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (mulyorejo)	9149 Anak	9149 Anak			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (mulyorejo)	9149 Orang	9149 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (ciptomulyo)	45 Anak	45 Anak			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (ciptomulyo)	45 Orang	45 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (cisadea)	5303 Orang	3381 Orang	Karena masih Pandemi Pelaksanaan Skrening anak Sekolah dg Google Form, kendalanya Siswa byk yg tdk mengisi google Form.	Dilakukan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar Secara langsung ke Sekolah, Peran serta Diknaas di setiap kegiatan yg dilakukan di Sekolah.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (cisadea)	5303 Orang	3381 Orang	Karena masih Pandemi Pelaksanaan Skrening anak Sekolah dg Google Form, kendalanya Siswa byk yg tdk mengisi google Form.	Dilakukan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar Secara langsung ke Sekolah, Peran serta Diknaas di setiap kegiatan yg dilakukan di Sekolah.	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	70.4 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	606244 Orang	427223 Orang	1. Situasi pandemi covid 19, menyebabkan posbindu tutup dan aktifitas masyarakat terbatas, 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting deteksi dini kesehatan penyakit tidak menular, 3. Kurang masifnya edukasi dan promosi kesehatan di petugas kepada masyarakat, 4. Kurang aktif petugas dalam menjangkau masyarakat dalam kegiatan skrining kesehatan penyakit tidak menular.	1. memberikan edukasi kepada kader dan masyarakat untuk tetap melaksanakan posbindu dengan menerapkan proses ketat 2. meningkatkan volume promosi kepada masyarakat di berbagai media tentang pentingnya deteksi dini PTM, 3. kegiatan posbindu diperluas ke beberapa tempat / fasilitas umum lainnya. 4. kerjasama dg faskes swasta untuk melakukan deteksi dini pada masyarakat terutama pada peserta JKN di faskes dan melakukan jemput bola pelayanan skrining kesehatan PTM di berbagai tempat.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraha	32 kelompok	32 kelompok			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraha	16 Puskesmas	16 Puskesmas			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraha	300 Orang	330 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraha	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(lanti)	30 Orang	50 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(lanjut)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kendalsari)	350 Orang	350 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kendalsari)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kedungkandang)	10 kelompok	1 kelompok	salah tulis di target kelompok, harusnya 1 kelompok tertulis 10 kelompok,angka 39 orang pada realisasi adalah jumlah peserta dalam 1 kelompok, bukan peserta binaan k3, adapun jumlah peserta binaan k3 yaitu 64 orang (belum tercantum pada realisasi).	Lebih teliti lagi dalam penulisan target dan realisasi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kedungkandang)	66 Orang	39 Orang	salah tulis di target kelompok, harusnya 1 kelompok tertulis 10 kelompok,angka 39 orang pada realisasi adalah jumlah peserta dalam 1 kelompok, bukan peserta binaan k3, adapun jumlah peserta binaan k3 yaitu 64 orang (belum tercantum pada realisasi).	Lebih teliti lagi dalam penulisan target dan realisasi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kedungkandang)	70 Orang	288 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kedungkandang)	1 kelompok	1 kelompok			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(gribig)	40 Orang	40 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(gribig)	142 Orang	182 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(gribig)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(gribig)	62 Orang	106 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(polowijen)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(polowijen)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(cisadea)	40 Orang	40 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(cisadea)					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (sisadea)	40 Orang	40 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Orang	80 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300 Orang	252 Orang	Terjadi kesalahan pelaporan	Melakukan validasi pelaporan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38 Dokumen	0 Dokumen	Terjadi kesalahan pelaporan	Melakukan validasi pelaporan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (diprovo)	5 Kelurahan	5 Kelurahan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (diprovo)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (diprovo)	91 TPM	76 TPM			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (mopolang)	4 Kelurahan	4 Kelurahan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (mopolang)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (mopolang)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (kendalsari)	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (kendalsari)	117 SARANA	76 SARANA	Banyak TTU TPM yang buka tutup pasca pandemi	Perbaikan data sasaran TTU TPM	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (rampalcelaket)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (rampalcelaket)	30 TPM	28 TPM			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (gribig)	4 Kelurahan	0 Kelurahan	1). Banyak TPP yang buka tutup pasca pandemi; 2). belum terekap laporan realisasi money program kesling dan dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesling sampai desember,	1). Perbaikan data sasaran TPP, 2). Meningkatkan koordinasi, pimpinan, petugas rekap dengan pelaksana	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (gribig)	4 Dokumen	0 Dokumen	1). Banyak TPP yang buka tutup pasca pandemi; 2). belum terekap laporan realisasi money program kesling dan dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesling sampai desember,	1). Perbaikan data sasaran TPP, 2). Meningkatkan koordinasi, pimpinan, petugas rekap dengan pelaksana	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (arlowinangun)	4 Kelurahan	4 Kelurahan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (perawatan/gun) Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (mulyarejo)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (mulyarejo)	67 TPM	51 TPM			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (paandanwangi)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (paandanwangi)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (paandanwangi)	168 SUMBER AIR BERSIH	168 SUMBER AIR BERSIH			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (polowijen)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (polowijen)	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (polowijen)	75 Orang	70 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (cisadea)	2 Kelurahan	2 Kelurahan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (cisadea)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (cisadea)	42 laporan	51 laporan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (mojolangu)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1415 Orang	1155 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1415 Orang	1155 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1500 Kall	1406 Kall			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61 FKTP	61 FKTP			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	305000 Orang	369376 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	222 Orang	252 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(janti)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(janti)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(janti)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(dinoyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(dinoyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(keindsalsari)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(keindsalsari)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(moglangu)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(moglangu)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(atunol)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(atunol)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(rampalceket)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(rampalceket)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(bareng)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kedungkandang)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 %	108 %			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22227 Orang	24181 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pendertia Diabetes Mellitus	1172 Kasus	1128 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)dinoyo					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Jidneyo	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Mojojangu	644 Kasus	129 Kasus	Kasus Covid-19 menurun pada semester 2 tahun 2022	Tetap melakukan pemantauan kasus Covid harian dan KLB pada tahun 2023	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Mojojangu	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Kendalsari	108 Kasus	899 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Kendalsari	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Jarjuno	300 Kasus	625 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Jarjuno	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Pampalcelaket	100 Kasus	547 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Pampalcelaket	12 Dokumen	2 Dokumen	Terdapat kesalahan entry ke dalam aplikasi e-klpi, harusnya realisasi 12 dokumen ter-entry 2 dokumen	Akan lebih cermat dalam melakukan entry aplikasi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)bareng	60 Kasus	456 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)bareng	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)kedungkidang	314 Kasus	466 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)kedungkidang	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)gritbig	2160 Kasus	1776 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)gritbig	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)arjowinangun	0 Kasus	1 Kasus	Kasus Covid-19 menurun pada semester 2 tahun 2022	Tetap melakukan pemantauan kasus Covid harian dan KLB pada tahun 2023	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)arjowinangun	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)muljorejo	43 Kasus	43 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)muljorejo	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)ciptomulyo	1250 Kasus	964 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)ciptomulyo	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)kendakerap	2255 Kasus	1117 Kasus			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Hendakkerap	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pandanwangi	300 Kasus	1065 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pandanwangi	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Polowijen	300 Kasus	1108 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Polowijen	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sisadea	520 Kasus	2626 Kasus			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sisadea	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,6 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228720 Orang	127373 Orang	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting deteksi dini kesehatan penyakit tidak menular dan tindak lanjut pengobatan hipertensi agar tetap terkontrol dan b) Kurang masifnya edukasi dan promosi kesehatan dari petugas	1. meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat di berbagai media tentang pentingnya penanganan hipertensi agar terkontrol dan tidak menyebabkan meningkat faktor risiko penyakit yang lain, 2. meningkatkan kinerja petugas dalam mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan penyakit hipertensi, 3. meningkatkan kerjasama dengan jejaring faskes terutama dalam pelayanan dan pelaporan.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4000 Kasus	16431 Kasus			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jantri Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jantri Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen 10 Kasus 12 Dokumen 100 %	13 Dokumen 108 Kasus 12 Dokumen 100 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RSUD)	26 FKTL 13 Jenis	26 FKTL 13 Jenis			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kevenangan Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	100 % 100 % 1 Puskesmas	0 % 100 % 0 Puskesmas		Anggaran pekerjaan fisik konstruksi dialihkan ke kegiatan lain	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18 % 100 % 6500 Balita	9.30 % 84.54 % 3515 Balita			
								Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan perilaku sebaiknya, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5000 Balita	3319 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita underweight yang ditemukan kinerja semakin baik	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2500 Balita	2032 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita wasting yang ditemukan kinerja semakin baik	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Balita	0 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1000 Orang	1618 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	500 Orang	846 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14185 paket	14185 paket			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16 Dokumen	16 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(janti)	300 Balita	203 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(lanti)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(lanti)	333 Balita	350 Balita	Ada kesalahan perhitungan dalam perhitungan akumulasi perbulan	Memperbaiki pencatatan laporan capaian perbulan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(dirovo)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(midianggu)	525 Balita	837 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(mogilangu)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(kendalsari)	908 Balita	138 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(kendalsari)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(enjuno)	387 Balita	124 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(berjuga)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(rampalcalakel)	90 Balita	90 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(rampalcalakel)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(bareng)	241 Balita	155 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(kandung)	300 Balita	300 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(kandung)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(tribing)	450 Balita	146 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(tribing)	14 Dokumen	12 Dokumen	Kurang teliti saat pengisian target ril dan proyeksi	Lebih teliti lagi saat pengisian target	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(tribing)	2498 Balita	3817 Balita	Kurang teliti saat pengisian target ril dan proyeksi	Lebih teliti lagi saat pengisian target	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(tribing)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(mulyorejo)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(mulyorejo)	496 Balita	974 Balita	Masih ditemukan ibu hamil KEK dan anemia, Masih ada ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif, Kurang pengetahuan ibu tentang pemberian MPASI	Pendampingan ibu hamil oleh kader dan petugas Puskesmas (membuat Grup WA ibu hamil); Meningkatkan penyuluhan tentang ASI Eksklusif di posyandu dan di poli gizi; Penyuluhan tentang PMBA di posyandu dan di poli gizi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(ciptomulyo)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(ciptomulyo)	265 Balita	265 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(ciptomulyo)	300 Balita	256 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan berlaku sebaliknya, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(kendalikerap)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(pandanwangi)	689 Balita	686 Balita			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(pandanwangi)	120 ibu hamil	49 ibu hamil			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(pandanwangi)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(powojien)	228 Balita	153 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan perilaku sebalikny, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(cisadea)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(powojien)	515 Balita	127 Balita	Semakin tinggi capaian, kinerja semakin rendah dan perilaku sebalikny, semakin rendah balita stunting yang ditemukan kinerja semakin baik		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(cisadea)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kevenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61 paket	61 paket			
				Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	2 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18 Jenis	18 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39 Item	39 Item			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	94 Unit	82 Unit	Penyedia tidak mampu menyediakan alat sesuai dengan pesanan sebanyak 17 tetapi hanya mampu menyediakan 5 unit	Hanya mencairkan barang yg mampu disediakan oleh penyedia sebanyak 5 unit	
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 Jenis	5 Jenis	Terdapat penyedia barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan/ di e-catalog tidak ada	Dianggarkan ulang di tahun 2024 dengan dana APBD	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 Unit	14 Unit	Terdapat penyedia barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan/ di e-catalog tidak ada	Dianggarkan ulang di tahun 2024	
				Sub Kegiatan Pengadaan Obat Vaksin	143 Item	138 Item			
				Sub Kegiatan Pengadaan Obat Vaksin	4 paket	4 paket			
				Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	52 Item	50 Item			
				Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17 Item	17 Item			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	168 Item	168 Item			
				Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	16 Puskesmas	16 Puskesmas			
				Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	16 paket	16 paket			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	85.2 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	76 Orang	76 Orang			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	70.47 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (bareng)	52 laporan	52 laporan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (kedungkandang)	42 laporan	47 laporan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (di rawan gunung)	47 laporan	218 laporan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (di rawan gunung)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (pandanwangi)	28200 Orang	13509 Orang	Screening sudah dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung, tetapi untuk screening luar gedung orangnya yang datang tetap. Dikarenakan banyak yang bekerja dan sekolah	Meningkatkan promotif, membuat jadwal posbuku luar gedung, meminta dukungan Kepala Puskesmas untuk melakukan screening PTM, bekerjasama dengan lintas program lain dan kader	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (pandanwangi)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	89 %	97 %			
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	92 %	92 %			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(janti)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(janti)	4 Orang	4 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(dinoyo)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(dinoyo)	3 Orang	3 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(mololangau)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(mololangau)	3 Orang	3 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(kendalsari)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(kendalsari)	2 Orang	2 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(arjuno)	1 Orang	1 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(arjuno)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(rampalcalaket)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(sambalaket)	1 Orang	1 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(bareng)	4 Orang	4 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(bareng)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(kedungandang)	3 Orang	3 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(kedungandang)	12 Bulan	12 Bulan	Realisasi sudah sesuai target	Realisasi sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(gribig)	3 Orang	3 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(gribig)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(arjwinangun)	2 Orang	2 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(arjwinangun)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(mulorejo)	2 Orang	2 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(mulorejo)	12 Bulan	12 Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Ciptomuljo)	4 Orang	4 Orang			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Ciptomuljo)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Kendakerap)	4 Orang	4 Orang			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Kendakerap)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Polowien)	1 Orang	1 Orang			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Pandanwangi)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Pandanwangi)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Polowien)	2 Orang	2 Orang			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Polowien)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penuhuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar(Cisadaba)	3 Orang	3 Orang			
				Sub Kegiatan Penuhuan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22 Orang	41 Orang			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	80 %	98 %			
				Kegiatan Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optik Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 %	97 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optik Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Orang	185 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	240 SARANA 50 SARANA 50 SARANA 12 %	240 SARANA 78 SARANA 78 SARANA 6.17 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	180 Peserta	440 Peserta	Jumlah IRT di Kota Malang perumbuhannya sangat pesat utk periode tahun 2022 sebanyak 309 pemohon Ijin IRT baru, dengan masa berlaku Ijin IRT selama 5 tahun. Sehingga meskipun capaian pengawasannya melebihi target yg telah ditetapkan, tercapai 309 sarana yg di bina dan diawasi, dari target sebesar 180 sarana, tetapi persentase sarana IRTP yg dibina dan diawasi masih rendah oleh karena jumlah keseluruhan IRTP yg ada di Kota Malang (sebagai pembagi atau denominator) juga bertambah signifikan. Jumlah sarana IRTP sampai dg tahun 2022 sebanyak 4.061, sarana	Dengan keterbatasan tenaga DFI (inspektur pengawas pangan daerah) yang dimiliki, Dinas Kesehatan lebih mengutamakan untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring lebih diutamakan untuk pemohon Ijin IRT baru dan pembagi (denominator) nya adalah jumlah pemohon baru yg telah mendapatkan Ijin IRT dari Dinasaker, PMP/TSP, yg sejak tahun 2020, telah didelagasikan kepada Dinasaker PMP/TSP oleh Kepala Daerah (Wali kota).	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	180 SARANA	204 SARANA	Jumlah IRT di Kota Malang pertumbuhannya sangat pesat, untuk periode tahun 2022 sebanyak 309 pemohon IRT baru, dengan masa berlaku IRT selama 5 tahun. Sehingga meskipun capaian pengawasannya melebihi target yg telah ditetapkan, tercapai 309 sarana yg di bina dan diawasi, dari target persentase sarana IRTP yg dibina sebesar 180 sarana tetapi dan diawasi masih rendah oleh karena jumlah keseluruhan IRTP yg ada di Kota Malang (sebagai pembagi atau denominator) juga bertambah signifikan. Jumlah sarana IRTP sampai dg tahun 2022 sebanyak 4.061, sarana	Dengan keterbatasan tenaga DFI (inspektor pengawas pangan daerah) yang dimiliki, Dinas Kesehatan lebih mengutamakan untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring lebih diutamakan untuk pemohon IRT baru dan pembagi (denominator) nya adalah jumlah pemohon baru yg telah mendapatkan IRT baru dari Disnaker PMPTSP, yg sejak tahun 2020 telah didelegasikan kepada Disnaker PMPTSP oleh Kepala Daerah (Wakilkota).	
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	65 %	68 %			
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	41 Sampel	41 Sampel			
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	41 Unit	41 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(RSUD)					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(janti)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(dinoyo)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(molilangu)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(kendalsari)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(saturo)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(rampalcajaket)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(bateng)	12 %	12 %			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(kedungkandang)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(ontlig)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(airwangan)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(mulyorejo)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(gptomulyo)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(kendakerap)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(pandanwarugi)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(polowijen)	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(gisadea)	100 %	100 %			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang	771 Orang	Terdapat tiga jabatan yang kosong, formasi PNS dan 137 pegawai teralokasi 104 pegawai, sedangkan formasi P3K dari 105 pegawai teralokasi 96 pegawai, terdapat pegawai meninggal sebanyak 3 orang, pensiun 26 orang, mutasi keluar 1 orang, terdapat formasi yang tidak terisi untuk P3K 26 orang sedangkan sudah terlanjur dianggarkan	Sering melakukan update data kepegawaian dan rasionalisasi perhitungan gaji dan tunjangan	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Unit	2 Unit			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Item	7 Item	ada kekeliruan dalam penulisan laporan realisasi	akan lebih teliti dalam penulisan laporan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49 Item	49 Item			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 Item	13 Item			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27 Item	27 Item			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Surat Kabar	2 Surat Kabar			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	892 Orang	892 Orang			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28032 Kotak	22638 Kotak			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16 Item	16 Item			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blaya	28 Unit	16 Unit	efisiensi pemeliharaan kendaraan roda 2	akan lebih cermat dalam merencanakan	
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 Unit	15 Unit	menyesuaikan dengan pajak kendaraan yang sudah habis	untuk selanjutnya akan kami perhitungkan lebih terperinci	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Item	50 Item			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 %	93 %			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 Orang	2 Orang	menyesuaikan dengan undang-undang dan kebutuhan	untuk selanjutnya akan kami perhitungkan lebih terperinci	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200 Orang	200 Orang	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39 Dokumen	69 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	50 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang	116 Orang	Terdapat pegawai yang mutasi ke Perangkat Daerah lain, sehingga dunia dan puma tugas	Menyesuaikan target tahun	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Berkas	1846 Berkas	Terdapat 349 berkas yang tidak selesai diverifikasi sehingga gagal cair	Mengajukan alokasi anggaran pada Tahun 2023	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterian SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85 %	94,97 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Lokasi	2 Lokasi	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	921000 Liter	921000 Liter	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32 Kendaraan	32 Kendaraan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	60 Kendaraan	60 Kendaraan			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Jenis	11 Jenis			
				Kegiatan/Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20 %	90 %			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENIKOTA	81,4 -	80,86 -			
				Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	62 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Jenis	22 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53 Jenis	53 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	26 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13733 Kotak	15108 Kotak			
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7080 Kotak	6530 Kotak	Penyediaan mainin menyesuaikan jumlah Kehadiran tamu menyesuaikan RKBU		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Kali	46 Kali			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menuntut	10000 Surat	8430 Surat	Jumlah surat yang diproses menyesuaikan kebutuhan	Perencanaan akan menyesuaikan RKBU	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48 Tagihan	48 Tagihan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Jenis	23 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6604 m2	6604 m2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95 % 30 Ha	97,96 % 109,26 Ha			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8 Lokasi	8 Lokasi	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pemanan Pamar pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47,45 % 630 m3	50,50 % 630 m3			
				Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	25 Titik	36 Titik	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	94,01 % 1466 SR	95,69 % 1466 SR			
				Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1466 SR	600 SR	Anggaran hanya cukup untuk 600 SR	Menyesuaikan target tahun selanjutnya sesuai kebutuhan	
				Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	50 Orang	57 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	400 SR	400 SR	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	85 % 5 Tangki Septik	85,36 % 7793 Tangki Septik			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	11 Lokasi	7 Lokasi	Anggaran hanya cukup untuk 7 lokasi	Menyesuaikan target tahun selanjutnya sesuai kebutuhan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	400 SR	400 SR	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5 Lokasi	7 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	120 SR	225 SR	-	-	
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	500 Orang	700 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelermbagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100 Peserta	220 Peserta	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3 Lokasi	6 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	350 SR	473 SR	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	250 Kali	191 Kali	Dengan berlakunya Tarif baru Penyedotan Kaku sesuai Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum menyebabkan masyarakat memilih penyedia atau vendor dengan tarif bersaing.	Meningkatkan promosi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang berkelanjutan	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	3500 Tangki Septik	4871 Tangki Septik	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2 Lokasi	0 Lokasi	Pekerjaan pembangunan tangki septik bergeser ke sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Menyesuaikan target tahun selanjutnya sesuai kebutuhan	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1200 SR	1200 SR	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Lokasi	2 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3500 Kali	4871 Kali	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	84,01 %	85,32 %			
				Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Km	16,30 Km			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Plan pada Kawasan Genangan	55 Dokumen	55 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	10 Lokasi	10 Lokasi			
				Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	7 Km	11,27415 Km			
				Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	15 Titik	15 Titik			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2 Km	4,639 Km			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	10 Titik	3 Titik	Menyesuaikan hasil survei teknis di lapangan	Menyesuaikan target tahun selanjutnya sesuai kebutuhan	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	75,00 %	99,27 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	59 Lokasi	60 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	36 Lokasi	36 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25 Lokasi	24 Lokasi	Menyesuaikan hasil survey lapangan	Meningkatkan capaian di tahun selanjutnya	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	47,50 %	14,83 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	59 Lokasi	60 Lokasi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	36 Lokasi	36 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25 Lokasi	24 Lokasi	Menyesuaikan hasil survei lapangan	Meningkatkan capaian di tahun selanjutnya	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100 %	92,50 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	19 gedung	19 gedung			
				Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11 Dokumen	11 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemantauan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0 Data	0 Data	Kegiatan tidak dilaksanakan karena data bangunan gedung sudah tereskap pada aplikasi SIMBG	Tidak mengulangi sub kegiatan	
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	14 gedung	14 gedung			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsua Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 gedung	12 gedung			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 pelaksanaan	6 pelaksanaan			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	94,93 %	94,07 %			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19 gedung	19 gedung			
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen			
				Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
				Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemantauan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	0 Data	0 Data	Kegiatan tidak dilaksanakan karena data bangunan gedung sudah terakap pada aplikasi SIMBG	Tidak melakukan sub kegiatan dimaksud pada Renja Tahun 2024	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14 gedung	14 gedung		-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 gedung	12 gedung		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	6 pelaksanaan	15 pelaksanaan		-	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7 %	2,75 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100 m2	100 m2			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2550 m2	4803,36 m2			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	94,46 %	98,15 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	28 Lokasi	43 Lokasi			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	32 Dokumen	32 Dokumen			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	29 Km	34 Km			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkalat Jalan	85 Kali	36 Kali		Realisasi menyesuaikan permohonan pelayanan pengujian konstruksi yang masuk	Melaksanakan sosialisasi layanan pengujian konstruksi; Meningkatkan fasilitas layanan pengujian konstruksi;
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	29 Km	28,9 Km		Menyesuaikan survey teknis lapangan	Melaksanakan sosialisasi layanan pengujian konstruksi; Meningkatkan fasilitas layanan pengujian konstruksi; Meningkatkan capaian di tahun selanjutnya

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	93,14 %	99,63 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	0 Lokasi	0 Lokasi	Relokusing prioritas anggaran	Mengajukan alokasi anggaran pada Renja Tahun 2024	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	0 Lokasi	0 Lokasi	Relokusing prioritas anggaran	Mengajukan alokasi anggaran pada Renja Tahun 2024	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	93,65 %	94,60 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	28 Lokasi	26 Lokasi			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	32 Dokumen	32 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	3 Lokasi	3 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	6 Lokasi	3 Lokasi	Jumlah realisasi menyesuaikan hasil survey teknis lapangan	Menyesuaikan target tahun selanjutnya sesuai kebutuhan	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	15 Lokasi	20 Lokasi			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63,53 %	63,95 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4200 Titik	1087 Titik			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	547 Titik	547 Titik			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	2250 Titik	2250 Titik			
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	89 %	104,04 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20 Orang	20 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20 Orang	20 Orang			
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	75 Peserta	81 Peserta			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	80 Orang	81 Orang			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	87 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemantapan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4 Lokasi	4 Lokasi			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Lokasi	4 Lokasi			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	87 %	100 %			
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	1 Materi Teknis	4 Materi Teknis			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	120 Orang	120 Orang			
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100000 m2	100000 m2			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4 %	0,73 %			
				Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	0 %			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	250 Peserta	300 Peserta	-	-	
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	288 Unit	288 Unit			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Pemantapan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	288 Unit	288 Unit	-	-	
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	72,13 %	93,08 %			
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha	65 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	60 Peserta	0 Peserta	Tidak ada kegiatan terkait pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Tahun berikutnya tidak ada kegiatan Sosialisasi terkait Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	64,76 %	42,70 %			
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	70 PSU	41 PSU			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	70 PSU	41 PSU	Belum semua pengembang perumahan melakukan penyerahan PSU-nya	Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pengembang di Kota Malang.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	5	2	3	4	5	6	7	8	10
5	Ketentrangan, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Dasar Hukum : 1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, 3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	72 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 6 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen	83 % 6 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pevediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80 % 200 Orang	80 % 113 Orang		SKP akan dilaksanakan ditahun berikutnya dengan menggunakan APBD murni.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 240 STEL	225 % 240 STEL		Meneleapkan target sesuai jumlah namun yang diterima hanya 31 orang CPNS, dan dikarenakan terdapat prns yang purna tugas, sehingga total prns hanya 113 orang.	
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	240 STEL	240 STEL			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 ASN	35 ASN			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	82 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	4 Jenis	4 jenis komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor sudah memenuhi kebutuhan.	menelempakan target sesuai dengan kebutuhan.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Jenis	24 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Salah Ketik	sudah dibetulkan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	4 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1006 Exemplar	1518 Exemplar			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15000 Kotak	9344 Kotak			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Kali	35 Kali	Perjalanan dinas dalam 1 (satu) Tahun hanya dilaksanakan 35 kali dari target 48 kali.	menelempakan target dengan sesuai dari target 48 kali.	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	122 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27 Unit	33 Unit			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	130 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400 Surat	4539 Surat			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600 m2	600 m2			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	79 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Belaya	53 Unit	53 Unit			
				Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 gedung	1 gedung			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	9 Unit	keterbatasan waktu untuk melakukan pemeliharaan peralatan kantor secara keseluruhan sesuai target.	mengoptimalkan waktu agar pemeliharaan peralatan kantor dapat dilakukan sesuai target.	
				PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3 Angka	3 Angka			
				Kegiatan Penanganan Gangguan Kelembagaan dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	296 %			
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	1551 Kali	4591 Kali			
				Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan dalam Kelembagaan dan Kelembagaan Umum.	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
				PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	148 %			
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15 perda/perwal	15 perda/perwal			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1500 Kali	3066 Kali			
				Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Kali	11 Kali		sidang yustisi tidak dilaksanakan 1 kali pada saat bulan ramadhan.	menevapkan target lebih maksimal.
				PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2 Angka	2 Angka			
				Kegiatan Penanganan Gangguan Kelembagaan dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	28.5 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Kelembagaan dan Kelembagaan Umum	1285 Peserta	707 Peserta		terdapat rasionalisasi anggaran anggaran sesuai Perpres 33 Tahun 2022.	Penyesuaian perencanaan anggaran sesuai Perpres 33 Tahun 2022.

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pemongroja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	3100 anggota	57 anggota	target 3100 adalah target ketika anggaran pembinaan anggota Satlinmas masih ada di Satpol PP, ketika anggaran pembinaan sudah dialihkan ke Kelurahan, realisasinya anggota Satlinmas yang mendapatkan pembinaan berjumlah 57 orang. Pernah diadakan kegiatan peningkatan kapasitas, namun pesertanya adalah Lurah, bukan anggota Satlinmas.	merubah target di tahun 2023	
				PROGRAM PENCEGAHAN PENGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9 Unit	9 Unit			
				Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 jam	24 jam			
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5 Kali	1 Kali	dalam perencanaan disengajarkan 5 kali (masing-masing 50 orang) namun dalam pelaksanaan dilaksanakan 1 kali sejumlah 250 Peserta.	mengoptimalkan Perencanaan.	
6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.75 %	83.85 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen	26 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14 Unit	14 Unit	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	95.00 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 ASN	57 ASN	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24 Jenis	24 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77 Jenis	77 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kali	1 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cacakan dan Pengandaan	8 Jenis	8 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Exemplar	24 Exemplar	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pemeintah Daerah	35 Jenis	35 Jenis	-	-	
				Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	92.34 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menuntut	8600 Surat	8805 Surat	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82 Kendaraan	82 Kendaraan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 gedung	8 gedung	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	7 Jenis	7 Jenis	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	487 Orang	487 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	240 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	247 Orang	247 Orang	-	-	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.25 %	30.27 %	-	-	
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sosial	14.25 %	29.42 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	855 Orang	863 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50 Orang	40 Orang	-	Jumlah orang terlantar yang direunifikasi menurun	
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	700 Orang	635 Orang	-	Jumlah klien shelter menurun karena berhasil direunifikasi atau ditujuk	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	423 Orang	173 Orang	Beberapa kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan kegiatan di awal tahun anggaran	
				Sub Kegiatan Penyediaan sandang	30 Orang	30 Orang	-	-	
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peminakan	6257 KK	6257 KK			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	51.84 %	40.04 %			
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	119051 Orang	114467 Orang	Belum adanya indikator kemiskinan di tingkat daerah	Perlu ditetapkan indikator kemiskinan daerah sebagai dasar penentuan data kemiskinan yang sebelumnya hanya mengacu pada PERMENSOS No. 3 Tahun 2021	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10263 Orang	10263 Orang			
				Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7200 Orang	12265 Orang	Anggaran yang dicairkan disesuaikan dengan regulasi yang diterbitkan	Mempercepat proses penyusunan awal sebagai dasar regulasi pencairan anggaran	
				Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	15 Anak	10 Anak			
				Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	15 Anak	10 Anak	Jumlah anak-anak terlantar yang bersedia untuk diujuk menurun	Diperlukan pendekatan lebih intens terhadap anak terlantar agar mau diujuk	
				Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	20 Kali	13 Kali	Keterbatasan waktu menyebabkan pekerja sosial tidak optimal melaksanakan pemantauan	Melakukan penjadwalan berdasarkan rasio klien dengan pekerja sosial	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	450 Orang	345 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	400 Orang	345 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	50 Orang	0 Orang			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	91.67 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siswa Bencana	60 Orang	59 Orang	Jumlah tagana berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, P3AP2KB adalah 50 orang	Mengubah target sesuai dengan SK Kepala Dinas Sosial, P3AP2KB	
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	12 Bulan	12 Bulan			

LAMPIRAN 3.1.2
**PELAKSANAAN URUSAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tenaga Kerja	DFMPTSP	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Kegiatan Penegagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	415 Orang 136 Orang 279 Orang 65 % 35 lembaga 35 lembaga 77 % 33 BKK 80 Orang 465 Lowongan Kerja 35 Perusahaan 34 Orang 34 Orang	1.55 % 415 Orang 136 Orang 279 Orang 100 % 35 lembaga 35 lembaga 59.58 % 34 BKK 80 Orang 595 Lowongan 35 Perusahaan 34 Orang 34 Orang	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	10.18 %	17.31 %			
					67 %	50 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pencapaian Perselisihan Hubungan Industrial Mokok Kerja dan Penujutan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	74 Orang	Peserta yang diundang tidak hadir tanpa konfirmasi	Meningkatkan komunikasi dengan perusahaan	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 %	12,68 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	
			Peningkatan pada akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan dan laporan keuangan.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Sertifikat	1 Sertifikat	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	66 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	97,42 %	-	-	
			Peningkatan SDM, tata laksana dan sarana prasarana penunjang operasional pelayanan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80 %	97,42 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35 jenis	28 Jenis	Jumlah RKBM yang ditetapkan hanya 28 jenis BMD	Pengadaan barang sesuai RKBM yang ditetapkan	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	39,02 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41 Unit	41 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20160 Liter	20160 Liter			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis	5 jenis			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 -	87,46 -			
				Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Setel	0 Setel			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66 Orang	67 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34 jenis	34 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11 jenis	11 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720 eksemplar	720 eksemplar			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5183 Kotak	5940 Kotak	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Kali	50 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 Berkas	750 Berkas	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6350 Meter	6350 Meter	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 Jenis	17 Jenis	-	-	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	96.5 %	89.29 %			
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	28 OPD	28 OPD			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	62 Orang	62 Orang			
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	114 Orang	114 Orang			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	114 Orang	114 Orang			
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 lembaga	28 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	185 Orang	185 Orang		hanya 25 lembaga organisasi yang aktif, yang lain sudah tidak aktif lagi di karenakan personil sdh keluar dari organisasi dan organisasinya sudah tidak beroperasi lagi	diharapkan untuk yang menjadi anggota dalam lembaga organisasi yang sudah mengurus badan hukum dan yang mempunyai AD/ART lembaga organisasi dan setiap 6 bln sekali perlu ada money

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	420 Orang	-	-	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang	24 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	190 Orang	190 Orang			
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	24 Orang	Kondisi rill dilapangan kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayah 24 orang		
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 lembaga	2 lembaga			
				Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0.05 %	0.13 %			
				KegiatanPeningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	379 Orang	379 Orang			
				Sub KegiatanPengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	379 Orang	379 Orang			
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100 %	100 %			
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85 Anak	84 Anak			
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85 Orang	84 Orang	Kondisi ini dilapangan kasus korban kekerasan terhadap kekerasan anak yang terlayani 84 orang		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	225 Orang	-		
				Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang	310 Orang	-		
				Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	-		
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/kota	2 Kali	2 Kali			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/kota	2 Kali	2 Kali	-		
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 % 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 % 100 % 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	3 Jenis			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	4 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27 Kendaraan	27 Kendaraan			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 -	80 -			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	5 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	8 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 Jenis	46 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9600 Kotak	14492 Kotak			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Rapat	98 Rapat			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1		3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1750 Dokumen	4027 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
4	Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	3,51 %	8,77 %			
				Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen			
5	Ungkungan Hidup	Dinas Ungkungan Hidup	1. Renja 2022 dan Perubahan Renja 2022 2. Perubahan Renstra 2018-2023	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen			
				PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	84,07 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dinas Ungkungan Hidup)	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 Jenis	13 Jenis			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125000 Lembar	104052 Lembar	Terdapat selisih antara target dan real kebutuhan terhadap voucher BBM	Akan dilaksanakan perencanaan yang lebih baik untuk kedepannya	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas	270 Unit	265 Unit	Terdapat selisih antara target dan real kebutuhan terhadap kendaraan yang dipelihara	Akan dilakukan perencanaan yang lebih baik kedepannya	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13500 m2	13500 m2			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	12 Jenis	12 Jenis			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.8 -	78.9 -			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1400 STEL	1400 STEL			
				Kegiatan Administrasi Umum	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	20 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31 Jenis	31 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	3 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28 Jenis	28 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.000 Kotak	13.557 Kotak	Terdapat selisih antara target dan real kebutuhan makanan	Akan dilakukan perencanaan yang lebih baik kedepannya	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	50 Kali			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500 Surat	12.989 Surat			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.500 m2	13.500 m2			
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %	100 %			
				Kegiatan Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	64.81 %	64.81 %			
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	35 Titik	0 Titik			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	54 Titik	24 Titik		Dalam perkembangan pelaksanaan terdapat kenaikan biaya pengujian	Pengujian akan dilakukan tambahan titik pada tahun anggaran berikutnya
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	85 LHU	95 LHU			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0.87 %	0.87 %			
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	95.315515 Ha	95.31551461 Ha			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	683 Lokasi RTH	683 Lokasi RTH			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9 TPU	9 TPU			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11 Lokasi	11 Lokasi			
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	23 %	23 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyimpangan Sementara Umbah B	20 Kegiatan/Usaha	20 Kegiatan/Usaha			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemertuaan Komitmen Izin Penyimpangan Sementara Umbah B Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20 Kegiatan/Usaha	20 Kegiatan/Usaha			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	22 %	44 %			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67 Kegiatan/Usaha	70 Kegiatan/Usaha			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemertuaan Ketertuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	150 Kegiatan/Usaha	150 Kegiatan/Usaha			
				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67 kali	70 kali			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	47 %	47 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110 Sekolah	110 Sekolah			
				Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1 Pembinaan	1 Pembinaan			
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	110 Sekolah	110 Sekolah			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	90 %	90 %			
				Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	38 Pengaduan	120 Pengaduan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40 Pengaduan	141 Pengaduan	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	73 %	72.44 %	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	181578 Ton/Tahun 2 Dokumen	202226.44 Ton/Tahun 2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	376791 m ²	376791 m ²	-	-	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	181578 Ton/Tahun	191194.30 Ton/Tahun	-	-	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	181578 Ton/Tahun	191194.30 Ton/Tahun	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10 jenis	10 jenis	-	-	
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	31.82 %	31.82 %	-	-	
				Kegiatan Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	35 RW	35 RW	-	-	
				Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Flantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	110 RW	110 RW	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1					6	7	8	9	10
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas 2. Penetapan Standar Pelayanan (SP) Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 3. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan publik 4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Memberikan informasi layanan pada masyarakat 6. Menanamkan kepedulian dan tanggung jawab aparatur 	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bleya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	95 %	100,08 %			
					4 Dokumen	4 Dokumen			
					2 Dokumen	2 Dokumen			
					2 Dokumen	2 Dokumen			
					2 Dokumen	2 Dokumen			
					70 ASN	70 ASN			
					2 laporan	2 laporan			
					80 %	80 %			
					100 %	100 %			
					20 Unit	20 Unit			
					100 %	100 %			
					29 Kendaraan	29 Kendaraan			
					2 gedung	2 gedung			
					80 IKM	90,35 IKM			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	98,99 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148 Orang	145 Orang			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 MEDIA	3 MEDIA			
				Kegiatan Administrasi Umum	96 %	97,42 %			
				Perangkat Daerah	50 Titik	47 Titik			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85 Macam	85 Macam			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	409.750 Lembar	395.524 Lembar			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47 Exemplar	46 Exemplar			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4200 Kotak	4037 Kotak			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 dinas dalam daerah	37 dinas dalam daerah			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 dinas luar daerah	37 dinas luar daerah			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96 %	96,10 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6696 Surat	5653 Surat			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Peralatan	60 Peralatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1050 m2	1050 m2			
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	96,50 %	69,42 %			
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	919.459 Dokumen	780.571 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	762.091 KTP	645.192 KTP			
				Sub Kegiatan pengumpulan analisis dan diseminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk	60.000 KK	32.513 KK			
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	95 %	122,18 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	23.396 Dokumen	25.977 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Pemberitaan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.396 Dokumen	25.977 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	6 INSTANSI	8 INSTANSI	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	94 %	101.29 %			
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	942.855 Dokumen	836.261 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	8 Unit	8 Unit			
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6655 Berkas	7000 Berkas			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 layanan	6 layanan			
				Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Jenis Media	6 Jenis Media			
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	1 Dokumen			
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.7 Angka	1.5 Angka			
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Informasi Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	650 Kepala Keluarga (KK)	650 Kepala Keluarga (KK)			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBP	65 Orang	65 Orang			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	75 %	74.62 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Kali	2 Kali			
				Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Jenis	3 jenis			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pengendalian Program KBPK	5 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20 Orang	20 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (RakorDes) dan Mini Lokasinya (Minilok)	20 Kali	20 Kali			
				Kegiatan Penyiapan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	36 Orang	36 Orang			
				Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1368 Orang	1026 Orang	Penggerakan kader dalam memberikan KIE dan pemuktahiran Data dilaksanakan 10 bulan	mengadakan pelaksanaan penggerakan kader diawal tahun	
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56 Faskes	56 Faskes			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5128 Orang	984 Orang	Tingginya Target akseptor MKJP dari Pusat, sedang untuk kota Malang PUS banyak menggunakan suntik dan Pili	Mengajukan penurunan target dari pusat dan menggerakan kader untuk melakukan KIE kepada PUS untuk menggunakan KB dan Menyarankan dengan MKJP (metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Kali	2 Kali			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	450 Orang	450 Orang			
				Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	450 Orang	450 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	7 Kali	7 Kali			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	85 %	95,56 %			
				Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2970 Orang	2970 Orang			
				Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK6 BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi K	1470 Orang	1470 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK6 BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1500 Orang	1500 Orang			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	92,5 %	96,55 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	545 Orang	545 Orang			
				Sub Kegiatan Penguatan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK6 BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Paket	2 Paket			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKGB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	125 Orang	125 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKGB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1950 Orang	1948 Orang	kondisi rill sesuai di lapangan	-	
				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKGB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	420 Orang	420 Orang	-	-	
8	Perhubungan	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 Angka	74,90 Angka			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang	108 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214 Orang	214 Orang			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 STEL	325 STEL			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	1 Paket	efisiensi belanja karena paket belanja komponen listrik masih tersedia dan tercurugli		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	11 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1800 Eksemplar	1200 Eksemplar	efisiensi belanja bahan bacaan	disesuaikan dengan kebutuhan	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 laporan	48 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64 Unit	64 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	10 %	10 %			
				Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Jenis	1 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9 Jenis	9 jenis			
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jerngan Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	22 Paket	22 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	3 laporan	-	-	
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA di Jalan	24 laporan	24 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan	12 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	74 %	32.03 %	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	-	-	
				Kegiatan Pencapaian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LUAJ)	85,45 %	83,31 %			
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Pempung Tipe C	3 Unit	3 Unit			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3 Unit	3 Unit			
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22 Item	22 Item			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22 Item	22 Item			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	12 Dokumen			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LUAJ)	10.3000.000.000 Rupiah	9.614.763.000 Rupiah			
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	24 laporan	24 laporan			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penemuan Syarat Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan			
9	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	71 %	70,54 %			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78 %	77,49 %			
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56 %	57,69 %			
				Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2 Kegiatan/Usaha	2 Kegiatan/Usaha			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51 %	50,67 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Jenis Media	5 Jenis Media			
				Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen			
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	85 %	52 %			
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	836 koneksi	887 koneksi			
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.23 %	25 %			
				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Aplikasi	6 Aplikasi			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	90 Unit Kerja	90 Unit Kerja			
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5 Aplikasi	5 Aplikasi			
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	53 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	3 Jenis			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Kendaraan	23 Kendaraan			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Ruang	6 Ruang			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	5 Jenis			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78 -	78,75 -			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	101 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	30 Jenis	30 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	165 Kali			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	22 Ruang	22 Ruang			
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pemeriksaan Ketaatan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan kekuatan kesehatan PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	64.21 % 172 koperasi 75 koperasi 90 Orang 88.55 % 494 koperasi 263 koperasi	58.26 % 165 koperasi 75 koperasi 90 Orang 88.5 % 263 koperasi			
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	62.32 % 839 koperasi 210 koperasi	73.78 % 560 koperasi 210 koperasi			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50 koperasi	50 koperasi			
								1. Menambah SDM Penilai Kesehatan Koperasi dengan ditambahnya CPNS Pengawas Koperasi Pratama sejumlah 4 orang 2. Membuat surat himbauan dan teguran bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan Laporan Keuangan Koperasi yang belum memenuhi SAK ETAP 3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pengerjaan Kertas Kerja pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0 koperasi	300 koperasi	Pergeseran PAPBD 2022	Perlu dilakukan perencanaan yang matang	
				PERLINDUNGAN KOPERASI Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keunggulannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	67.19 % 510 Orang	81.86 % 670 Orang			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 koperasi	50 koperasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	390 Orang	490 Orang			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 koperasi	60 koperasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	0 lembaga	Pergeseran PAPBD 2022	Perlu dilakukan perencanaan yang matang	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMIKM)	10.31 %	10.31 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2048 Usaha mikro	2048 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	20 MOU	20 MOU			
				Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	205 Usaha mikro	195 Usaha mikro	Terbatasnya waktu proses perijinan merk di Kemenhutham	Perencanaan yang lebih matang	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1388 Orang	1395 Orang			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	90 Usaha mikro	90 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5000 Produk	0 Produk	Pergeseran PAPBD 2022	Perlu dilakukan perencanaan yang matang	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Unit	30 Unit			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	120 Usaha mikro	300 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60 Usaha mikro	60 Usaha mikro			
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,58 %	1,39 %			
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	314 Usaha mikro	276 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	12 Usaha mikro	12 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	140 Usaha mikro	264 Usaha mikro			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.100 Jenis	10.100 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27 Jenis	27 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Jenis	6 jenis			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Jenis	11 Jenis			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000 Surat	6.847 Surat	Perlu nya metode kearsipan yang sistematis	Perbaikan metode kearsipan yang ada	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.182.384 m2	1.182.384 m2			
11	Penanaman Modal	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Menyusun peta potensi investasi serta kebijakan Penanaman Modal di Kota Malang	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	75 %	50,52 %			
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen			
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50 %	50 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha			
				Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal b. Meningkatkan Kinerja Pelayanan modal	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	87.5 %	73.77 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Ijin	6709 Ijin			
					5000 Ijin	6709 Ijin			
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.5 %	86.73 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Ijin	6581 Ijin			
					5000 Ijin	6581 Ijin			
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75 %	75 %			
				Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1100 Berkas	470 Berkas	Pengurusan IMB beralih ke SIMBG dan proses dilaksanakan oleh DPUPRKP termasuk proses peninjauan lapangannya	Peninjauan lapangan dilaksanakan untuk perizinan yang memerlukan verifikasi lapangan	
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Pengaduan	64 Pengaduan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Menyusun aplikasi layanan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan OPD lainnya.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	23 Perusahaan 0 Proyek 245 Orang 20 Proyek 9 Kali 90 % 75 % 8000 Data 7 Fitur	5.54 % 142 Perusahaan 0 Proyek 300 Orang 20 Proyek 12 kali 31.78 % 100 % 11726 Data 7 Fitur	Sebagai Juknis DAK anggaran dialihkan ke sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal -	Dianggarkan dana dari PAD untuk kegiatan tahun berikutnya -	10
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 78 Orang	100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 71 Orang	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target -	Ditingkatkan kualitasnya dengan koordinasi dengan Inspektorat dan Bappeda -	Akan dilaksanakan perencanaan dengan memperhatikan kondisi pegawai yang ada

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	75,85 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 jenis	39 jenis			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	90,50 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500 Surat	6480 Surat			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	75,67 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Kendaraan	17 Kendaraan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14000 Liter	14000 Liter			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Jenis	7 jenis			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 jenis	39 jenis			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 Angka	86,58 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	100 %	93,30 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 Orang	71 Orang	Adanya ASN yang pensiun dan pindah tugas OPD	Akan dilaksanakan perencanaan dengan memperhatikan kondisi pegawai yang ada	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 Orang	71 Orang	Adanya ASN yang pindah dan pensiun	Akan dilaksanakan perencanaan dengan memperhatikan kondisi pegawai yang ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 %	89,06 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21 Jenis	21 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43 Jenis	43 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	3 jenis			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42820 Kotak	38097 kotak	Realisasi jumlah rapat yang lebih sedikit dari yang direncanakan	Dilaksanakan perencanaan yang lebih tepat cilaahun yang akan datang	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566 Kotak	537 Kotak	Realisasi jumlah rapat yang lebih sedikit dari yang direncanakan	Dilaksanakan Perencanaan yang lebih tepat cilaahun yang akan datang	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERMUDAAN	1 %	0.82 %			
				Kegiatan Penyiapan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1076 Orang	3537 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	9 Orang	9 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	70 Orang	70 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perindungan Pemuda Advokasi Akses Pengembangan Diri Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	425 Orang	455 Orang	tercapai	tercapai	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Orang	22 Orang	tercapai	tercapai	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	78 Orang	78 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.001.%	24,61.%			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	525 Orang	2465 Orang	tercapai	tercapai	
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,15 %	0,16 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 Buah	70 Buah			
				Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 lembaga	1 lembaga			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	15 Paket	13 Paket			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 jenis	1 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1 paket	1 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	10 paket	10 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	6 jenis	6 jenis			
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	5 %	12 %			
					14 jenis	15 jenis			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	15 jenis	15 jenis			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAKAWAAN	11,8 %	12,71 %			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	19.955 Orang	21110 Orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	18.954 Orang	5.884 Orang	Jumlah tersebut adalah peserta yang mengikuti pembinaan melalui Dana Hibah	Akan dilaksanakan pembinaan yang lebih merata ke Kwardir Ranting dan Gugus depan	
13	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELenggaraAN STATISTIK SEKTORAL	62 %	78 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	65 %	91 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3 Orang	30 Orang			
				Sub Kegiatan Membarung Metadata Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	28 OPD	28 OPD			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	2 Jenis	3 jenis			
14	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELenggaraAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	24 %	28 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali			
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	90 %			
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sondi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	90 %			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sani di antar Perangkat Daerah Kab/Kota	45 %	65 %			
				Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring komunikasi sani di pemerintah daerah kab./kota	1 Kali	1 Kali			
15	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Sub Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penguatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	59 % 2 Objek 50 Orang 2 Objek 1 Komunitas 14 Objek 36 %	74 % 2 Objek 50 Orang 2 Objek 13 Komunitas 14 Objek 74 %			
				KESANIAN TRADISIONAL Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100 Orang	100 Orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	10 Komunitas	10 Komunitas			
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 % 1 Objek	100 % 29 Objek			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	35 Objek	75 Objek			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSELIAMAN	45 %	100 %			
				Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2 gedung	2 gedung			
				Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	243 Objek	243 Objek			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	10000 Orang	10508 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	2 gedung	2 gedung			
				Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	1 gedung	2 gedung			
16	Perustakaan Umum Dan Asip Daerah	Dinas Perpustakaan Umum Dan Asip Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	1 Paket			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	14 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83 Jenis	83 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3500 Kotak	3261 Kotak	Koefisien jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu disesuaikan kebutuhan.	Membutuhkan informasi kebutuhan anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dibutuhkan tiap bidang	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	63 kali	Koefisien jumlah perjalanan dinas disesuaikan kebutuhan.	Membutuhkan informasi kebutuhan anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dibutuhkan tiap bidang	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Jenis	80 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79 Jenis	79 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	2289 Surat	Jumlah surat masuk dan keluar sesuai dengan buku agenda		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365 hari	365 hari			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bilya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	12 Unit	Koefisien jumlah kendaraan dinas yang dipelihara disesuaikan kebutuhan		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1 Jenis	1 jenis			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Jenis	7 Jenis			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	1 Paket			
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	17 %	79,10 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 %	40 %			
				Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	3500 eksemplar	4709 eksemplar	Target terlampaui disebabkan banyaknya sumbangan dari masyarakat. Dan perhitungan dalam subkegiatan adalah perhitungan jumlah pengadaan koleksi berdasarkan anggaran APBD. Sedangkan pengembangan koleksi dihitung bukan hanya yang dianggarkan dalam APBD saja melainkan juga dari Non APBD (yang diperoleh dari sumbangan masyarakat)		
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 %	40 %			
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
				Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Lokasi	287 Lokasi	Disebabkan ada penambahan armada perpustakaan keliling, hibah dari Perpusnas		
				Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	60 perpustakaan	96 perpustakaan	Efisiensi pelaksanaan kegiatan Bimtek	Untuk kegiatan kedepan akan disesuaikan dengan materi Bimtek	
				Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Wilayah Kabupaten/Kota	382 perpustakaan	391 perpustakaan	Tersedia sisa waktu pelaksanaan kegiatan survey ke perpustakaan sekolah		
				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 kegiatan	8 kegiatan			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	5 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 pemeliharaan	1 pemeliharaan			
				Sub Kegiatan Pembangunan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	21 Peserta	21 Peserta			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Kearsipan	Dinas Perustakaan Umum Dan Arsip Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	40 % 41 OPD 12000 arsip 10 Ranperwal 36000 arsip 200 database 200 database	60 % 43 OPD 12078 arsip 10 Ranperwal 36000 arsip 200 database 200 database	- - - - -	- -	-

LAMPIRAN 3.1.3

PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2 Perencanaan dan Kelautan	3 Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	4 Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	6 22000 Ton	7 24575,753 Ton	8 1 Penerapan Teknologi diariskan PMK, sehingga ada hambatan untuk tidak boleh melakukan IB untuk mencegah penyebaran PMK 7,49 Ton 395 Kali melakukan ME kepada peternak	9 melakukan ME kepada peternak	10 10
					1 Penerapan Teknologi	53561 Ton	205 kali diariskan PMK, sehingga ada hambatan untuk tidak boleh melakukan IB, untuk mencegah penyebaran PMK	melakukan ME kepada peternak	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	22000 Ton	4 Jenis	205 kali diariskan PMK, sehingga ada hambatan untuk tidak boleh melakukan IB, untuk mencegah penyebaran PMK		
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Jenis	4 Jenis	Spesifikasi alsintan di e-katalog tidak sesuai dengan yang direncanakan	pengadaan disesuaikan dengan spesifikasi yang ada	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Jenis	2 Jenis			
				Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2 Jenis	2 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 %	2 %			
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1785 Sampel	1785 Sampel	belum pahami pelaku usaha dalam memahami NKV dan sertifikat halal	melakukan sosialisasi NKV dan sertifikat halal	
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50 Peserta	49 peserta	belum pahami pelaku usaha dalam memahami NKV dan sertifikat halal	melakukan sosialisasi NKV dan sertifikat halal	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2186 Contoh	2186 Contoh	masih adanya produk hewan yang tidak ASUH (Aman Sehat Utuh Halal)	melakukan pengawasan dan sosialisasi	
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Peninggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 %	2 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Peninggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1428 Ekor	3371 Ekor	masih ada peternak yang keberatan Hewannya diwakin	melakukan ME kepada peternak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	950 Skor 30 Penyuluh 6 Dokumen 41 Poktan	1000 Skor 30 Penyuluh 6 Dokumen 41 Poktan			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan teknologi dan Informatika Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.5 % 139.94 Ton 294 Peserta	2.5 % 147 Ton 679 Peserta		program petani milenial	
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.02 Benih 6 Jenis	243.02 Benih 6 jenis			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	13 Pelaku Usaha 50 Usaha mikro 170 Peserta	13 Pelaku Usaha 50 Usaha mikro 270 Peserta			
2	Pariwisata	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 % 25 jenis 674 Pedagang 40 Peserta	60 % 25 Jenis 674 Pedagang 40 Peserta			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	90 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	388 Peserta	388 Peserta			
				Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	185 Pelaku Industri	185 Pelaku Industri			
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	48 %	42.8 %			
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2070 Pelaku Industri	1917 Pelaku Industri			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	85 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha			
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	52 %	65.10 %			
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	79 Peserta	581 Peserta			
				Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Pelaku Usaha	1302 Pelaku Usaha			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	40 %	105.00 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	689 Pelaku Usaha	1239 Pelaku Usaha			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	80 Orang	80 Orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	20 Orang	20 Orang			
				Sub Kegiatan Fasilitas Proses Kreasi Produk Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	190 Pelaku Usaha	510 Pelaku Usaha			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Peserta	60 Peserta			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitas Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konsepsi Ekonomi Kreatif	10 Komunitas	10 Komunitas			
3	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	22000 Ton 1 Penerapan Teknologi	24575-753 Ton 1 Penerapan Teknologi			
					2.88 Ton	7.49 Ton	dikarenakan PMK, sehingga ada hambauan untuk tidak boleh melakukan IB untuk mencegah penyebaran PMK	melakukan ME kepada peternak	
				Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	205 kali	395 Kali	dikarenakan PMK, sehingga ada hambauan untuk tidak boleh melakukan IB, untuk mencegah penyebaran PMK	melakukan ME kepada peternak	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	22000 Ton	53561 Ton			
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4 Jenis	4 jenis			
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Jenis	2 jenis	spesifikasi alsintan di e-katalog tidak sesuai dengan yang direncanakan	pengadaan disesuaikan dengan spesifikasi yang ada	
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Jenis	2 jenis	-	-	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Peyeratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	2 %			
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Peyeratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1785 Sampel	1785-Sampel			
				Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50 Peserta	49 peserta	belum pahamnya pelaku usaha dalam memahami NKV dan sertifikat halal	melakukan sosialisasi NKV dan sertifikat halal	
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2186 Contoh	2186 Contoh	masih adanya produk hewan yang tidak ASUH (Aman Sehat Utuh Halal)	melakukan pengawasan dan sosialisasi	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2 %	2 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 %	2 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1428 Ekor	3371 Ekor	masih ada peternak yang keberatan hewannya divaksin	melakukan KIE kepada peternak	
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	950 Skor	1000 Skor			
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	30 Penyuluh	30 Penyuluh			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	41 Poktan	41 Poktan	belum adanya regenerasi petani	program petani milenial	
			Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.5 %	2.5 %			
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	139.94 Ton	147 Ton			
				Sub kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan teknologi dan Informatika Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	294 Peserta	679 Peserta			
				Kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan	243.02 Benih	243.02 Benih			
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan dalam (setu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	6 jenis			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	13 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha			
				Kegiatan Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50 Usaha mikro	50 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Peryaratatan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	170 Peserta	270 Peserta			
4	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100 %	0 %			
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5 Kali	5 Kali			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	25 UKM	25 UKM			
				Sub Kegiatan Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	25 UKM	25 UKM			
				Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pergeceer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	5 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	5 Kali	5 Kali			
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.5 %	2.5 %			
				Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	365 hari	365 hari			
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Kali	2 Kali	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 hari	365 hari			
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43 Kali	43 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam (satu) Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali			
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100 %	87 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	10 Lokasi	10 Lokasi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	10000 UJTP	10589 UJTP			
				Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	2 Kali	1 Kali	Belum ada data barang non BDKT yang valid dan akurat	Penyusunan database barang non BDKT yang valid dan akurat	
				Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100 Orang	100 Orang			
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.25 %	1.33 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 UKM	30 UKM			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UKM	30 UKM			
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Meningkatnya Kualitas Pasar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.69 %	8 %			
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Pasar	21 Pasar			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Jenis	12 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	300 Pedagang	40 Pedagang	Lokasi yang ditentukan (Pasar Klojen & Sentra Kuliner Sriwijaya) cenderung sepi oleh pedagang dan produk yang dijual oleh pedagang di lokasi tersebut kebanyakan bukan di produksi sendiri (kulikan).	Mencari titik lokasi pasar yang berpotensi banyak proses produksinya/ sentra kuliner seperti pasar Oro-Oro Dowo.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pasar	1 Pasar			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Pasar	20 Pasar	Rehab, ringan/ sedang /berat pada pasar blimbing terkendala status hukum[PKS] dengan PT.KS	Dibuatkan Legal Opinion untuk memperjelas status hukum PKS Pasar Blimbing	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	200 Pasar	180 Pasar	Terbatasnya waktu pemeliharaan pasar sehingga ada beberapa titik yang belum diadakan rehab ringan/ sedang/ berat	Perlu perencanaan yang lebih matang	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarena Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarena Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarena Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarena Distribusi Perdagangan	220 Pedagang 25 UKM 75 Pedagang 50 TOKO MODEREN	225 Pedagang 25 UKM 75 Pedagang 25 TOKO MODEREN			
			Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasidan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5% 3759 IKM 1 Dokumen 3759 IKM 16 IKM 50 IKM 700 IKM	35,54% 3759 IKM 1 Dokumen 3759 IKM 51 IKM 59 IKM 850 IKM	1. Kurang validnya basis data toko modern 2. Masa transisi perubahan proses perijinan dari cara konvensional menuju OSS- RBA	Penguatan penyusunan database urusan perdagangan di Renja yang akan datang	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPU) Izin Usaha Kawasan Industri (LUK) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100% 100 IKM	1 Dokumen 80% 80 IKM			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI IPU IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 IKM	80 IKM	Kelembagaan pelaku industri untuk menyampaikan data profil industri	1. Mengadakan sosialisasi terhadap pelaku industri terkait aplikasi SIINAS sebagai web resmi Kemerperim untuk memantau dan mengawasi IKM 2. Mengintegrasikan SIINAS dengan database kependudukan dan database ijin usaha (OSS-RB)	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi			
				Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPU IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	50 Perusahaan	56 Perusahaan			
5	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100 %	0 %			
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5 Kali	5 Kali			
				Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	25 UKM	25 UKM			
				Sub Kegiatan Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	25 UKM	25 UKM			
				Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	5 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	5 Kali	5 Kali			
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.5 %	2.5 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pendendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	365 hari	365 hari			
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Kali	2 Kali			
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 hari	365 hari			
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43 Kali	43 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam (satu) Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali			
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100 %	87 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	10 Lokasi	10 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	10000 UTPP	10589 UTPP			
				Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	2 Kali	1 Kali	Belum ada data barang non BDKT yang valid dan akurat	Penyusunan database barang non BDKT yang valid dan akurat	
				Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	100 Orang	100 Orang			
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.25 %	1.33 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 UKM	30 UKM			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UKM	30 UKM			
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Meningkatnya Kualitas Pasar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.69 %	8 %			
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Pasar	21 Pasar			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Jenis	12 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	300 Pedagang	40 Pedagang	Lokasi yang ditentukan (Pasar Klojen & Sentra Kuliner Sriwijaya) cenderung sepi oleh pedagang dan Produk yang dijual oleh pedagang di lokasi tersebut kebanyakan bukan di produksi sendiri (kulakan).	Mencari titik lokasi pasar yang berpotensi banyak proses produksinya/ sentra kuliner seperti pasar Oro-Oro Dowo.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pasar	1 Pasar			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Pasar	20 Pasar	Rehab ringan/ sedang / berat pada pasar blimbing terkendala status hukum (PKS) dengan PT. KS	Dibuatkan Legal Opinion untuk memperjelas status hukum PKS Pasar Blimbing	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	200 Pasar	180 Pasar	Terbatasnya waktu pemeliharaan pasar sehingga ada beberapa titik yang belum diadakan rehab ringan/ sedang/ berat	Perlu perencanaan yang lebih matang	
				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	220 Pedagang	225 Pedagang			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25 UKM	25 UKM			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	75 Pedagang	75 Pedagang			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50 TOKO MODEREN	25 TOKO MODEREN	1. Kurang validnya basis data toko modern 2. Masa transisi perubahan proses perijinan dari cara konvensional menuju OSS- RBA	Penguatan penyusunan database urusan perdagangan di Renja yang akan datang	
			Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5 %	35.54 %			
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3759 IKM	3759 IKM			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan pencapaian pengembangan penyebaran dan perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3759 IKM	3759 IKM			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	16 IKM	51 IKM			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50 IKM	59 IKM			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	700 IKM	850 IKM			
				Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	100 %	80 %			
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota	100 IKM	80 IKM			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI IPU IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ kota	100 IKM	80 IKM	Ketidaktepatan pelaku industri untuk menyampaikan data profil industri	1. Mengadakan sosialisasi terhadap pelaku industri terkait aplikasi SIINAS sebagai web resmi Kemaperin untuk memantau dan mengawasi IKM 2. Mengintegrasikan SIINAS dengan database kependudukan dan database ijin usaha (OSS-RB)	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi			
				Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	50 Perusahaan	56 Perusahaan			



LAMPIRAN
**PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
LAINNYA**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengawasan	Inspektorat	- Meningkatkan Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 3 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 47 ASN 16 laporan 80 % 14 Unit 14 Unit 80 Unit 80 Angka 2 Dokumen 30 Orang 45 Orang 6 Jenis Layanan 144 Unit	100 % 3 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 47 ASN 16 laporan 80 % 14 Unit 14 Unit 80 Unit 83.47 Angka 2 Dokumen 30 Orang 45 Orang 6 Jenis Layanan 146 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47 jenis	47 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28 Kegiatan	28 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1500 eksemplar	1500 eksemplar	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 kali	62 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 kali	60 kali	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 layanan	3 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 jenis	33 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.4 Angka	6.68 Angka	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	14 SKPD	17 SKPD	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	6 laporan	8 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	82.5 %	82.14 %	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	15 laporan	16 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APip	2 Kali	2 Kali	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Revisi Laporan Kinerja	28 laporan	28 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Revisi Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	15 laporan	16 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 jenis	1 jenis	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 kali	0 kali	Tidak ada kehilangan kendaraan/aset daerah sehingga tidak ada penanganan kerugian daerah	Meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 laporan	15 laporan	-	-	
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100 %	100 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	3 Kebijakan	3 Kebijakan			
				Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Kebijakan	3 Kebijakan			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100 %	100 %			
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	3 Jenis	3 Jenis			
				Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28 SKPD	28 SKPD			
				Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	28 SKPD	28 SKPD			
2	Peninggulangan Bencana Daerah	Badan Peninggulangan Bencana Daerah	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	90 Angka	88,29 Angka			
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	16,58 %			
				Sub Kegiatan Penanganan Pasca-bencana Kabupaten/Kota	50 Kepala Keluarga (KK)	50 Kepala Keluarga (KK)			
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	90 Angka	88,29 Angka			
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	16,58 %			
				Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana Kabupaten/Kota	952 Orang	938 Orang	Beberapa yang diundang tidak hadir	untuk kedepannya yang diundang relawan yang lebih aktif dalam kebencanaan	
				Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	30000 Orang	31117 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	PROGRAM PENANGGUHAN BENCANA Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota PROGRAM PENANGGUHAN BENCANA Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jam 100 % 200 Orang 100 % 100 % 200 Orang 100 % 100 % 200 Orang 100 % 100 % 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 100 % 14 kali 1 Dokumen 100 % 7 jenis 3 jenis 2 jenis	48 jam 100 % 347 Orang 70.61 % 100 % 245 Orang 100 % 100 % 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 100 % 14 kali 1 Dokumen 123.64 % 7 jenis 3 jenis 2 jenis			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 jenis	23 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	33 Kali	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	108.13 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1200 Surat	1077 Surat	Jumlah surat masuk berkurang, sehingga tindak lanjut berupa surat keluar juga berkurang.	Penyesuaian target diketahui depan	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	93.46 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Jenis	9 jenis			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	93.46 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blyea Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	24 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64 Unit	58 Unit	Perbaikan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan	akan dilaksanakan appraisal terhadap aset	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	494.3 m2	516.13 m2			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	216 Unit	148 Unit	Pemeliharaan Mebel sesuai dengan kebutuhan	akan dilaksanakan appraisal terhadap aset	
				Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	92.50 %			
				Sub Kegiatan/Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40 Unit	37 Unit	ada ketidaksesuaian data barang yang sudah di beri label dengan yang akan dilabel	akan dilaksanakan pendataan barang secara teliti	
				PROGRAM PENANGGUHAN BENCANA	90 Angka	88.29 Angka			
				Pengujian Investasi pengelolaaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	100 %	11.94 %			
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1000 Orang	1.107 Orang	-	-		
3	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	75 %				
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28 Pegawai	28 Pegawai				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Pegawai	28 Pegawai				
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen				
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Orang	0 Orang				
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang		Ada penggeseran anggaran	Dalam perencanaan lebih dimatangkan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %				
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104 eksemplar	104 eksemplar				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 OH	150 OH			Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 jenis	12 jenis				
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 jenis	12 jenis				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	230.20 %				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	2320 Surat				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2050 m2 100 %	2050 m2 100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	13 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Jenis	19 Jenis			
				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	13 %	28.60 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	900 Orang	1980 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 Orang	1980 Orang			
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	57.5 %	28.75 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	10 parpol	10 parpol			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Poli	10 parpol	10 parpol			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Pol	150 Orang	375 Orang			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	32.5 %	102.92 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	120 ormas	380 ormas			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 ormas	380 ormas			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	72.5 %	70.50 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1815 Orang	1765 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat, Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1815 Orang	1765 Orang			
				PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Pemangangan Konflik Sosial	72.5 %	393.92 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Pemangangan Konflik Sosial	300 Orang	1630 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemerintahan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	300 Orang	1630 Orang			
4.	Pendukung DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Sub Kegiatan Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Kegiatan Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	100 % 12 Dokumen 7 Dokumen 5 Dokumen 17 Dokumen 12 kali 2 Dokumen 3 Dokumen 192 kali 12 Bulan 135 STEL 45 Orang 27 jenis 27 jenis	80 % 12 Dokumen 7 Dokumen 5 Dokumen 17 Dokumen 12 kali 2 Dokumen 3 Dokumen 123 kali 12 Bulan 135 STEL 45 Orang 15 Jenis 15 Jenis			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 % 21 jenis 10 jenis	78 % 14 Jenis 6 jenis			
								melakukan evaluasi dan perencanaan uang kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	
								melakukan evaluasi dan perencanaan uang kebutuhan saran dan prasarana kantor	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 kali	42 kali			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 Kendaraan	28 Kendaraan			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	3 jenis	Peralatan mesin masih dalam kondisi baik	melakukan evaluasi dan perencanaan ulang kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 jenis	8 jenis	kurangnya waktu pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung	melaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung pada tahun selanjutnya	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	108 %			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	133 kali	131 kali			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96 jenis	96 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Lokasi	0 Lokasi	peralatan rumah tangga masih dalam kondisi baik	melakukan evaluasi dan perencanaan ulang kebutuhan peralatan rumah tangga	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	8 jenis	6 jenis	beberapa jenis bahan logistik masih tersedia	melakukan evaluasi dan perencanaan ulang kebutuhan bahan logistik kantor	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis	10 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	5 jenis			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 jenis	11 jenis			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 kali	20 kali			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 jenis	5 jenis			
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	51 %			
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 Dokumen	11 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	44 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	11 Dokumen	kurangnya waktu pelaksanaan pembahasan ranperda	melakukan evaluasi dan memaksimalkan pembahasan ranperda pada tahun selanjutnya agar mencapai target yang ditetapkan	
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Dokumen	0 Dokumen	kurangnya waktu pelaksanaan	melaksanakan penyusunan naskah akademik sesuai target	
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	1 Dokumen	0 Dokumen	telah dilaksanakan pada laporan kinerja tahunan	melakukan evaluasi dan perencanaan ulang sub kegiatan	
				Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	40 Kali	7 Kali			
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	54 %			
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	238 kali	21 kali			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	213 kali	21 kali	pelaksanaan bimtek yang berbenturan dengan jadwal rencana kerja DPRD lainnya	melakukan koordinasi agar bimtek DPRD dapat berlangsung bersama kegiatan DPRD lainnya	
				Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	7 jenis	7 jenis			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	9 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Jenis	3 Jenis			
				Kegiatan Penyergapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Kali	3 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Retes	3 Kali	3 Kali			
				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Kali	0 Kali			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	0 Dokumen	tidak ada perubahan dokumen kode etik dan tata beracara	melakukan evaluasi berkala	
				Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	603 kali	639 Kali			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	468 kali	440 Kali	kurangnya waktu pelaksanaan	melakukan evaluasi rencana kerja	
				Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	134 kali	149 Kali	kurangnya waktu pelaksanaan	melakukan evaluasi rencana kerja	
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	telah dilaksanakan pada laporan tahunan	melakukan evaluasi dan perencanaan ulang sub kegiatan	
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Kali	1 Kali			
5.1	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Kedungkandang	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 9 Dokumen	100 % 9 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK-A-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147 Pegawai	138 Pegawai	Beberapa ASN Penulun dan Meninggal Dunia	Bekerjasama dengan BKPSDM untuk pemutakhiran Data ASN sesuai Peta Jabatan	
				PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 % 12 Bulan	80 % 12 Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	8 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 jenis	50 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	5 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	2 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 kotak	1500 kotak	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kali	5 Kali	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Jenis	7 Jenis	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Surat	650 Surat	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlekapan Kantor	8 Jenis	8 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3400 m2	3400 m2	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.3 Angka	95.35 Angka	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan 50 Orang	1 kegiatan 50 Orang			
				PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.3 Angka 90 %	95.35 Angka 90 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Cemurkandang	28 layanan	28 layanan			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bumiayu	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Buring	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kotalama	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	28 layanan	28 layanan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Madyopuro	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Mergosono	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Sawojajar	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Tlogowatu	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Wonokoyo	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27 Dokumen	25 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Arjowinangun	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Bumiayu	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Cemorokandang	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kedungdandang	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kotalama	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Lesaripuro	0 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran di alihkan untuk menunjang sub kegiatan yang lainnya	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Madyopuro	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Merjosono	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Sawojajar	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tigowaru	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Wonokojo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38 %	51.11 %	-	-	
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bumiayu	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Buring	10 unsur	10 unsur	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan CemoroKandang	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kotalama	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan KedungKandang	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Lesanpuro	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Medangpuro	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mergosono	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sawojajar	10 unsur	10 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tigowaru	10 unsur	10 unsur	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90 %	86 %	-	-	
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arwinanigum	12 Bulan	12 Bulan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan CemoroKandang	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KedungKandang	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawojajar	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tigowaru	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arjowinangun	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan CemoroKandang	5 lembaga	5 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KedungKandang	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kotalama	4 lembaga	4 lembaga	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lesanpuro	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Madypuro	5 lembaga	5 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Merjosono	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sawojajar	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tilogowaru	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Wonokoyo	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	94 %	94 %	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36 kali	36 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	144 kali	144 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arwininggun	144 kali	144 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	144 kali	144 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	48 kali	48 kali	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	144 kali	144 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kotalama	144 kali	144 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	144 kali	144 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Madyopuro	96 kali	96 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mergosono	36 kali	36 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sawojajar	48 kali	48 kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	144 kali	144 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	48 kali	48 kali	-	-	
				PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96 %	96 %	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	-	-	
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 % 11 Kegiatan	66,89 % 11 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Antowinanigun	19 Lokasi	19 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu	10 Lokasi	10 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	17 Lokasi	17 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan CemoroKandang	28 Lokasi	28 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KedungKandang	12 Lokasi	12 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotalama	10 Lokasi	10 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro	20 Lokasi	20 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	26 Lokasi	26 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono	3 Lokasi	3 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawojajar	28 Lokasi	28 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tigowaru	18 Lokasi	18 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wontokoyo	8 Lokasi	8 Lokasi	-	-	
				Sub KegiatanEvaluasi Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	
5.2	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Kloten	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	107,47 % 83,33 % 33,33 %	-	-	
				Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	33,33 %	capaian kurang dari target	akan dilakukan appraisal kondisi kerja	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK-A-SKPD	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	99 %	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	97.30 %	belum terealisasi secara maksimal anggaran yang tersedia	akan dilakukan evaluasi untuk kegiatan ditahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepagawahan Perangkat Daerah	80 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	73.33 %	perhitungan jumlah penerima manfaat yang belum tepat	akan dilakukan evaluasi untuk kegiatan ditahun berikutnya	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	106 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	70 %	Jumlah pengadaan jenis barang yang direncanakan belum terealisasi secara maksimal	akan dilakukan evaluasi untuk kegiatan ditahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	105 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	73 %	Rencana SPDP belum terealisasi secara maksimal, dikarenakan menyesuaikan dengan undangan rapat yang diterima	akan dilakukan evaluasi untuk kegiatan ditahun berikutnya	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	150 %	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	198 %	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	133 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	-	-	
				PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.20 Angka	80.20 Angka			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.20 Angka	80.20 Angka			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 layanan	14 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Klojen	27 layanan	27 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman	27 layanan	27 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Oro-oro Dowo	27 layanan	27 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kasin	27 layanan	27 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Samaan	27 layanan	27 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bareng	27 layanan	27 layanan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gading Kasri	27 layanan	27 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rampal Celaket	27 layanan	27 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Penanggungan	27 layanan	27 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sukoharjo	27 layanan	27 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kidul Dalam	27 layanan	27 layanan	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80.20 Angka	80.20 Angka	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Klojen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Kauman	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Oro-oro Dowo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Kasin	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Samaan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Boreng	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan gading kasri	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan rampal celaket	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Panangtungan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan sukoarjo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan kidul dalam	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	99,58 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.20 Angka	80.20 Angka			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 unsur	3 unsur			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	98,36 %			
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	98,36 %			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Patroli	24 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Klojen	48 Patroli	48 Patroli			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kauman	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Oro-oro Dowo	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kasin	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Samaan	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bareng	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gading Kasri	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Rampil Calaket	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Penanggunan	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sukoharjo	48 Patroli	48 Patroli	=	=	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kidul Dalam	48 Patroli	48 Patroli	=	=	
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4,26 Angka	4,26 Angka			
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Klojen	5 unsur	5 unsur	-	-	
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4,26 Angka	4,26 Angka			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	5 unsur	5 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Oro-oro Dowo	5 unsur	5 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kasin	5 unsur	5 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Samaan	5 unsur	5 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bareng	5 unsur	5 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gading Kasri	5 unsur	5 unsur			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Rampal Celaket	5 unsur	5 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Penanggungan	5 unsur	5 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sukoharjo	5 unsur	5 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kiduldalem	5 unsur	5 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibjen	8 Kegiatan	8 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Dowo	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasim	38 Kegiatan	38 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Samaah	40 Kegiatan	40 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bareng	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gading Kasri	8 Kegiatan	8 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rampal celaket	21 Kegiatan	21 kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penanggungan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo	21 Kegiatan	21 kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kibjen	75 Orang	75 Orang	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	186 Orang	186 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Oro-oro Dowo	86 Orang	86 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasin	149 Orang	149 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samaan	72 Orang	72 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bareng	145 Orang	145 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gadingkasri	113 Orang	113 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rampal Colaklet	68 Orang	68 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penangungtan	107 Orang	107 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukoharjo	152 Orang	152 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kidul Dalam	85 Orang	85 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kijlen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	
53	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Sukun	Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	150 Pegawai	132 Pegawai	Beberapa ASN Pensiun dan Meninggal Dunia	Bekerjasama dengan BKPSDM untuk pemutakhiran Data ASN sesuai Peta Jabatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 laporan	17 laporan			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Jenis ATK	34 Jenis ATK	Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	Menyesuaikan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit)	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3800 kotak	3640 kotak	Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	Menyesuaikan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit)	
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis Barang Cetak	7 Jenis Barang Cetak	Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	Menyesuaikan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit)	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 eksemplar	118 eksemplar	Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	Menyesuaikan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit)	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kegiatan	9 Kegiatan	Pelaksanaan Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	Menyesuaikan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit)	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Surat	800 Surat	Pelaksanaan administrasi surat menyurat menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	Menyesuaikan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit)	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Tagihan	12 Tagihan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1383 m2	1383 m2			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.3 Angka	80.3 Angka			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Pegawai	50 Pegawai			
				PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bakelankrajan	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bandulan	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bandungrejosari	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Ciptomulyo	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gadang	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karangbesuki	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kebonsari	28 layanan	28 layanan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mulyorejo	28 layanan	28 layanan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Piangcandi	28 layanan	28 layanan		-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sukun	28 layanan	28 layanan		-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tanjungrejo	28 layanan	28 layanan		-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bandungrejoari	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Ciptomulyo	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Gading	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Karangbesuki	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kebonsari	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Piangcandi	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Mulyorejo	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Pisangcandi	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Sukun	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tanjungrejo	3 Dokumen	3 Dokumen	Monografi Semester 1 dan Semester 2	Dokumen Profil dari Aplikasi Prodeskel	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90 %	100 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.34 Angka	4.4065 Angka			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalantrajan	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandulan	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciptomulyo	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedang	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangbesuki	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyorejo	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pisangcandi	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukun	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.34 Angka	4.4065 Angka			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tingkat Kecamatan	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan BaktiKrajan	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bandulan	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bandungrosari	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Cipinuluyo	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Gadang Karangbesuki	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kebonsari	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pisingcandi	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sukun	9 unsur	9 unsur			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tanjungrejo	9 unsur	9 unsur			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 %	43 %			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalan Krajan	8 Paket	8 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandulan	21 Titik	21 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandungrosari	24 Paket	24 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciptomulyo	22 Paket	22 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gadang	13 Titik	13 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangbesuki	11 Paket	11 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari	8 Paket	8 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyorejo	33 Paket	33 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pisangcandi	11 Titik	11 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukun	16 Titik	16 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungrejo	39 Titik	39 Titik			
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.34 Angka	4.4065 Angka			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bakalan Krajan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bandulan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bandungrosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ciptomulyo	9 lembaga	9 lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gadang	9 lembaga	9 lembaga		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karangbesuki	9 lembaga	9 lembaga		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kebonsari	9 lembaga	9 lembaga		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mulyorejo	9 lembaga	9 lembaga		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pisangcandi	9 lembaga	9 lembaga		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sukun	9 lembaga	9 lembaga		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tanjungrejo	9 lembaga	9 lembaga		-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	9 lembaga	9 lembaga		-	
			Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum yang kondusif	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	94 %	100 %			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	144 Patroli	144 Patroli		-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bakalankrajan	144 Patroli	144 Patroli		-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bandulan	144 Patroli	144 Patroli		-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bandungrepsari	144 Patroli	144 Patroli		-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ciptomulyo	144 Patroli	144 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gadang	144 Patroli	144 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangbesuki	144 Patroli	144 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari	144 Patroli	144 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mulyorejo	144 Patroli	144 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pisangcandi	144 Patroli	144 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sukun	144 Patroli	144 Patroli			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tarungrejo	144 Patroli	144 Patroli			
				PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96 %	100 %			
			Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitas Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	80,3 Angka	80,3 Angka			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 unsur	2 unsur			
5.4	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Blimbing		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 % 80.3 Angka 5 Dokumen 4 Dokumen 1 laporan 3 laporan 80.3 Angka 134 Orang 13 laporan 100 % 80.73 Angka 12 Dokumen 80.3 Angka 9 Unit 80.3 Angka 12 Unit 34 Unit	100 % 80.3 Angka 5 Dokumen 4 Dokumen 1 laporan 3 laporan 80.3 Angka 134 Orang 13 laporan 100 % 80.73 Angka 12 Dokumen 80.3 Angka 9 Unit 80.3 Angka 12 Unit 34 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	34 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.58 Angka	80.58 Angka			
				Perangkat Daerah	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134 Orang	134 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	7 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3 paket	3 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.3 Angka	80.3 Angka			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.3 Anak	80.3 Anak			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28 Kebijakan	28 Kebijakan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Balearjosari	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Arjosari	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Polowijen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Blimbing	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan purwodadi	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Pandanwangi	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Purwantoro	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Bunulrejo	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kesatrian	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Polehan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Jodipan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	48 Dokumen	48 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Baleajjosari	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Arjosari	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polowijen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwodadi	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Blimbing	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwantoro	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kesatrian	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polehan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Jodipan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PEMBEDEYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90 %	90 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	58 Kegiatan	58 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Balejarjosari	12 lembaga	12 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Balejarjosari	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Arjosari	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Polowijen	84 lembaga	84 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Parwodadi	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Blimbing	22 lembaga	22 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pandanwangi	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Purwantoro	14 lembaga	14 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kesatrian	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Polehan	9 lembaga	9 lembaga	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jodipan	15 lembaga	15 lembaga			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	58 Kegiatan	58 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	132 laporan	132 laporan			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 Kelurahan	11 Kelurahan			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balearjosari	7 Titik	7 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjosari	7 Lokasi	7 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen	28 Unit	28 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodadi	15 Unit	15 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blimbing	16 Paket	16 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandanwangi	14 Unit	14 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwantoro	63 Paket	63 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bunurejo	40 Unit	40 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesatrian	14 paket	14 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polehan	7 Unit	7 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan	8 Unit	8 Unit			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balearjosari	3 kelompok	3 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjosari	7 Kegiatan	7 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen	4 kelompok	4 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi	15 Unit	15 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blimbing	3 kelompok	3 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandanwangi	1 kelompok	1 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwantoro	1 kelompok	1 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bunuirejo	6 kelompok	6 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian	3 kelompok	3 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polehan	9 kelompok	9 kelompok			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jodipan	3 kelompok	3 kelompok			
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	41 lembaga	41 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12 lembaga	12 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balearijosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arjosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polowijen	84 lembaga	84 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwodadi	5 lembaga	5 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Blimbing	12 lembaga	12 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandanwangi	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwantoro	12 lembaga	12 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bunuirejo	9 Lembar	9 Lembar			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kesatrian	9 lembaga	9 lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pedirian	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jodipan	7 lembaga	7 lembaga	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	94 %	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	937 kelompok	937 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Balearjosari Kecamatan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ajosari	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polowijen	13 laporan	13 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwodadi	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blimbing	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	12 laporan	12 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwanto	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bunurejo	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kesatrian	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polehan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jodipan	13 laporan	13 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96 %	96 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kali	2 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen			
5.5	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % 2 laporan 3 Dokumen	100 % 2 laporan 3 Dokumen			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	-
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	150 ASN	133 ASN	Beberapa ASN Purna Tugas	Bekerjasama dengan BKPSDM untuk pemutakhiran Data ASN sesuai Peta Jabatan	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 laporan	17 laporan	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Orang	2 Orang	-	-	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.5 %	90.08 %	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Surat	850 Surat	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Tagihan	12 Tagihan	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1383 m ²	1383 m ²	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Angka	0 Angka	-	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	-	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Angka 81.5 % 50 Orang 81.5 % 6 Jenis 36 jenis 3800 Kotak 8 jenis barang Cetak 120 eksemplar 3800 kotak 81.5 Angka 80.3 Angka 97 layanan 28 layanan 28 layanan 28 layanan	82.35 Angka 81.5 % 50 Orang 81.5 % 6 jenis 36 jenis 3640 Kotak 7 Jenis Barang Cetak 108 eksemplar 3160 Kotak 90.08 Angka 82 Angka 97 layanan 28 layanan 28 layanan 28 layanan	- - - - - - Pengadaan Barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Menyusulkan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit) Menyusulkan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit) Menyusulkan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit) Menyusulkan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit) Menyusulkan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit) Menyusulkan dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Per Unit)		
				PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Dinoyo Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tunggul Wulung	81.5 Angka 80.3 Angka 97 layanan 28 layanan 28 layanan 28 layanan	82 Angka 97 layanan 28 layanan 28 layanan 28 layanan	- - - -		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Merjosari	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sumber Sari	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Mojolangu	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Turjunga Sekar	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tasikmadu	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Ketawang Gede	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Jatimulyo	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tulus Rejo	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tlogomas	28 layanan	28 layanan	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80.3 Angka	82 Angka	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Lowokwaru	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Dinoyo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Sumbersari	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Ketawanggede	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Jatimulyo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tunjungsekar	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Mojolangu	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tulisrejo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tasikmadu	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tongguluwung	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tlogomas	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Merjosari	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90 %	90 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90 %	90 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dinoyo	16 Titik	16 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatimulyo	22 Paket	22 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketawanggede	13 Titik	13 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lowokwaru	8 Paket	8 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Merjosari	24 Paket	24 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojoharjo	39 Titik	39 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbersari	11 Titik	11 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tasikmadu	11 Paket	11 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogomas	21 Titik	21 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tulusrejo	33 Paket	33 Paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunjungrejo	5 Titik	5 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunjungsekar	21 Titik	21 Titik			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90 %	100 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.9 Angka	4.4065 Angka			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lowokwaru	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunggal Wulung	12 Bulan	12 Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Merjosari	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Sari	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojolangu	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tasikmadu	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketawanggede	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tulisrejo	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomas	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Lowokwaru	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dinoyo	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Tunggulwulung	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Merjosari	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sumber Sari	9 unsur	9 unsur	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mojolangu	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tunjung Sekeloa	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tasikmadu	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ketawanggede	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jalmulyo	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tulustrejo	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tlogomas	9 unsur	9 unsur	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.34 Angka	4.24 Angka	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Lowokwaru	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Dinoyo	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tunjuggalung	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mesijosari	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sumber Sari	9 lembaga	9 lembaga	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan MJOjlempu	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tunjungsekar	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tasikmadu	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ketawanggede	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatimulyo	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tulustrejo	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tlogomas	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KERTIBAN UMUM	94 %	96 %			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	94 %	100 %			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lowokwaru	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Dinoyo	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Merjosari	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tunggalwulang	144 Patroli	144 Patroli	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sumber Sari	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mojolangu	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tunjungsekar	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tasikmadu	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Ketawanggede	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jatimulyo	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tlogomas	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tulusejo	144 Patroli	144 Patroli	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Patroli	12 Patroli			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.30 Angka	82 Angka			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.9 Angka	4.4065 Angka			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 unsur	2 unsur			
6.1	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	80 %	97.8 %			
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	34 Dokumen	34 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keselurahan	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	20 Dokumen	30 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	30 Dokumen			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitsar Realisasi Kinerja SKPD Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
6.2	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Kesra dan Kemasayarakatan	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasayarakatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 %	100 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17 Dokumen	17 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
6.3	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 %	100 %			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	11 sidang	11 sidang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	150 sidang	199 sidang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	16 Dokumen	33 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	80 Orang	348 Orang			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	65 Orang	130 Orang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	65 Orang	130 Orang			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	300 Orang	246 Orang			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300 Orang	246 Orang	Kondisi Rill di lapangan peserta yang hadir 246 orang	meningkatkan akurasi perencanaan	
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	500 Orang	446 Orang			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	500 Orang	446 Orang	Kondisi Rill di lapangan peserta hadir 446 orang	meningkatkan akurasi perencanaan yang efektif	
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	500 Orang	331 Orang			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	500 Orang	331 Orang	tingkat kehadiran peserta	meningkatkan akurasi perencanaan	
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	9 Produk Hukum	7 Produk Hukum			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	9 Produk Hukum	7 Produk Hukum	dua raperda masih dalam proses di Kementerian dan biro hukum provinsi Jawa timur	Koordinasi dengan kementerian dan biro hukum provinsi Jawa timur	
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	580 Produk Hukum	837 Produk Hukum			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	580 Produk Hukum	837 Produk Hukum			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5000 Buku	5000 Buku			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	5000 Buku	5000 Buku			
6.4	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	4 laporan	4 laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 laporan	1 laporan			
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen			
6.5	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya layanan PBJ Kota Malang	Program Perencanaan dan Pembangunan	100 %	76 %			
				Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100 %	76 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	258 layanan	295 layanan	nihil	nihil	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200 Dokumen	152 Dokumen	tidak tercapainya target disebabkan karena jumlah paket yang masuk sebanyak 155 paket dan yang selesai sebanyak 152 paket	menurunkan target dikarenakan telah banyak metode pengadaan selain tender seperti e-purchasing	
				Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	508 layanan	1624 layanan			
6.6	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Umum	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70 Orang	70 Orang			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1435,6 Meter	1271,59 Meter	terdapat paket pekerjaan yang tidak diserap yaitu kain khaki untuk Kepala OPD karena setelah dilakukan penggalan dan sesuai hasil arahan pimpinan, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum.	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 jenis	50 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Jenis	100 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39 jenis	39 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	34 jenis	34 Jenis			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1200 Kegiatan	1173 Kegiatan	sesuai dengan ril jumlah fasilitas makan minum yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah PHBN, mainin pengamanan ketika terjadi demonstrasi dan mainin acara insiden!!!	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 kali	173 kali	sesuai dengan ril jumlah fasilitas rapat SKPD dalam dan luar kota yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah (berdasarkan undangan dan hasil disposisi)	meningkatkan akurasi perencanaan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 jenis	20 jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	35 jenis	35 jenis			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 jenis	38 jenis	Terdapat 2 jenis belanja yang tidak diserap karena sesuai dengan kebutuhan ril di lapangan	meningkatkan akurasi perencanaan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	6 jenis	6 jenis			
				Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35 jenis	33 jenis	Terdapat 2 jenis belanja yang tidak diserap karena sesuai dengan kebutuhan ril di lapangan	meningkatkan akurasi perencanaan	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11000 Surat	10471 Surat	sesuai dengan ril banyaknya surat masuk dan keluar pada Bagian Umum.		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250 Kegiatan	220 Kegiatan	sesuai dengan ril jumlah fasilitas jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah (jasa sewa peralatan untuk upacara PHBN, dan acara insiden!!!)	meningkatkan akurasi perencanaan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Jenis Layanan	10 Jenis Layanan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	10 jenis	6 jenis	sesuai dengan ril jumlah mebel yang dipelihara dan karena pada tahun 2022 jumlah mebel yang mengalami kerusakan sedikit	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5 jenis	4 jenis	sesuai dengan jumlah ril sarana prasarana di lingkungan rumah jabatan kdh/wkdh yang dipelihara (1 jenis barang tidak dipelihara karena tidak mengalami kerusakan)	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	97,14 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35 Dokumen	33 Dokumen	sesuai dengan ril pengaluan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
				Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	73 Jenis Layanan	67 Jenis Layanan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	30 Jenis Layanan	30 Jenis Layanan	-		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	25 Jenis Layanan	21 Jenis Layanan	sesuai dengan ril jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	18 Jenis Layanan	16 Jenis Layanan	sesuai dengan ril jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah.	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	-		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105 Unit	104 Unit	sesuai dengan ril jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak serta perizinan nya.	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14 gedung	14 gedung			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	9 jenis	8 jenis	sesuai dengan jumlah ril sarana prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang dipelihara	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33 Unit	31 Unit	sesuai dengan ril jumlah kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat yang di suranskan	meningkatkan akurasi dalam perencanaan	
6.7	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penataan Organisasi	90 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 Dokumen 4 Ranperwal	25 Dokumen 8 Ranperwal			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Ranperwal	5 Ranperwal			
				Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penataan Organisasi	2.2 -	3.29 -			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	20 Dokumen 1 Dokumen	25 Dokumen 1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
6.8	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Humas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4 layanan	4 layanan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Keprrotokolan	600 layanan	1071 layanan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	650 kali	760 Kali			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 layanan	3 layanan			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Dokumen	4 Dokumen			



LAMPIRAN **PELAKSANAAN URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra dan Renja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 100 % 100 % 4 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen 100 % 12 Bulan 600 SPM 5 Dokumen	7 100 % 100 % 4 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen 100 % 12 Bulan 541 SPM 5 Dokumen	8	9	10
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 100 % 42 Orang 100 % 7 Jenis Komponen Listrik	7 100 % 42 Orang 100 % 7 Jenis Komponen Listrik	8 pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui sistem dan daring		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 100 % 26 Kendaraan 6 Dokumen 80 Angka	6 100 % 26 Kendaraan 6 Dokumen 80 Angka			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kependagawaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 100 % 42 Orang 100 % 79 Jenis ATK	6 100 % 42 Orang 100 % 79 Jenis ATK			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	7 jenis Barang Cetak	7 Jenis Barang Cetak			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Jenis Barang Cetak	12 Jenis Barang Cetak			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10800 Kotak Makanan	9567 Kotak Makanan	terdapat kegiatan rapat yang semula pada awal tahun perencanaan dilaksanakan offline namun pada pelaksanaannya dilakukan secara daring		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 dinas luar daerah	113 dinas luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah menyesuaikan dengan jumlah undangan dan pelaksanaan kegiatan	Akan disesuaikan dengan RKB	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Buah	9 Buah			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bilya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Kendaraan yang di Proses Perijinannya	26 Kendaraan yang di Proses Perijinannya			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bilya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9500 Liter	8785 Liter	Pengadaan bhm menyesuaikan pelaksanaan kegiatan	Melakukan koordinasi dan penyesuaian dengan RKB	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 Buah	32 Buah	Terdapat beberapa peralatan yang memang dalam kondisi rusak berat sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan	melakukan penghapusan barang bagi barang yang sudah mengalami kerusakan berat	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Ruang	2 Ruang			
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendaftar Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	225 Orang	232 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	225 Orang	225 Orang			
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37 Data	37 Data			
				Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	32 Dokumen	32 Dokumen			
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	15 Dokumen	15 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Rakortek	1 Rakortek			
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPPD RPJMD dan RKPD)	35 Dokumen	35 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPPD RPJMD dan RKPD)	8 Kegiatan	8 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25 Dokumen	25 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Dokumen	10 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 Rakortek	1 Rakortek			
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Dokumen	8 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Rakortek	1 Rakortek			
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	25 Dokumen	25 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Rakortek	1 Rakortek			
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	75 %	75 %			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	75 %	75 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.1	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penujangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan dan Pengelolaan BMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 % 100 % 2 Dokumen 8 Dokumen 12 Dokumen 100 % 14 Dokumen 500 SPM 100 % 33 Unit 2 Dokumen 100 % 100 Orang 80 Orang 100 % 2 Jenis	100 % 2 Dokumen 8 Dokumen 12 Dokumen 100 % 14 Dokumen 525 SPM 100 % 33 Unit 2 Dokumen 100 % 60 Orang 80 Orang 100 % 2 Jenis			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56 jenis	56 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kali	1 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	8 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 kali	119 Kali	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	6 jenis	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39000 Surat	38577 Surat	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1180 m2	1180 m2	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38 Unit	38 Unit	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Ranperwal	2 Ranperwal	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	2 Ranperwal	2 Ranperwal	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	1 Ranperwal	1 Ranperwal	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang			
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyajian Pelaksanaan Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	516 Dokumen	516 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Ranperwal	1 Ranperwal			
				Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	190 Orang			
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Ranperwal	2 Ranperwal			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Turutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Ranperwal	1 Ranperwal	-	-	
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Kali	5 Kali			
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	132 Entitas	132 Entitas	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Cota	132 Entitas	132 Entitas	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,90 %	3,01 %			
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12,68 %	19,03 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	20 Dokumen	17 Dokumen	Karena pengaluan penilaian sewa/penghapusan dan SKPD/BMD pengelola hanya 17	Memberikan pembinaan pengelolaan BMD kepada SKPD/pengguna BMD	
				Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 ljin	209 ljin			
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	53,45 %	53,45 %			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	41 Objek	41 Objek			
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	1 Ranperwal	0 Ranperwal	Karena draf Ranperwal dalam proses penyusunan	Telah dilakukan evaluasi internal berjenjang pada Bidang BKAD.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Ramporwal	0 Ramporwal	Draf Ramporwal masih dalam proses penyelesaian	Telah dilakukan evaluasi internal berjangka pada Bidang BKAD.	
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	Draf Ramporwal dalam proses penyelesaian	Telah dilakukan evaluasi internal berjangka pada Bidang BKAD.	
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	53.45 %	53.45 %			
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Entitas	132 Entitas			
2.2	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 7 Dokumen	100 % 7 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 ASN	59 ASN	terdapat beberapa ASN yang Mutasi dan pensiun	Mengusulkan penambahan ASN baru	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	161 Dokumen	161 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	21.13 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	71 Unit	18 Unit	yang diarsanakan hanya kendaraan roda 4, untuk kendaraan roda 2 tidak di asuransikan karena hanya di anggarakan biaya pemeliharaan		
				Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	117.14 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140 ASN	164 ASN			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	76.92 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	0 Jenis	Pencairan belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor salah mengambil anggaran sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Anggaran Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak dilairkan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143 Jenis	143 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9 Kali	9 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27 jenis	27 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Kali	12 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Kali	56 kali	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 jenis	20 Jenis	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	93.75 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71 Unit	66 Unit	Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan sesuai kebutuhan	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	108.36 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 Surat	5418 Surat	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850 m2	850 m2	-	-	
				PROGRAM PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH	83.44 %	76.50 %	-	-	
				Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	9 Jenis	9 jenis	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub KegiatanPendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1200 Wajib Pajak	1176 Wajib Pajak	terdapat beberapa pelaku usaha/wajib pajak yang pemiliknya tidak ada di tempat di luar kota	Menghubungi pemilik usaha untuk diwinkan atau dikuasakan kepada pengelola/karyawan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60000 Berkas	60000 Berkas	-	-	
				Sub KegiatanPenetapan Wajib Pajak Daerah	321508 Wajib Pajak	313235 Wajib Pajak	Beberapa wajib pajak kurang tertib dalam batas waktu maksimal pelaporan omzet	Mengingatkan secara berkala batas maksimal harus melaporkan omzet	
				Sub KegiatanPenelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40000 Wajib Pajak	37600 Wajib Pajak	1. Beberapa tempat usaha sudah tutup tetapi tidak melapor ke Bapenda 2. Wajib Pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet secara detail	1. Mendata tempat usaha yang sudah tutup dan tindak lanjut pengapusan NPWP 2. Meminta rincian omzet secara detail	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	23.83 % 9 Jenis	12.30 % 9 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	80000 Wajib Pajak	80000 Wajib Pajak	-	-	
				Sub Kegiatan Pemagihan Pajak Daerah	65197794770.99 Rupiah	33649067696.57 Rupiah	1. Banyak Objek Pajak yang tutup dan tidak berpeghuni sehingga tidak dapat dilakukan pemagihan pajak 2) Wajib Pajak Palit	Melakukan Kajian Penghapusan Piutang atas piutang pajak yang tidak mungkin tercah	
				Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	900 Wajib Pajak	911 Wajib Pajak	-	-	
				Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1300 Wajib Pajak	1355 Wajib Pajak	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	14.88 % 9 Jenis	25.86 % 9 Jenis			
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	48 Orang	Terdapat mutasi keluar pegawai	menyesuaikan jumlah pegawai pada tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	374 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Unit	3 Unit			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 Unit	42 Unit			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Benda Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	18 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127 Unit	127 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47 Orang	47 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4189 Buah	4189 Buah			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4701 Buah	4701 Buah			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kali	1 Kali			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1800 Buah	1800 Buah			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kali	210 Kali			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Surat	3948 Surat	sesuai kebutuhan penyusunan surat keluar	output menyesuaikan dengan kebutuhan surat	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
			Meningkatnya Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	85.65 %	73.79 %			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	33 %	6 %			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16 Orang	0 Orang	tidak ada ASN yang mendaftar untuk uji kompetensi	memberikan informasi secara berkala kepada para pejabat fungsional	
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	11 %	15.1 %			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100 Orang	100 Orang			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	62 %	55 %			
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN	947 Orang	1716 Orang			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	623 Orang	1262 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	549 Orang	514 Orang	ASN pensiun yang sesuai dengan batas usia pensiun	menghitung ulang jumlah pensiun secara tepat	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	500 Orang	1100 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawalan	9400 Data	15335 Data			
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	2500 Dokumen	2917 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Orang	845 Orang	Belum terpenuhinya Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang telah dikumpulkan bisa diakumulasikan sampai mencapai batas minimal yang dipersyaratkan	Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang telah dikumpulkan bisa diakumulasikan sampai mencapai batas minimal yang dipersyaratkan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	1500 Dokumen	2072 Dokumen			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1498 Orang	1498 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	457 Orang	406 Orang	Jumlah peserta banyak yang tidak hadir karena berbenturan dengan kegiatan lain.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Assessment Center yang bekerjasama dengan BKD PROVINSI JAWA TIMUR	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	80 Orang	110 Orang			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0 %	0,076 %			
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6781 Orang	6607 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125 Orang	125 Orang			
				Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125 Orang	125 Orang			
				Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18 Kasus	5 Kasus			
				Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	660 Orang	4642 Orang			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	74,86 %	70 %			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	74 %	79 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	307 Orang	307 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	189 Orang 100 %	51,2 % 189 Orang			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	189 Orang	189 Orang			
4	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra Renja	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	70 % 2 Dokumen 2 Dokumen	76 % 2 Dokumen 2 Dokumen			
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	55 % 3 Dokumen	55 % 3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	2 Jurnal Penelitian	2 Jurnal Penelitian			
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 % 2 Dokumen	100 % 2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6 1 Dokumen	7 1 Dokumen	8	9	10
					1 Dokumen	1 Dokumen			
					1 Dokumen	1 Dokumen			



PEMERINTAH
KOTA MALANG

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
WALIKOTA MALANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

